

MELAWAN NEGARA TERORIS

Dominasi Amerika Serikat terhadap Irak & Kedaulatan Dunia

RAHUL MAHAJAN

"Esensial bagi mereka yang ingin terus melawan dominasi."
—Medea Benjamin,
Pendiri Global Exchange and Code Pink: Woman for Peace

"Tujuan seluruh transformasi yang digambarkan dalam dokumen ini adalah penciptaan sebuah kekuatan yang dominan di atas segala spektrum operasi militer—persuasif dalam damai, tegas sewaktu perang, unggul di setiap bentuk konflik apa pun. ...Full spectrum dominance—*kemampuan pasukan Amerika Serikat, yang beroperasi secara sepihak atau bersama-sama partner multinasional dan antarlembaganya, untuk mengalahkan setiap musuh-musuhnya dan mengontrol situasi apa pun dengan jangkauan operasi militer sepenuhnya."*

—**JOINT VISION 2020,** dirilis 30 Mei 2000

"Kami tidak mengarah pada kekaisaran. Kami bukan imperialistik. Tidak akan pernah. Saya tidak mengerti dari mana datangnya pertanyaan semacam ini."

—**MENTERI PERTAHANAN DONALD RUMSFELD,**
ketika ditanya oleh seorang koresponden Al-Jazeera
tentang kebenaran atas kecenderungan pemerintahan
Bush ke arah "pembentukan kekaisaran".
Jumpa pers, 28 April 2003.

MELAWAN NEGARA TERORIS

Dominasi Amerika Serikat terhadap Irak
dan Kedaulatan Dunia

RAHUL MAHAJAN



PROFETIK

TEROR NEGARA ATAS NEGARA

Diterjemahkan dari: Full Spectrum Dominance: U.S. Power in Iraq and Beyond
Penulis: Rahul Mahajan
Terbitan: Seven Stories Press New York

Penerjemah: Anom
Penyunting: Niam Sa'diyah
Pemeriksa Bahasa: Adlan Nawawi

Cetakan I, 2005
Diterbitkan oleh Penerbit TERAJU
PT Mizan Publika
Kompleks Plaza Golden Blok E 47
Jl. R.S. Fatmawati No. 16 Jakarta Selatan 12420
Telp. (021) 7697490, Faks. (021) 75817609
e-mail: teraju@cbn.net.id
http://www.mizan.com

Desain Sampul: Abdul Latif
Tata Letak: Tim kreatif pracetak MMU

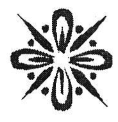
Didistribusikan oleh Mizan Media Utama (MMU)
Jl. Cinambo (Cisaranten Wetan) No. 146
Ujung Berung Bandung 40294
Telp. (022) 7815500, Faks. (022) 7802288
e-mail: mizanmu@bdg.centrin.net.id

"Untuk rakyat Irak yang penuh derita, seraya berharap semoga mereka memperoleh kemerdekaan sejati di kemudian hari. Bagi gerakan global antiperang yang akan terus mendobrak tirani kekuasaan."

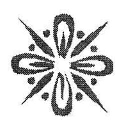
Rahul Mahajan

Saya ingin berterimakasih kepada Zeynep Tufekci atas bantuannya dalam menyusun buku ini dan atas kolaborasi politis kami yang terjalin selama ini hingga membuahkan hasilnya. Pengaruhnya akan terlihat di setiap halaman buku ini.

DAFTAR ISI



PENDAHULUAN
Setelah Perang: Kekuatan AS di Irak dan Sekitarnya



PERHITUNGAN POLITIS JANGKA PENDEK pemerintahan Bush rupa-rupanya mulai menjadi kenyataan. Dengan jelas-jelas mengabaikan hantaman bertubi-tubi para oposan dari dalam dan luar negeri, pemerintahan Bush mempertaruhkan semua pada gagasan bahwa "tidak ada yang semanis keberhasilan." Sukaria awal yang dirasakan warga Irak di akhir pemerintahan Saddam Hussein yang sangat keji (dan atas harapan mereka akan adanya penghentian sanksi yang telah menyengsarakan mereka) telah mungkinkan pemerintahan Bush untuk mengklaim bahwa ini adalah sebuah perang pembebasan. Perhatikanlah cara mereka memegang kendali selama perang ini berlangsung (bandingkan dengan, katakanlah, Perang Teluk, di mana tenaga listrik dan prasarana sipil lain dibom secara sistematis, dan di mana puluhan ribu prajurit tanpa daya dibantai, tanpa ampun dibom di "Jalan Raya Kematian", atau dikubur di padang pasir selatan Irak.) Perang Irak yang kedua ini benar-benar telah

menjadi sesuatu yang bisa kita sebut sebagai kemenangan imperialis.

Sungguhpun ribuan prajurit dan warga sipil dibantai, cacat, dan terluka oleh perang, tidaklah sulit untuk beragumen bahwa ini adalah sebuah harga yang sedikit yang harus dibayar atas fakta keinginan warga Irak yang akan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dengan berakhirnya rezim Saddam Hussein. Apalagi dengan harapan pencabutan sanksi yang selama ini dibebankan AS terhadap mereka. Selama pesta pora mabuk kemenangan ini, mereka melupakan bahwa perang tigaminggu yang baru berakhir ini adalah titik kulminasi dari pergulatan perang selama 13 tahun. Perang yang lama yang dibiayai terutama oleh Amerika Serikat terhadap rakyat Irak. Peristiwa Perang Teluk dan penetapan sanksi telah mengorbankan paling tidak satu juta jiwa atau lebih warga Irak dan telah mengarahkan Irak pada kehancuran masyarakatnya dalam skala besar. Mudah pula dilupakan adanya fakta bahwa Irak, selama perang berlangsung, tidak menggunakan "senjata pemusnah massal" (sebuah sebutan yang dipakai bagi persenjataan yang setara dengan daya penghancur bom termonuklir milik Amerika Serikat terhadap selongsong artileri Irak yang—mungkin—berisi senyawa kimia *mustard*). Karenanya, sangat menggelikan untuk menerima argumentasi bahwa Irak merupakan ancaman bagi AS, hingga harus dilakukan tindakan "pencegahan" terhadapnya. Jika rezim Saddam Hussein tidak mampu atau enggan menggunakan 'senjata pemusnah massal' yang menakutkan itu dalam perang habis-habisan untuk menyelamatkan singgasananya—yang menjadi ancaman utama baginya—keadaan apa pula yang mampu memaksa dia untuk menggunakannya? Apa

kemungkinan ancaman terhadap sebuah negara adidaya di dunia ini yang bisa dilakukan oleh sebuah negara yang tidak bisa menerbangkan sebuah pesawat pun dalam menghadapi pasukan pendudukan?

Perang adalah komponen integral, dan mungkin komponen utama, dalam penyebaran visi baru kebijakan luar negeri AS. Hal ini berhubungan dengan satu kelompok ideolog yang menyebut diri mereka sebagai para neokonservatif. Mereka kini muncul sebagai kelompok yang memiliki pengaruh dominan dalam pemerintahan. Kendati akar sebenarnya pada setiap gagasan neokonservatif bisa dilihat pada kebijakan dasawasa 1990-an, saat inilah pertama kalinya selama era pasca-Perang Dingin mereka menerjemahkan visi mereka dengan penggunaan peralatan militer secara langsung untuk memperpanjang dominasi Amerika Serikat.

Utamanya, perang secara dramatis meningkatkan kemampuan jangka-panjang Amerika Serikat untuk melakukan "proyeksi kekuatan," bukan saja di Timur Tengah tetapi, seiring dengan perkembangan lain, bisa saja di negara-negara lain di dunia.

RENCANA AS UNTUK IRAK

Intinya, bagi kita yang memiliki sedikit keraguan tentang maksud dan keinginan AS terhadap Irak, masalahnya akan terhalau ketika Wakil Menteri Pertahanan Paul Wolfowitz memproklamirkan 'penemuannya', yakni sebuah doktrin "*odious debt* (hutang yang tidak sah)."

Doktrin ini pertama kali dipakai pada tahun 1898, setelah terjadinya Perang Spanyol-Amerika. Saat itu, Amerika Serikat telah "memerdekakan" Kuba dan memutuskan untuk menguasainya. Klaim kekuasaan itu sangat terlihat menyolok mata dengan adanya Amandemen Platt terhadap konstitusi Kuba. Amandemen tersebut secara eksplisit menyebutkan hak Amerika Serikat untuk dapat menginterversi Kuba kapan saja mereka inginkan. Ketika Spanyol menekan dengan meminta pembayaran kembali hutang Kuba kepada Spanyol, Amerika Serikat mendebatnya dan menyatakan bahwa hutang tersebut tidak sah karena dikenakan atas rakyat Kuba tanpa persetujuan mereka dan ditegakkan oleh kekuatan senjata."

Dasar gagasan ini adalah hutang yang terjadi saat pemerintahan rezim yang tidak representatif tidaklah layak dibayar kembali oleh rakyatnya, telah menjadi bagian dari hukum internasional yang lazim. Inilah satu dari beberapa argumen yang dipakai kelompok Jubilee 2000 dalam upaya mereka, yang kebanyakan tidak sukses, untuk menghapuskan atau mengurangi pembayaran hutang luar negeri negara-negara Dunia Ketiga. Dalam pelaksanaannya, doktrin ini lebih banyak dilanggar daripada ditaati. Logika ini menjadi muskil ketika Paul Wolfowitz di depan Komite Urusan Persenjaatan AS mengucapkan, "Saya harap...mereka mau berpikir tentang hutang sangat besar yang terjadi karena pembiayaan yang dilakukan diktatornya untuk membeli persenjataan dan membangun istana-istana dan menyiapkan sarana penindas rakyatnya. Saya pikir mereka harus mempertimbangkan untuk sepantasnya membatalkan sebagian atau seluruh hutang tersebut sehingga peme-

rintahan Irak yang baru tidak terbebani karenanya."[1] Tetapi dia tidak menyebut-nyebut bagaimana hal ini dapat diterapkan pada hutang Kongo, yang dikendalikan oleh pemerintahan kleptokrasi diktator Mobutu Sese Seko dukungan AS, atau bahkan yang lebih cocok lagi, terhadap hutang yang dibuat oleh rezim apartheid Afrika Selatan, sekutu dekat AS yang strategis selama ini.

Masalah itu menjadi sangat berbeda saat ini dibandingkan dengan insiden dengan Kuba. Segera setelah "memerdekakan" Irak, AS mengumumkan keinginannya untuk membangun empat basis militer di Irak. Seorang pejabatnya menyatakan, "Akan dibangun semacam hubungan dalam rangka pertahanan jangka panjang dengan Irak yang baru, sama seperti Afghanistan."[2] Kendati Menteri Pertahanan Rumsfeld kemudian, sebagaimana kebiasaannya, mencoba menyangkalnya, namun hampir tidak diragukan lagi bahwa kehadiran militer AS di Irak merupakan komponen kunci bagi rencana AS untuk terus mengubah peta politik Timur Tengah.

MINYAK

Rencana AS untuk minyak Irak juga sama jelasnya. Irak adalah negara Arab pertama yang menasionalisasikan minyaknya pada tahun 1972. Pada dasawarsa 1990-an, seperti negara-negara OPEC lainnya (terutama Iran), yang menderita kelangkaan modal yang parah sebagaimana umumnya negara Dunia Ketiga, Irak mulai mencari pinjaman modal asing untuk membiayai eksplorasi baru. Kendati tidak ada satu pun persetujuan yang bisa dilaksanakan karena adanya sanksi, Irak menandatangani persetujuan dengan perusahaan minyak dari hampir

semua negara kecuali Amerika Serikat atau Inggris. Sebabnya adalah karena Irak memandang kedua negara ini sebagai pendukung sanksi yang paling gigih. Irak menandatangani persetujuan eksplorasi besar-besaran, terutama, dengan perusahaan-perusahaan Rusia dan Prancis.

Kini, perusahaan-perusahaan AS bukan saja memiliki kesempatan yang setara, akan tetapi mereka akan menjadi pilihan yang utama di setiap proses penawaran. Karena minyak adalah subjek yang sensitif bagi pemerintahan Bush, pilihannya tidak akan terlalu menyolok mata, tidak seperti keputusan mereka ketika memberi kontrak bagi perusahaan-perusahaan AS untuk membangun kembali Irak di masa pascaperang. Sebuah keputusan yang kala itu dipandang sebagai tindakan bagi-bagi hadiah. Pada saat itu, pemerintah AS kurang sekali memberikan kesempatan yang cukup bagi perusahaan negara asing lainnya dalam proses penawaran kontrak, dan sering kali 'hadiah' tadi akan berujung pada perusahaan-perusahaan seperti Halliburton dan Bechtel, yang terkenal punya hubungan rapat dengan jalinan industri-militer dan, terutama, dengan tokoh-tokoh kunci di dua pemerintahan Bush, ayah dan anak.[3)] Apa pun alasannya, dengan terjadinya perang ini setidaknya peluang perusahaan minyak AS telah meningkat drastis.

Ada juga pembicaraan tentang penswastaan kembali sumur-sumur yang telah menghasilkan minyak. Fadhil Chalabi, seorang anggota Kelompok Kerja Urusan Masa Depan Energi dan Minyak Irak—sebuah kelompok bentukan Departemen Luar Negeri AS (dan saudara sepupu Ahmed Chalabi) menyarankan dilakukannya "privatisasi atau privatisasi sebagian" pada perusahaan

minyak nasional Irak. Sebuah sentimen yang digemakan pula oleh para anggota lain dari kelompok tersebut.[4] Sudah barang tentu, jika ini terjadi, akan semakin kecil pula persentase pendapatan Irak dari minyak yang akan tersedia untuk melayani kebutuhan rakyat Irak, karena sebagian besar pendapatan tadi akan dihisap keluar untuk menambah laba perusahaan-perusahaan asing.

Menarik untuk dicatat bahwa kebijakan energi pemerintahan Bush-Cheney, yang diumumkan pada awal tahun 2001, menggariskan pemerintahan untuk tetap menggunakan *World Trade Organization Energy Services Negotiations*, Area Perdagangan Bebas Amerika, perjanjian perdagangan bilateral, dan instrumen serupa lainnya untuk "menyeimbangkan kesempatan bermain bagi perusahaan AS di luar negeri" pada sektor-sektor energi dan melakukan "pengurangan pembatasan perdagangan dan investasi."[5] Tetapi, mengapa pula mereka tiba-tiba 'bermain-main' dengan bom?

DEMOKRASI

Sudah barang tentu, kita mungkin sekali akan bertanya bagaimana AS bisa begitu optimis dengan rencana pembangunan basis-basis militer, proyeksi kekuatan regional, dan peningkatan pengawasan minyak Irak, menimbang fakta bahwa mereka seharusnya menciptakan demokrasi di Irak, yang kemudian bisa saja malah akan membahayakan rencana-rencana tersebut.

Alasannya, tentunya, karena "demokrasi" digunakan sebagai kata sandi. Keinginan AS sebenarnya adalah menciptakan pemerintahan Irak yang tidak akan melen-

ceng jauh dan akan sepenuhnya bergantung pada kemauan dan dikte AS.

Bahkan sebelum Jay Garner, penguasa sementara Irak yang ditunjuk Pentagon, menginjakkan kakinya di sana, sudah sangat umum untuk merujuk dia sebagai konsul Amerika. Adanya fakta bahwa Garner pernah secara terbuka memberi pujian: "kendali diri yang luar biasa" kepada Pasukan Pertahanan Israel, sudah barang tentu memperlihatkan sikap dirinya yang terpisah dari kenyataan yang ada. Ini memperlihatkan pula sikap pemerintahan Bush yang sangat-sangat tidak mempedulikan kepekaan publik Arab.[6)]

Dan jauh lebih penting dari sekadar identitas atau pun sikap dan simpati seorang konsul, adalah satu fakta bahwa pendudukan yang dilakukan oleh militer negara asing bukanlah lahan pembibitan yang baik buat demokrasi atau kemerdekaan. Inilah gambaran keseluruhan yang terjadi, bahkan hingga kini, ketika sikap AS terhadap "demokrasi" telah mewujud. Di dunia pasca-11 September (dan selanjutnya), "demokrasi" punya arti baru, yakni kepatuhan kepada dikte AS. Jadi, pemerintahan negara-negara Eropa Timur yang menentang harapan kebanyakan rakyatnya untuk ikut dalam "persekutuan mereka-mereka yang sudi" dipuji AS atas "keteguhan hati" mereka, sementara Turki yang keputusan final dari pemerintahannya sesungguhnya sesuai dengan opini masyarakatnya, akan mendapat ganjarannya. Demikian pula halnya dengan Prancis, seperti yang dikatakan oleh beberapa pejabat pemerintahan AS.

Penciptaan "demokrasi" di Afghanistan memperlihatkan sesuatu yang akan dialami Irak nantinya. Tetapi,

kasus Irak adalah jauh lebih kompleks lagi. Kepentingan untuk menjaga agar pompa minyak Irak terus bergerak, dan bahkan secara signifikan untuk meningkatkan lagi hasil produksinya, akan memerlukan pemerintahan yang benar-benar punya otoritas di atas seluruh wilayahnya; sementara pengaruh kekuasaan Karzai bahkan tidak mencakup keseluruhan kota Kabul. Hal ini mengharuskan pembentukan pemerintahan yang lebih majemuk. Sudah barang tentu, kebutuhan untuk menenteramkan dan mencari peranan bagi kelas menengah Irak yang terpelajar yang berjumlah besar akan memerlukan lebih banyak perekonomian "pasar bebas" dan mengurangi tingkat kleptokrasi.

Kendati demikian, garis besarnya akan tetap sama. Garis besar itu telah nampak di hari-hari menjelang perang usai. Bahkan tanpa legitimasi palsu dari pertemuan internasional di Bonn, ketika negara-negara yang lain menolak menyetujuii usulan proses yang dirancang AS bagi Afghanistan, militer AS tetap melangsungkan serangkaian pertemuan di Nasiriyah untuk memilih tokoh-tokoh politis Irak yang diharapkan mampu menuntaskan terbentuknya pemerintahan sementara—tanpa keikutsertaan yang berarti dari masyarakat internasional ataupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dewan Tinggi Revolusi Islam Irak, sebuah kelompok yang mewakili sejumlah tertentu penganut Syi'ah Irak, memboikot pertemuan tersebut—walaupun belakangan kelompok tersebut datang juga dalam pertemuan sangat khusus yang terbatas. Kendati demikian, kelompok ini secara konsisten tetap meminta penarikan mundur pasukan AS. Partai Komunis Irak, yang dalam sejarahnya merupakan partai politis pertama di Irak yang punya

basis luas dan mampu memobilisasi rakyat, tidak diikutsertakan dalam rapat pertemuan oleh Amerika, begitu pula beberapa kelompok lainnya.[7)]

Betapapun berbedanya spektrum politis yang mereka anut, dari Adrian Pachachi, seorang mantan Menteri Luar Negeri pemerintah Irak pra-Partai Ba'ath tahun 1968, sampai mereka-mereka dari Partai Komunis, kesemuanya tetap menginginkan campur tangan PBB bagi terselenggaranya sebuah konperensi. Mereka tidak menginginkan pertemuan yang diselenggarakan oleh militer AS. Begitulah yang seharusnya hingga warga Irak dapat benar-benar mendapatkan hak agar mampu memutuskan takdir mereka sendiri.[8)]

Banyak warga Irak, yang senang bisa terbebas dari rezim Saddam Hussein, tidaklah bergembira atas berlangsungnya kehadiran Amerika di sana. Segera setelah perang usai, terjadi demonstrasi besar-besaran dan gelombang protes 20.000 warga Irak di Nasiriyah. Mereka meneriakkan slogan, "Ya untuk Kemerdekaan, Tidak untuk Amerika, Tidak untuk Saddam." Berbagai demonstrasi terjadi juga di banyak tempat di Irak. Pada beberapa peristiwa berbeda, paling tidak 13 orang pengunjuk rasa terbunuh oleh pasukan AS di Mosul, 13 di Baghdad, dan 15 di Fallujah.[9)]

Jika saja Amerika Serikat memang berharap dapat menciptakan proses yang benar-benar demokratis, arahnya pasti akan jelas. Konsultasi dan partisipasi maksimum sangat diperlukan, yang akhirnya akan mengarah pula kepada terselenggaranya sidang untuk memusyawarahkan konstitusi. Begitulah undang-undang dasar Amerika tercipta. Sementara ini, untuk menjaga kestabilan Irak diperlukan pasukan yang tidak memihak—dan pilihan

yang ada, tentunya, hanyalah pasukan penjaga perdamaian multinasional PBB.

Alih-alih demikian yang terjadi, dengan pengaruh fenomenalnya Amerika Serikat memaksakan dan akan terus memaksakan melalui kehadiran militernya dan dengan cara-cara pemakaian uang yang selektif, sehingga tidaklah mengejutkan buat siapa pun juga jika bentuk pemerintahan Irak nantinya akan mengadopsi konsep kepentingan strategis AS dari pemerintahan Bush daripada demi kebutuhan rakyat Irak.

SURIAH DAN IRAN

Bahkan sebelum perang berakhir, Amerika Serikat sudah menunjukkan cara-cara yang akan dipakainya untuk mempertinggi pengaruh regional terhadap musuh-musuhnya yang lain, terutama Iran dan Suriah. Berikutnya, Donald Rumsfeld, Colin Powell, John Bolton, dan sejumlah pejabat pemerintahan lainnya mengeluarkan ancaman tanpa tedeng aling-aling bahwa perang terhadap Irak ini harus dipandang sebagai pelajaran buat negara-negara tersebut; terutama, agar kedua negara tidak akan meneruskan tindakan mereka dalam mendukung teroris. Kelompok "teroris" utama yang disokong Suriah dan Iran adalah Hizbullah, sebuah organisasi yang memainkan peran politis yang sah di Lebanon dan tidak lagi dipandang sebagai organisasi teroris oleh negara-negara lain di dunia. Dalam sejarahnya, organisasi ini hampir secara eksklusif mengkonsentrasikan serangannya terhadap sejumlah militer Israel yang menduduki Lebanon. Mereka tidak mengarahkan sasarannya terhadap warga sipil. Beragam upaya

mereka itulah yang sesungguhnya telah memaksa militer Israel untuk ke luar dari Lebanon.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok neokonservatif di dalam Pemerintahan Bush berkeinginan untuk melakukan "penggantian rezim" di Suriah dan Iran. Dan, mungkin saja di negara-negara yang lainnya di wilayah terebut. Mereka pun tidak segan-segan untuk menggunakan pasukan militer, jika diperlukan, untuk mencapai tujuannya itu. Keberadaan militer AS, meski sedikit jumlahnya, telah membuat perbedaan besar—segera setelah perang berakhir, Amerika Serikat menutup jalur pipa minyak Irak ke Suriah, yang berkapasitas 200.000 barel per hari, sehingga membuat Suriah harus mengekspor minyak ekstra senilai $1.2 milyar setiap tahunnya.[10)] Kehadiran militer AS juga akan memperkuat pengaruh ukuran-ukuran nonmiliter lainnya—Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Daniel Ayalon, mengusulkan penggantian rezim di Suriah dan Iran melalui kombinasi dari cara-cara pengucilan diplomatik, sanksi ekonomi, dan "tekanan psikologis."[11)] Kongres AS juga mulai pertimbangan "*Suriah Accountability Act* (Undang-Undang Permintaan Pertanggungjawaban Suriah)" yang akan memberi presiden sebuah hak yang bisa digunakannya untuk menjatuhkan sanksi terhadap Suriah.[12)]

Sangat sedikit, bahkan di antara para neokonservatif, yang percaya jikalau penggantian rezim di Iran oleh pasukan militer akan mudah tercapai. Tetapi dengan dikuasainya Irak, militer AS kini hampir sepenuhnya mengepung Iran. Pasukan AS telah memiliki basis di Turki, Irak, negara-negara Teluk, Pakistan, Afghanistan, dan Turkmenistan, yakni setiap negara yang berbatasan

dengan Iran kecuali Rusia. Amerika Serikat juga melakukan pengawasan militer yang efektif di Selat Hormuz, yang dilalui oleh sebagian besar minyak Iran sebelum bisa diekspor dan dikirim ke seluruh dunia.

"PETA JALAN" BAGI KONFLIK ISRAEL–PALESTINA

Lebih dari itu, kita harus memperhatikan lebih jauh lagi pengaruh penggunaan kekuatan yang dilakukan AS pada apa yang disebut sebagai "proses perdamaian" di antara Israel dan Palestina.

Perang Teluk yang pertama secara dramatis telah meningkatkan pengaruh AS di wilayah tersebut (dari hasil perang itulah AS bisa membangun pangkalan darat militernya yang permanen) dan secara simultan membuat Palestina kehilangan sekutu-sekutu eksternalnya. Hasilnya adalah apa yang disebut-sebut sebagai "proses Oslo." Dimulai sebagai upaya bersejarah untuk mengusahakan rekonsiliasi antara Israel dan Palestina, pada kenyataannya upaya ini dibuat untuk mengukuhkan pendudukan Israel di Tepi Barat. PLO, yang tidak lagi memiliki tempat berlindung, terpaksa harus bernegosiasi lagi untuk menentukan jadwal pembentukan negara Palestina. Perjuangan hak yang sebenarnya telah dipahami dunia internasional ini harus mereka tukar dengan sebentuk otoritas lokal pada porsi sangat kecil tanah mereka. Sejauh tidak terjadi mobilisasi rakyat Palestina (seperti Intifada), Israel memiliki pengaruh kuat di meja perundingan sementara Palestina nihil. Pada dasarnya, otoritas Palestina yang baru terbentuk bertindak sebagai negara sekutu Israel, menertibkan dan menindas

rakyat Palestina sehingga Israel tanpa kesulitan dapat menggandakan laju pembangunan lokasi pemukiman di sana, membangun serangkaian jalan raya khusus untuk Israel yang memotong tepat di tengah wilayah pendudukan, mendirikan sebanyak mungkin pos-pos pemeriksaan keamanan, dan pada dasarnya membuat begitu banyak "fakta di lapangan" bahwa pendudukan tak akan pernah dapat dihentikan tanpa terjadinya pergolakan di dalam masyarakat Israel.[13)]

Pada tahun 2000, dengan beragam alasan, proses tersebut terhenti. Sejak saat itu, debat di lingkaran penguasa Israel adalah antara pelanjutan kembali apartheid model Oslo atau konsep "transfer." Yakni sebuah ungkapan eufemisme untuk berbagai bentuk pengusiran massal warga Palestina. Transfer, jika itu merupakan sasaran akhirnya, bukanlah dicapai dengan cara mengumpulkan rakyat Palestina dan kemudian mengapalkan mereka ke luar, tetapi dengan proses menyengsarakan kehidupan sehari-hari di Palestina hingga semakin tidak tertanggung lagi. "Pengucilan" yang sering dilakukan terhadap Palestina, pada tahun 2002 telah mengarah pada pengepungan perang terhadap Palestina, sehingga membuahkan angka-angka yang mengerikan—22 persen anak-anak di sana menderita kekurangan gizi yang akut ataupun kronis dan jumlah warga yang diberi jatah ransum makanan oleh *Relief and Works Agency*, sebuah lembaga bantuan PBB, telah meningkat dari 300.000 jiwa hingga menjadi 1,1 juta jiwa.[14)] Secara simultan, wilayah pendudukan dibagi-bagi dalam sejumlah blok yang berukuran sempit, dengan pemeriksaan keamanan yang begitu panjang hingga orang-orang Palestina yang akan bepergian harus menghabiskan setengah hari menunggu di pos-pos

pemeriksaan. Demikian pula, serangkaian invasi, paling banyak tercatat pada pertengahan Maret dan April 2002, ditujukan bagi penghancuran bentuk pemerintahan dan perusakan fisik peralatan untuk mencegah setiap kemungkinan berdirinya negara Palestina.[15)]

"Peta jalan," yang disebarluaskan pada pertengahan April 2003, adalah langkah logis berikutnya. Titik kulminasi dari proses yang sudah dimulai sejak tahun 2002 ini mengincar pada penciptaan kembali sebentuk negara Palestina yang 'bersahabat', yang kali ini akan dipimpin oleh kolega lama Arafat yaitu Abu Mazen. Nantinya, tugasnya adalah menghancurkan perlawanan rakyat Palestina[16)] dan memberi kebebasan bagi Israel untuk meneruskan rencana regionalnya yang lebih besar lagi. Untuk itu dia akan diberi balasan sebuah kursi di meja perundingan yang baru, di mana sekali lagi Palestina tidak akan memiliki pengaruh apa pun. Bahkan sebelum proses itu dimulai, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon secara terbuka menyatakan, "Jika kita bisa mencapai situasi damai yang sejati, damai yang sesungguhnya, damai buat semua keturunan kita, kita akan harus membuat kelonggaran yang menyakitkan. Bukan untuk ditukar dengan janji-janji, tetapi benar-benar ditukar untuk perdamaian." Dengan kata lain, kelonggaran yang nyata tidak akan terjadi sampai Palestina telah benar-benar lumpuh dan sepenuhnya menyerah di setiap kesempatan perlawanan di masa depan.[17)] Tidak ragu lagi, komponen penting dari rancangan baru ini adalah apa yang disebut oleh seorang pejabat pemerintahan AS yang tidak mau disebutkan namanya, yang dikutip *Los Angeles Times*, sebagai "tanpa bicara tetapi punya pengaruh nyata dalam dominasi regional barunya."[18)]

RENCANA UNTUK PBB

Amerika Serikat bukan cuma menggenggam kendali di Timur Tengah, atau terhadap bangsa-bangsa yang dikucilkan seperti Suriah saja. Perang tersebut juga merupakan batu loncatan bagi AS, sehingga ia dapat memaksakan dominasi nyatanya atas Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tekanan yang lebih besar.

Semasa niatnya untuk berperang, Amerika Serikat jelas-jelas memperlihatkan kemuakannya terhadap PBB. Pada tanggal 12 September 2002, ketika Bush berbicara di depan Majelis Umum, pesannya berbunyi, "Perserikatan Bangsa-Bangsa musti melakukan apa yang kami minta atau menerima risikonya menjadi lembaga yang tidak terpandang lagi." Pada akhir tahun 2002 dan awal tahun 2003, PBB tanpa mereka sadari sudah menjadi antek pro-perang, melucuti persenjataan Irak sementara AS maju terus dengan memobilisasi militernya dan membuat rancangan perang. Kemudian, pada tanggal 16 Maret 2003, Bush mengeluarkan ultimatum kembar—satu bagi Irak untuk "melucuti persenjataan" mereka dalam waktu 24 jam, dan yang lainnya untuk PBB agar meloloskan resolusi untuk perang dalam waktu 24 jam pula. Ketika keduanya tidak mengabulkan tuntutan-tuntutan tersebut, perang secara esensial dinyatakan terhadap keduanya.

Segera setelah AS mengumumkan perang tanpa persetujuan PBB, dengan menafikan otoritas unik yang diberikan kepada Dewan Keamanan PBB, Richard Perle, saat itu dalam kapasitasnya sebagai ketua Dewan Kebijakan Pertahanan, menulis artikel opini di koran *Guardian* yang berjudul "Puji Tuhan atas kematian PBB" Di dalam artikel tersebut, dia menyatakan secara sangat blak-blakan bahwa "kegagalan yang hina-dina" dari PBB

telah membuat dunia menjadi anarkis dan Amerika Serikatlah yang pantas bertindak sebagai penjamin ketertiban dunia. Dia merinci peran PBB di masa depan dengan begitu tandasnya: "bagian 'kerja baik' akan tetap berjalan, begitupun birokrasi penjaga perdamaian berisiko kecil masih akan berlangsung, dan para pembual di [Sungai] Hudson akan terus mengembik."[19)]

Dalam minggu berikutnya, Pemerintahan Bush, dengan menggunakan retorika yang sedikit lebih halus, mulai beranjak mewujudkan visi Perle. George Bush, ketika menerangkan "peran vital" yang harus dimainkan PBB, menyatakan, "Itu berarti bahan pangan. Itu berarti obat-obatan. Itu berarti dana bantuan."[20)] Yang ia maksud pastilah bukan sebagai pemegang peranan penting dalam menjalankan otoritas bagi ketertiban dan keamanan Irak di masa pasca-perang.

Tidaklah banyak pembela PBB yang menentang visi di atas, kecuali pada hal-hal kecil. Sekretaris Jendral PBB, Kofi Annan, sebagai contoh, menginginkan agar PBB memainkan peran penting dalam memberikan bantuan dan membangun kembali Irak, bahwa keterlibatan PBB akan "membawa legitimasi" bagi pemerintahan baru Irak yang akan dibentuk.[21)] Jerman, yang tetap setia dalam kubu antiperang Irak, menyarankan agar PBB mungkin sekali bisa memainkan peranan dalam rekonstruksi kendati PBB tidak punya kuasa di sana.[22)] Yang lain menyarankan agar PBB diberi sejumlah otoritas dalam pembentukan pemerintahan sementara Irak.

Tetapi tak ada satu pun dari mereka yang menentang gagasan bahwa masyarakat Irak akan dibangun kembali di bawah pendudukan militer AS. Dengan AS menduduki Irak, tentunya, setiap otoritas yang di atas kertas dimiliki

PBB (yang paling mungkin adalah sebentuk otoritas-bersama PBB dengan pasukan pendudukan) tidak akan berarti di dalam pelaksanaannya, mengingat tujuan AS yang jelas-jelas kita lihat dan pengaruhnya yang kuat atas keberadaannya.

Intinya, apa yang hendak didorong oleh AS dan apa yang secara implisit disetujui oleh para anggota PBB adalah peran PBB sebagai agen maupun bawahan kebijakan AS. Lebih buruk lagi, PBB bertindak sebagai pembenar bagi setiap agresi AS—membantu membersihkan sampahnya, bahkan pada perang yang secara eksplisit tidak direstuinya. Peran serupa ini membuat AS bebas bergerak ke wilayah-wilayah lainnya sembari memperlihatkan proyeksi kekuatannya.

Tindakan mutakhirnya datang ketika AS meminta pencabutan sanksi atas Irak. Selama lebih dari satu dasawarsa, setiap pejabat pemerintahan AS menyatakan bahwa *rezim*-lah, bukan sanksi, yang menyebabkan terjadinya masalah kurang gizi dan pembusukan sosial di Irak. Secara mengherankan, ketika rezim Irak runtuh, AS dengan tiba-tiba mendapatkan bahwa *sanksi*-lah yang menjadi masalahnya, terlepas dari, atau tidak tergantung oleh, rezim yang berkuasa. Perkembangan ini membuat peran jadi berbalik, dengan Prancis dan Rusia, para anggota tetap Dewan Keamanan yang sebelumnya paling menentang penetapan sanksi, kini malah berbalik dan meminta agar sanksi tetap berlangsung. Alasan peralihan ini sangatlah jelas. AS, dalam proses pembentukan pemerintahan Irak yang dia restui, ingin memastikan agar PBB tidak lagi memiliki otoritas atas pendapatan minyak Irak. Dengan demikian, kekuasaan atas minyak Irak akan tetap berada dalam genggaman

AS, langsung ataupun tidak langsung. Utamanya, uang ini nantinya akan secara langsung tersedia untuk membiayai proyek rekonstruksi, dan porsi terbesarnya pastilah akan jatuh pula ke tangan perusahaan-perusahaan Amerika.

Pencabutan sanksi harus ditentang dengan dasar: hanya pemerintahan Irak yang sahlah, dan bukan pemerintahan hasil bentukan militer AS, yang mendapatkan akses langsung atas uang minyak. Ketika Irak menduduki Kuwait, minyak Kuwait termasuk pula dalam embargo, bersama dengan minyak Irak, sehingga baik pemerintahan Irak maupun pemerintahan boneka yang akan dibentuk Irak di Kuwait dapat menjarah kekayaan minyak Kuwait bagi kepentingannya. Pada prinsipnya, invasi AS di Irak merupakan kasus yang sama. Karena negara-negara lain menganggap prinsip tadi—secara politis—mustahil diimplikasikan, maka mereka berpaling pada upaya hukum dengan cara meminta komisi pemeriksaan persenjataan PBB untuk mengumumkan bahwa Irak bebas dari segala bentuk 'senjata pemusnah massal.' Setelah penentangan awal ini, saat buku ini ditulis, Prancis mulai bergerak dengan mengajukan saran rancangan yang lebih kompromistik yang sebagiannya bisa memenuhi kemauan dan tujuan AS tersebut.[23)]

Penggunaan uang minyak Irak untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya maupun atas tujuan untuk merekonstruksi wilayahnya juga jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap kewajiban AS dan Inggris di bawah Perjanjian Jenewa—mereka yang mendeklarasikan agresi terhadap Irak, maka mereka pulalah yang harus bertanggung-jawab dan mengeluarkan biaya pemulihan Irak dari koceknya sendiri.

AS mencapai puncak kecongkakannya terhadap PBB ketika mereka menolak mengizinkan komisi pemeriksaan persenjataan PBB untuk menuntaskan pekerjaannya setelah perang usai. AS malahan mengambil-alih sendiri operasi tersebut.[24)]

KEKAISARAN YANG KORUP

AS telah mencapai zenith baru dominasi politiknya. AS mampu mengambangkan keinginan yang disuarakan oleh perikemanusiaan dari seluruh masyarakat di dunia dan mayoritas bangsa-bangsa. AS bahkan mampu memaksakan kehendaknya agar negara-negara lain mau menerima kontrol yang dilakukannya atas wilayah yang semakin lama semakin meluas. Tidak perlu lagi dalih yang menyatakan bahwa AS bukanlah sebuah kekaisaran, bahkan kalaupun AS enggan menjadi kekaisaran. Buat para pembela orde baru ini, pertanyaan besarnya bukanlah bergantung pada ada atau tidaknya kekaisaran, akan tetapi apakah kekaisaran ini penuh dengan kebajikan ataukah tidak.

Bagi kita, dua hal sudah jelas. Pertama, kekaisaran yang paling bajik pun tidak akan mampu menebus kemerdekaan dan menggantikan kesetaraan dunia internasional. Yang kedua, bahwa kekaisaran tidak akan pernah penuh dengan kebajikan; pertimbangan dari para pendiri kekaisaran tidaklah akan mungkin sejalan dengan keinginan rakyat yang diperintahnya.

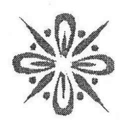
Sebagaimana akan kita temukan, klaim kebajikan dari kekaisaran model ini akan amat lemah.

Bagian I

PERANG TERHADAP TERORISME

Bab I

LAWAN LAINNYA:
Perang terhadap Terorisme



DALAM BUKU SAYA, *The New Crusade: America's War on Terrorism* (Monthly Review Press, 2002) yang rampung pertengahan Januari 2002, saya menulis: "Dunia berubah pada 11 September. Ini bukanlah gembar-gembor media belaka. Sebagaimana beberapa sejarawan merujuk era 1914-1991 sebagai 'ringkasan abad keduapuluh,' mereka sekarang menyebut 11 September 2001 sebagai awal sesungguhnya dari abad keduapuluh satu. Memang masih sangat dini untuk mengetahui apakah penilaian tersebut akan terbukti nantinya, tetapi hal tersebut tidaklah mudah dihilangkan."

Beberapa bulan kemudian, semakin jelas terlihat bahwa 11 September 2001 benar-benat menandai dimulainya sebuah babak baru. Alasannya bukanlah pada skala serangannya, yang memang begitu menyeramkan (angka kematian mencapai 3000 jiwa, satu jumlah korban terbesar yang terbunuh dalam satu aksi kriminal yang dilakukan oleh aktor nonnegara), bahkan bukan pula

pada ancaman yang diungkapkan berulang-ulang oleh jaringan teroris internasional; akan tetapi disebabkan oleh terjadinya pergeseran fundamental berskala dunia yang datang sebagai respons yang diambil oleh pemerintahan AS—dengan apa yang disebut-sebut sebagai "perang terhadap terorisme.

Intinya, buku ini adalah tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan "perang terhadap terorisme," dengan fokus utama pada Irak, karena Irak telah dan masih menjadi pusat penerapan kebijakan ini. Meski begitu, pertama-tama kita musti mendiskusikan apa-apa yang bukan termasuk dalam terminologi "perang melawan terorisme".

"Perang terhadap terorisme" adalah *bukan* perang terhadap terorisme. Sejak awal banyak alasan untuk mempercayai bahwa respons militeristik yang kita saksikan sejak tragedi 11 September tidak akan mampu menanggulangi dan mungkin sekali malah akan—atau telah—memperburuk ancaman. Jika benar keselamatan orang Amerika adalah yang menjadi perhatian utama Pemerintahan Bush, tentu kebijakannya akan sangat berbeda.

Di dalam negeri AS, kelalaian yang terjadi sangat mengejutkan. Karena perhatian perusahaan penerbangan adalah untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya, pintu kokpit yang terbuat dari baja, yang seharusnya bisa menghindarkan terjadinya tragedi 11 September, masih saja belum dipasang di pesawat-pesawat terbang. Lebih dari itu, pemeriksaan dengan sinar-X terhadap tas dan bagasi tertentu di bandar-bandar udara tidak tersedia secara luas sampai selama setahun penuh sesudahnya. Biarpun ramai-ramai orang bicara tentang "keamanan di

tanah-air," sangat sedikit tindakan yang diambil untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan jikalau terjadi keadaan genting di dalam negeri.

Penindasan di tingkat domestik dan menargetkan komunitas Muslim sebagai sasaran, selain melanggar hak-hak asasi, juga merupakan tindakan yang kontraproduktif. Departemen Kehakiman telah menjaring sebanyak 1.200 orang, kebanyakannya cuma karena pelanggaran kecil visa, menahan beberapa dari mereka selama berbulan-bulan tanpa dakwaan apa pun. Hal ini telah membuahkan satu dakwaan balik pada tuntutan yang berhubungan dengan terorisme. Beberapa orang yang ditahan tersebut adalah berasal dari mereka-mereka yang sukarela datang menawarkan bukti ke FBI. Penahanan terhadap mereka ini adalah sebuah aksi yang hampir dapat dipastikan berdampak yang menakutkan, sehingga menutup tingkat keberhasilan dari setiap upaya dari komunitas yang jadi sasaran (kebanyakan dari mereka adalah keturunan Arab dan Asia Selatan) yang tadinya sungguh-sungguh ingin membantu penyelidikan.

Akan tetapi, kebijakan luar negeri dari Bush-lah yang paling banyak merusak setiap tindakan dalam menghadapi terorisme gaya-Al-Qaeda. Perang terhadap Afghanistan, yang dinilai semata-mata sebagai latihan antiteroris, adalah kegagalan yang paling buruk. Pertama, jika anda mencoba untuk menangkap perorangan, ekstradisi adalah cara yang memiliki kemungkinan sukses yang lebih besar dibanding perang. Menjatuhkan bom seberat 2.000 pon bukanlah cara yang cerdas untuk mencari dan menemukan para penjahat. Cara ini bisa saja melenyapkan beberapa dari mereka, tetapi bukan saja hanya akan membuat banyak rakyat yang tidak

bersalah ikut terbunuh, kebingungan yang ditimbulkannya dan ratusan ribu pengungsi baru yang terjadi karena pengeboman akan membuat rombongan-rombongan kecil yang terorganisir dengan baik untuk dapat mengendap-endap keluar. Dan, sesungguhnya, perang tidak akan menimbulkan kekuatiran bagi Osama bin Laden ataupun setiap pemimpin tingkat-tinggi Al-Qaeda yang lainnya, walaupun Mohammed Atef, salah-satu pemimpin militernya terbunuh. Sesungguhnya, beberapa anggota Al-Qaeda yang paling berpengaruh, seperti Abu Zubaydah dan Khalid Shaikh Mohammed, tertangkap tangan hanya karena razia rutin operasi polisi yang sama sekali tidak dramatis.

Kendati banyak orang Amerika bertindak membabi-buta dalam keinginannya untuk membalas korban tragedi 11 September sehingga tidak lagi memakai akal sehatnya, para perencana pemerintahan hendaknya mengerti betul bahwa kans dalam menangkap orang yang dicari adalah lebih besar melalui cara ekstradisi dibandingkan dengan memeranginya.

Patokan dan asumsi umum cenderung memandang Taliban sebagai organisasi dengan pendirian yang begitu kuat, sehingga membuat ekstradisi tampaknya menjadi kemustahilan. Padahal, tidak demikian halnya. Sesaat sebelum pengeboman Afghanistan dimulai, Taliban menawarkan penyerahan bin Laden di negara ketiga yang netral. Ini dilakukan bahkan tanpa harus terlebih dahulu mendengar bukti-bukti yang memberatkannya—bahkan membolehkan dia untuk diadili di bawah Hukum Islam di Amerika Serikat.[25)] Seminggu setelah pengeboman dimulai, ketika penawaran tersebut diulangi, tanggapan Bush adalah: "Tidak perlu bernegosiasi. Tidak

ada perundingan. Saya telah perintahkan apa yang harus mereka lakukan. Dan tidak perlu pula kita diskusikan soal benar atau salahnya. Kami tahu dia bersalah."

Tuntutan yang tak dapat berubah ini memaksa Taliban untuk kembali pada tawaran awalnya. Akan tetapi, bahkan setelah Pemerintahan Bush berulang-kali menolak untuk menunjukkan bukti-bukti (prosedur normalnya adalah dengan pengajuan bukti ketika sebuah lembaga mengajukan permohonan ekstradisi), Taliban masih siap untuk berunding. Sesungguhnya, sesaat sebelum serangan dimulai, sebuah persetujuan rahasia untuk menyerahkan bin Laden telah disetujui.[26)] Serombongan delegasi yang dipimpin Qazi Hussain Ahmad, kepala fundamentalis Jamaah-Al-Islami di Pakistan, telah bersepakat dengan Mullah Omar, ketika itu kepala pemerintahan Afghanistan, bahwa bin Laden akan dibawa ke Pakistan, dan di sana, di bawah kerangka Hukum Islam, bukti atas keterlibatannya akan diajukan ke depan pengadilan internasional. Pengadilan tersebut akan memutuskan apakah mereka akan mengadilinya langsung ataukah menyerahkannya kepada Amerika Serikat. Sungguhpun proposal tersebut tentunya sudah atas persetujuan bin Laden, usulan ini ditolak oleh Presiden Pakistan, Pervez Musharraf, dengan alasan yang ganjil bahwasanya dia tidak akan mampu menjamin keselamatan bin Laden—sebuah keprihatinan yang aneh mengingat seringnya ia mendapat telpon dari pejabat pemerintahan AS untuk membunuh bin Laden daripada untuk menangkapnya. Agaknya, jika Amerika Serikat benar-benar menginginkan bin Laden untuk diekstradisi, mereka tidak akan memperkenankan Musharraf untuk menjadi penghalang.

Kesimpulan utamanya adalah jelas: Amerika Serikat telah mengambil tindakan tertentu yang memberi bin Laden dan rombongannya kesempatan yang lebih tinggi untuk melarikan diri, karena ekstradisi akan berarti tidak tersedianya *casus belli* (sebab-sebab perang), dan agaknya perang adalah jauh lebih penting bagi Amerika Serikat daripada sekadar keprihatinannya belaka.

Penanganan ekstradisi bin Laden adalah tipikal kebijakan AS. Hal ini bukanlah sesuatu yang ganjil dalam Pemerintahan Bush. Sesungguhnya, selama dekade 1990-an, ketika melalui beragam konferensi dan kertas kerja mengenai posisi militer ancaman terorisme yang menakutkan itu dimunculkan, kebijakan aktualnya secara bersungguh-sungguh tidak memperhitungkan faktor keselamatan warga Amerika.

Pada tanggal 7 Agustus 1998, dua kedutaan-kedutaan besar AS, di Kenya dan Tanzania, dibom. Peristiwa ini menimbulkan korban sebanyak 250 jiwa (termasuk 12 orang Amerika). Inilah insiden yang mengangkat kasus Al-Qaeda ke tingkat dunia, sebagian disebabkan oleh karena tindakan AS yang memasang foto wajah bin Laden dalam poster orang yang dicari yang ditempelkan di seluruh wilayah. Dua minggu setelah serangan, Bill Clinton memerintahkan pengeboman pabrik farmasi El Shifa di Sudan dan beberapa "barak pelatihan teroris" di Afghanistan (yang lokasinya diketahui betul karena pada dasarnya mereka adalah kelompok bentukan CIA) sebagai tindakan pembalasan.

Menurut sebuah laporan dari MSNBC.com, "Sehari setelah serangan 7 Agustus 1998, dua dari para tersangka pelaku pengeboman telah tertangkap di Sudan. Mereka kemudian menawarkan untuk menyerahkan kedua orang

ini ke FBI, demikian menurut pernyataan dari dua orang pejabat senior penyelenggara hukum AS dan sumber-sumber diplomatik."[27] Departemen Luar Negeri mencegah FBI untuk menindaklanjuti petunjuk ini. Menurut seorang pejabat senior FBI, "Dasar pemikirannya lemah dan hal itu, dalam pandangan saya, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Departemen Luar Negeri bahkan tidak mau membiarkan kami mendiskusikan masalahnya dengan para pejabat Sudan."

Penolakan ini tidak memiliki alasan yang meyakinkan. Sudah barang tentu, jika saja pemerintahan Clinton menerima tawaran kerjasama dari pemerintahan Sudan ini, akan sangat sulit untuk membom pabrik El Shifa. Logika awal yang menjadi alasan bagi pengeboman pabrik tersebut adalah karena pabrik ini dimiliki secara tidak langsung oleh bin Laden dan pabrik ini telah memproduksi satu senyawa awal yang bisa dipakai dalam pembuatan gas syaraf VX, kedua alasan yang belakangan terbukti keliru. Sudah barang tentu, Amerika Serikat tidak punya hak sama sekali untuk membom setiap tempat yang dicurigai memproduksi senjata kimia. Kalaupun demikian halnya—jika AS punya kecurigaan serupa itu—bisa saja AS meminta diadakannya pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.

Satu orang terbunuh langsung dalam pengeboman tersebut tetapi total jumlah korban yang mati karenanya (dan karena AS tetap keras kepala untuk menolak setiap bentuk bantuan kemanusiaan) adalah sangat tinggi, dalam ribuan atau puluhan ribu, karena El Shifa menghasilkan sekitar 60 persen[28] obat-obatan farmasi yang dimanfaatkan untuk menanggulangi wabah penyakit yang paling

banyak menimbulkan korban di Sudan, termasuk di antaranya malaria, TBC, dan kolera.

Sekali lagi, adalah sulit untuk keluar dari kesimpulan bahwa pengeboman Pabrik El Shifa lebih penting bagi pemerintahan Clinton daripada mengurangi ancaman teroris serangan terhadap warga sipil Amerika.

Bahkan lebih buruk lagi, dari tahun 1995 sampai beberapa minggu sebelum serangan 11 September, Pemerintahan Clinton dan Bush berulang-kali menolak tawaran Sudan untuk menyediakan bertumpuk-tumpuk berkas tentang bin Laden. Penolakan ini disebut sebagai "tindakan yang lebih buruk daripada kejahatan" oleh Tim Carney, duta besar AS untuk Sudan saat itu yang mengakhiri jabatannya pada tahun 1997. Jika saja tawaran informasi dari pemerintahan Sudan tadi diterima baik oleh AS, maka kemungkinan terlaksananya serangan terhadap dua kedutaan besar AS pada tahun 1998 bisa secara dramatis berkurang. Dan mungkin saja akan jauh mengurangi keberhasilan serangan 11 September. Menurut suratkabar *Observer* yang berbasis di London, sumber CIA mengeluh atas penolakan tawaran informasi tersebut. Dia menyatakan, "Hal ini merupakan sebuah bentuk terburuk dari kegagalan intelejen dari seluruh urusan yang menyedihkan ini... Adalah masuk akal untuk menyatakan bahwa jika saja kita bisa memperoleh data tersebut pada saat itu boleh jadi kita mampu dan punya kans yang lebih baik dalam mengantisipasi dan mencegah serangan tersebut."

Bukan saja perang di Afghanistan dipandang sebagai cara yang buruk untuk menangkap para anggota tingkat-tinggi Al-Qaeda, perang itu sendiri sesungguhnya secara dramatis telah memperburuk ancaman dari Al-Qaeda dan

kelompok-kelompok Islam lainnya. Pihak oposisi penentang perang pada awalnya punya argumen bahwa pengeboman malah akan meningkatkan ancaman terorisme. Pada waktu itu, sangat sedikit yang setuju dengan pendapat tersebut. Bahkan, beberapa orang intelektual yang progresif memandang gerakan antiperang sebagai kebodohan terpendam dalam penentangan perang. Kendati demikian, hanya dalam waktu sembilan bulan saja setelah perang bermula, sejumlah analis di FBI dan CIA malah setuju dengan pendapat mereka yang turut dalam gerakan antiperang—sementara beberapa intelektual tadi masih saja menolaknya. Menurut *New York Times*, Juni 2002, "Penyelidikan rahasia ancaman Al-Qaeda yang kini sedang berlangsung di FBI dan CIA telah menyimpulkan bahwa perang di Afghanistan telah gagal dalam mengurangi ancaman terhadap Amerika Serikat... Alih-alih, perang mungkin sekali malah menambah keruwetan pada beragam upaya kontraterorisme karena serangan potensial tadi akan makin menyebar di sepanjang area geografis yang lebih meluas."[29)]

Para pelaksana Al-Qaeda tingkat-menengah memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat hubungannya dengan kelompok-kelompok Islam lainnya di wilayah itu. Perang membuat mereka mampu menarik kelompok-kelompok ini, dan karenanya memusatkan diri dan perhatian mereka pada masalah-masalah di dalam wilayahnya sendiri. Kelompok-kelompok ini pun bersatu-padu sehingga terbentuklah sebuah jaringan teroris dunia yang sama-sama punya kepentingan dalam menentang hegemoni Amerika Serikat. Secara dramatis hal ini telah meningkatkan jumlah kantong-kantong

teroris yang akan mudah dioperasikan di masa depan. Menurut seorang pejabat, "Al-Qaeda pada intinya sebenarnya adalah sebuah kelompok yang kecil, sungguhpun ribuan orang lalu-lalang di kamp-kamp mereka. Apa yang kita saksikan sekarang ini adalah satu bentuk jihad radikal berskala internasional yang akan memiliki potensi kekuatan dalam beberapa tahun mendatang."

Pengeboman klab malam di Bali pada 12 Oktober 2002, yang mengambil korban meninggal sebanyak 192 orang (hampir seluruhnya orang Barat, dengan orang-orang Australia sebagai kelompok korban terbesar), membawa keganjilan pendekatan penanganan "perang terhadap terorisme" serupa ini menjadi contoh yang paling buruk.

Sejumlah analis kebijakan militer telah lama memahami bahwa dominasi militer AS-lah yang telah membuat musuh-musuh atau lawan potensial kebijakan AS mengambil strategi "perang yang asimetris." Dengan perang serupa ini, teknologi dan materi milik AS yang bisa dinetralkan kehebatannya. Ini terlihat pada peristiwa serangan 11 September. Pemerintahan mengakui adanya fakta ini sejak dekade '90-an, sebagai contoh kutipan pada *Presidential Decision Directive 62* (Petunjuk Pelaksanaan Presiden nomor 62) menyatakan: "Keunggul-an militer Amerika yang tak tertandingi telah membuat musuh potensial (apakah bangsa-bangsa ataukah kelompok-kelompok teroris) yang akan melawan kita dengan mengarahkan serangannya dalam beragam bentuk terorisme daripada memilih serangan militer yang konvensional."[30)]

Jelaslah, langkah-langkah yang dilakukan semenjak tragedi 11 September dalam meningkatkan lagi keunggulan militer dan menggunakannya lebih keras lagi bukanlah pendekatan yang baik dalam menangani musuh potensial AS. Hal tersebut justru akan secara dramatis memperburuk ancaman terorisme.

Serangan di Bali pasti adalah buah dari perang Afghanistan—seorang tersangka yang berada dalam tahanan mengakui bahwa yang mereka tuju adalah orang-orang Amerika, bukan Australia.[31)]

Hal tersebut juga memberikan gambaran kepada kita perubahan mendasar dari taktik-taktik terorisme. Berkebalikan dengan gambaran umum Al-Qaeda yang disebut-sebut melanglang begitu saja dan membunuh-bunuhi setiap orang Amerika pada setiap kesempatan yang mereka dapatkan, organisasi ini sesungguhnya tidak pernah menyerang sasaran-sasaran yang mudah sebelumnya. Daftar serangan Al-Qaeda selama itu adalah terhadap dua kedutaan besar AS, *USS Cole*, WTC dan Pentagon—memperlihatkan pola penyerangan terhadap sasaran keras yang mewakili simbol-simbol kekuatan AS, yang melibatkan persiapan yang sulit dan memerlukan pelaku yang siap mati dalam serangan bunuh diri. Sementara, klab malam di Bali adalah sebuah contoh sasaran lunak yang tidak memiliki nilai atau simbol serupa di atas. Para tersangka dalam berkas perkaranya menyatakan bahwa para anggota senior Al-Qaeda, dalam pertemuan di Thailand pada bulan Januari 2002, "memutuskan untuk beralih dari sasaran kedutaan-kedutaan besar, yang kini telah dijaga lebih ketat, ke arah apa yang disebut sebagai sasaran lunak seperti hotel-hotel atau penginapan dan sekolah-sekolah."[32)] Jadi,

perang terhadap terorisme telah mencapai *reductio ad absurdum*—semakin unggul militer AS semakin banyak pula serangan teroris terhadapnya; semakin banyak sasaran keras dijaga semakin banyak pula serangan ditujukan kepada sasaran lunak. Akan semakin sulit pula, bahkan mustahil, untuk menjaga semua sasaran lunak tersebut.

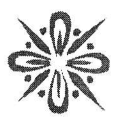
Melihat tindakan AS yang menolak mempertimbangkan informasi yang potensial tentang bin Laden dan Al-Qaeda ini, dan penggunaan tindakan kekerasan (perang) yang malah meningkatkan ancaman serangan teroris, adalah sulit untuk tidak berkesimpulan bahwa perlawanan terhadap terorisme, istimewanya terhadap terorisme dari kelompok-kelompok Islam radikal, bukanlah prioritas bagi pemerintahan AS, bahkan setelah tragedi 11 September terjadi.

Orang dapat menyimpulkan bahwa "perang terhadap terorisme" bukanlah melulu perlawanan terhadap terorisme dibandingkan dengan konotasi "perang terhadap narkoba" sebagai perang melawan penggunaan narkoba. Semua penelitian yang serius sampai pada kesimpulan yang sama yaitu, untuk setiap dolar yang dikeluarkan, sejauh ini tindakan terbaik untuk menanggulangi "perang terhadap narkoba" adalah dengan jalan menyediakan sarana pengobatan bagi ketergantungannya. Kendati demikian, sampai saat ini Amerika Serikat belum menyediakan sarana tadi dalam tingkat yang mencukupi buat semua yang memerlukannya. Motivasi utama perang terhadap narkoba adalah militerisasi di tingkat domestik dan pengawasan secara permanen dari mereka-mereka yang dipandang sebagai strata sosial terbawah yang punya warna kulit tertentu. Ini dilakukan

sembari memperluas lagi pengaruh militer AS di seluruh Amerika Selatan, dengan Kolombia sebagai panggung utama pertunjukannya. Dalam setiap kasusnya, pemerintah AS memang tidak menginginkan kejahatan terorisme dan narkoba seperti ini berkembang-biak, hanya saja kedua kata kunci tadi bisa dimanfaatkannya sebagai justifikasi retorik bagi "pemecahan masalah" ala militer.

Bab 2

IMPERIALISME BARU?
Memahami Strategi Keamanan Nasional Pemerintahan Bush



JADI JIKA PERANG terhadap terorisme bukanlah perang terhadap terorisme, apa sesungguhnya perang melawan terorisme itu? Ia bisa langsung dimengerti sebagai Perang Dingin yang baru, dengan terorisme menggantikan komunisme sebagai ancaman yang berada di mana-mana yang harus kita lawan.

Dimulai sesaat setelah tragedi 11 September, para pejabat Pemerintahan Bush mulai menyebarkan informasi kepada masyarakat umum bahwa era baru telah dimulai, dan bahwa negara akan menghadapi perang dalam waktu dekat. Wakil Presiden Dick Cheney, mengumumkan pencabutan batas 25 tahun eksekusi dalam kasus Osama bin Laden, dia berkomentar bahwa perang terhadap terorisme adalah "berbeda bila dibandingkan kasus Perang Teluk sebelumnya, dan pada dasarnya perang terhadap terorisme ini tidak akan pernah selesai. Minimal, tidak pada masa kehidupan kita."[33)]

Sesuai dengan aturan tak tertulis bahwa setiap presiden bisa punya doktrin jika dia menginginkan, Bush mengeluarkan Doktrin Bush: "Anda ikut dengan kami, atau anda berpihak kepada teroris. Sejak hari ini sampai di kemudian hari, setiap bangsa yang masih tetap menaungi atau menyokong terorisme akan dipandang oleh Amerika Serikat sebagai rezim musuh."[34)] Ini adalah nyata-nyata turunan dari Doktrin Truman yang terkenal, yang intinya menyatakan Amerika Serikat punya hak untuk intervensi, dan memaksakan kepentingan dalam intervensinya, di setiap negara tempat komunis berkembang (dalam pelaksanaannya, di setiap negara yang diklaim terdapat ancaman bagi Amerika Serikat karena pengaruh politis faham komunismenya—hal yang sering kali dituding AS terhadap negara-negara dengan kebijakan yang memiliki sedikit potensi ke arah kebijakan yang lebih independen).

Pidato Kenegaraan tahun 2002 menggariskan kerangka besar pemikiran tentang Perang Dingin yang baru ini, mewujudkan visi yang sama bagaikan perang antara terang dan gelap, peradaban melawan barbarisme yang mengisi relung-relung NSC-68 yang disusun Paul Nitze, yang kadangkala dipandang sebagai dokumen fundamental dalam menghadapi Perang Dingin. Amerika Serikat, bersama "dunia yang beradab" lainnya ada pada kedudukan moral yang lebih tinggi, yang dipertentangkan dengan "poros setan," yang meliputi Iran, Irak, Korea Utara, dan "sekutu teroris" lainnya. Panggilan perang suci ini disabdakan dengan terminologi universal—"aturan hukum, pembatasan wewenang negara, menghormati hak-hak perempuan, hak milik seseorang, kebebasan menyuarakan pendapat, keadilan

dan kesetaraan, dan toleransi beragama"—kendati keagungan budaya tidaklah terlalu ditekankan.

Pidato tadi lebih jauh mengingatkan kita akan kesamaannya dengan konsep intervensi-di-mana-perlu yang bisa kita baca di dalam Doktrin Truman: "Beberapa negara mungkin takut menghadapi wajah terorisme. Tapi jangan keliru: Jika mereka tidak bertindak, maka Amerika yang akan bertindak." Perang terhadap terorisme, seperti juga perang melawan komunisme, adalah sistem doktrinasi yang bisa diterapkan pada setiap perkembangan di mana pun yang dianggap sebagai ancaman potensial bagi keamanan nasional kita. Berikutnya menyusul pedoman Perang Dingin lainnya, yang terungkap pula dalam pidato tersebut selanjutnya—kebutuhan anggaran militer yang tetap tinggi agar kita dapat "mempertahankan" diri.

Pidato tersebut juga menyinggung tentang keberadaan musuh di dalam negeri—"dan bersama dengan upaya pemerintah untuk mempertahankan tanah-air kita secara lebih baik lagi, Amerika tetap mengharapkan peran serta dan kesiagaan para warganegaranya." Cara mengadukan tetangga anda sebagai teroris telah menggantikan istilah 'cara melaporkan tetangga anda adalah komunis.'

Sering kali kita bahas bahwa "pencarian musuh" adalah bagian yang diperlukan dari kebijakan luar negeri AS. Ada kebutuhan untuk memberi alasan terhadap taraf anggaran militer yang begitu gila-gilaan kendati Amerika Serikat sudah memiliki kekuatan militer yang tidak tertandingi oleh siapa pun saat ini. Demikian pula, untuk menjaga agar dominasi AS di dunia tetap terpelihara kadang perlukan beberapa negara yang tampaknya

kerasa kepada yang—untuk itu—harus segera ditundukkan. Kendati ada contoh di mana saja musuh-musuh akan bergerak, dalam beberapa kasus yang akan kita bahas nanti, kita telah mengetahui siapa musuh tersebut sebenarnya—negara-negara dengan sumberdaya penting yang strategis dan beberapa lainnya yang punya potensi untuk menggunakan kebijakan yang independen.

Banyak "musuh-musuh" yang telah dicobakan sejak keruntuhan Uni Soviet—'negara jahat,' negara tempat perdagangan narkotika—tetapi terorisme global gaya-Al-Qaeda jauh lebih cocok sebagai alasan untuk justifikasi besarnya anggaran militer. Melawan terorisme, seperti melawan komunisme sebelumnya, menjadi pembenaran yang sempurna untuk tindakan intervensi di negara-negara mana pun yang dikehendaki Amerika Serikat.

STRATEGI KEAMANAN NASIONAL DAN PROYEK ABAD AMERIKA BARU

Kita bisa cermati lebih detil struktur dari kebijakan luar negeri yang baru ini dengan meneliti dua dokumen yang punya hubungan erat, *National Security Strategy* (NSS = Strategi Keamanan Nasional)[35] yang baru saja disebarluaskan oleh Pemerintahan Bush (September 2002) dan "*Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century*" (RAD = Pembangunan Pertahanan Amerika: Strategi, Kekuatan dan Sumber-sumberdaya untuk Abad Baru), yang diterbitkan oleh *Project for the New American Century* (PNAC = Proyek untuk Abad Amerika Baru) medio September 2000.[36)]

Kedua dokumen ini bisa dirunut sampai ke akarnya yakni "*Defense Planning Guidance*" (Garis Besar Perencanaan Pertahanan) yang ditulis tahun 1992 oleh Wakil Menteri Pertahanan AS Paul Wolfowitz, yang waktu itu adalah orang nomor 3 di Departemen Pertahanan, dan I. Lewis Libby, kini kepala staf Wakil Presiden Cheney. Visi dalam dokumen tadi begitu mengejutkan karena secara polos mengungkapkan visi dominasi militer unilateral yang dikehendaki Amerika Serikat. Dokumen ini pun bahkan ditulis tanpa basa-basi, misalnya tanpa menyebutkan bahwa Amerika Serikat hanyalah sebagai *primus inter pares* (yang pertama di antara yang setara), sebagai penghormatan buat sekutu-sekutunya. Hal ini membuat pemerintahan terpaksa harus mengingkarinya dan menyusunnya kembali dengan tata bahasa yang lebih halus dan dengan memasukkan rasa yang lebih multilateral sebelum menerbitkannya. Tetapi kini, retorika aslinya yang lebih blak-blakan itu malah digunakan lebih banyak lagi.

Nama "Proyek untuk Abad Amerika Baru" mengingatkan kita kembali pada tahun 1941, ketika Henry Luce memproklamasikan abad keduapuluh sebagai "Abad Amerika." Kelompok tersebut adalah para pemikir partikelir yang berurusan dengan, seperti tercermin oleh namanya, menjaga dan memperluas hegemoni AS di dunia. Kelompok ini bukan melulu beranggotakan para analis biasa, di dalam dewannya bergabung juga para bintang neokonservatif seperti William Kristol dan Robert Kagan, begitu pula John Bolton, yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Menteri Luar Negeri urusan pengawasan persenjataan. Mereka siap menerima input dari, *inter alia*, Wolfowitz, Libby,

Dov Zakheim (sekarang adalah pejabat kepala bidang keuangan di Departemen Pertahanan), dan Eliot Cohen, serta Devon Cros, yang bertugas sebagai penasehat dalam lembaga Dewan Kebijakan Pertahanan yang waktu itu diketuai oleh Richard Perle.

"*Rebuilding America's Defenses*" muncul ke permukaan dan dikenal publik pada 15 September 2002, dalam sebuah artikel di *Scotland Sunday Herald*.[37] Artikel tersebut secara menyeramkan memproklamasikan dokumen tadi sebagai "cetakbiru yang sangat rahasia perihal rencana dominasi global AS" dari pemerintahan Bush. Kendati klaim tadi tidak sepenuhnya benar, dokumen ini punya hubungan erat dengan rencana kebijakan dan keputusan yang akan dilaksanakan AS pasca-11 September, dan membantu mengisi kekurangan dari bolong-bolong NSS yang kurang sempurna, yang kalau dibaca akan mirip dengan sekumpulan pers rilis.

NSS berawal dengan penegasannya pada adanya tantangan baru bagi "keamanan nasional": "Musuh-musuh di masa lalu membutuhkan ketentaraan yang kuat dan kemampuan industrial yang besar untuk dapat membahayakan Amerika. Tetapi kini, jaringan orang-perorang di belakang layar bisa mengakibatkan kerusuhan besar dan mampu merusak tanah air kita hanya dengan biaya yang lebih murah daripada sekadar harga pembelian satu tank." Dokumen ini menyatakan dengan tegas permasalahan peperangan yang asimetris: "Teroris kini telah terorganisasi... dan mampu membalikkan kekuatan teknologi modern untuk melawan kami."[38] Setelah ini, semua bergegas untuk mencari dan menemukan apa pun cara untuk menanggulangi ancaman terorisme gaya-Al-Qaeda di dalam dokumen tersebut.

Alih-alih, kita malah memberi Amerika Serikat lebih banyak lagi alasan untuk memecahkan keseluruhan masalahnya dengan metode yang memang dikehendakinya—dengan cara-cara memperluas lagi dominasi militer serta menggunakan pendekatan yang lebih agresif terhadap negara-negara yang merintangi "kepentingan AS." Dokumen ini menyerukan dengan tandas penguatan azas hegemoni global AS dengan sepenuhnya bergantung pada dominasi militer Amerika. Bukan cuma terhadap musuh-musuhnya saja tetapi bagi para sekutunya pula: "militer kami harus... memenangkan kompetisi militer masa depan."[39]

Hal inilah yang sangat berkait erat dengan "*Rebuilding America's Defenses*" (RAD), yang secara esensial merupakan cetakbiru bagi pembangunan militer Amerika yang baru serta kebijakan luar negeri yang memiliki struktur dengan memanfaatkan "momentum unipolar," di era pasca-Perang Dingin. Ini ditujukan untuk memberi peringatan bagi mereka-mereka (termasuk di antaranya, menurut dokumen tersebut, Bill Clinton dan para penasehatnya) yang memandang berakhirnya Perang Dingin sebagai satu kesempatan buat "jeda strategis" hingga Amerika Serikat bisa beristirahat di atas singgasananya (dan di atas keunggulan militernya yang berlimpah). Alih-alih, runtuhnya militer pihak oposisi yang punya potensi berarti terhadap kekuatan AS, dalam pikiran para neokonservatif, merupakan alasan untuk meningkatkan anggaran belanja militer dan transformasi dramatis baik teknologi kemiliterannya maupun peran militernya: "Melestarikan situasi strategis yang diinginkan sehingga Amerika Serikat saat ini harus memiliki kemampuan militer yang secara global mampu mencegah

serangan lawan sebelum itu terjadi, baik di masa sekarang ini maupun di masa depan."[40]

Selama Perang Dingin, terutama pada dekade '60-an dan '80-an, adalah cara biasa untuk membenarkan program persenjataan yang baru dengan mengatakan bahwa Uni Soviet sudah lebih maju daripada Amerika Serikat, contohnya adalah timbulnya istilah-istilah seperti, "kesenjangan peluru kendali." Klaim seperti itu terdengar absurd, dan hal itu dipahami benar oleh para perencana militer AS, tetapi mereka sengaja melestarikan idiom 'pertahanan terhadap ancaman Soviet' tadi agar kebijakan militer AS tetap memiliki kartu trufnya. Dengan Strategi Keamanan Nasional yang baru, cocoklah usulan perencanaan tadi, yang walaupun kita akui bahwa tidak ada yang punya kemampuan setaraf AS dari segi kemiliteran, kita tetap akan mempercepat pembangunan militer kita lebih jauh lagi agar tidak satu pihak pun dapat menandingi kita dari segi kemiliteran dan menyaingi hegemoni kita.

Para penulis RAD memberi catatan bahwa keseluruhan transformasi dan peran militer yang revolusioner ini kelihatannya tidak mungkin diaplikasikan pada iklim politis tahun 2000, karena "ketiadaan peristiwa-peristiwa atau bencana besar yang bisa menjadi katalisnya—katakanlah semacam Pearl Harbor yang baru."[41] Pada saat itu, para penulisnya begitu ingin supaya peristiwa-peristiwa besar serupa di atas bisa terjadi. Akhirnya, dalam tahun itu juga mereka mendapatkan 'Pearl Harbor'-nya dan sekaligus kesempatan untuk mewujudkan fantasi kekaisaran tadi menjadi kenyataan. Para ahli teori konspirasi pastilah kegirangan saat itu. Tetapi kejadian ini, seperti juga beberapa peristiwa lain dalam sejarah

kebijakan luar negeri AS, adalah sebuah contoh sederhana dari aksioma Pasteur yang terkenal itu, "Keberuntungan akan memihak mereka yang siap dengan fikirannya."

Di dalam visi militer yang tegas-tegas diarahkan untuk mendominasi dunia, Cina tak pelak lagi merupakan negara bukan sekutu AS yang punya potensi militer yang semakin lama semakin kuat. Sesungguhnya, menurut dokumen RAD tersebut, Cina merupakan tantangan strategis yang utama bagi Amerika dalam waktu dekat. Ini selaras dengan analisis Zbigniew Brzezinski dalam bukunya *The Grand Chessboard* bahwa reunifikasi Korea akan menjadi problem bagi kepentingan strategis AS karena Amerika Serikat memerlukan alasan untuk tetap menempatkan pasukannya di wilayah tersebut untuk menekan Cina dan menjaga agar Jepang tetap masuk dalam lingkaran pengaruhnya, RAD secara tegas menyatakan: kendati "merupakan kebijaksaan konvensional untuk menempatkan garnisun berkekuatan 37.000 personil di Korea Selatan hanya untuk menjaganya dari serangan pihak Utara," dan "penyatuan kedua Korea mungkin sekali akan menyebabkan pengurangan keberadaan pasukan AS di semenanjung tersebut dan akan mengubah tampilan kekuatan AS di Korea," apa yang diperlukan adalah "sebuah *perubahan* misi... bukan *penghentian* misi mereka.[42]

IMPERIALISME BARU

Dari dua dokumen ini, orang dapat langsung melihat prinsip-prinsip utama visi neokonservatif:

> Transformasi militer, yakni, anggaran belanja yang sangat besar untuk lebih meningkatkan lagi taraf teknologi militernya sehingga superioritas Amerika yang memang sudah tidak diragukan lagi akan semakin meningkat.

> Basis militer, yakni, menjaga keberlangsungan ekspansi kehadiran militer Amerika secara lebih luas lagi sampai ke seluruh penjuru dunia, dengan cakupan yang lebih luas daripada yang telah dicapainya saat ini (yang sesungguhnya telah mencakup skala global dan telah tersebar di manapun)—"Amerika Serikat harus mencari dan menetapkan jaringan 'pangkalan militer' atau 'basis operasi di pos-pos terdepan' untuk meningkatkan daya jangkau pasukannya, baik yang telah ada saat ini maupun yang akan ditempatkan di pos-pos barunya di masa depan." Merekalah yang merupakan elemen utama hegemoni politik AS atas negara-negara tempat pangkalan militernya berada ataupun atas negara-negara yang diancamnya.

> "Penggantian rezim," yakni, pembentukan pemerintahan yang diinginkan di negara-negara yang sangat tergantung pada kehadiran militer AS dan menjadikan mereka berada di bawah kontrol Amerika Serikat baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, diperlukan seperangkat strategi transformasi militer yang mampu menangani dan mengendalikan situasi di negara-negara tersebut pada saat-saat penggantian rezim serta pada saat pendudukan militer semasa pasca perang—"dahulu, simulasi perang yang dicobakan Pentagon kurang atau malah tidak memperhitungkan jumlah atau

tingkat pasukan yang dibutuhkan, yang diperlukan bukan saja pada saat menaklukkan musuh maupun saat rezim negara tersebut [Irak dan Korea Utara] diruntuhkan dari kekuasaannya serta pada saat operasi pemulihan kestabilan segera setelah perang usai."[43)]

Yang jelas-jelas luput dari dokumen ini adalah komponen keempat, yang sangat tersirat di dalam kebijakan energi pemerintahan Bush-Cheney: kontrol maksimum atas produksi dan transportasi minyak.

Satukanlah komponen-komponen di atas, maka akan kita lihat strategi penegakan kekaisaran—dengan jangkauan yang begitu luas—yang muncul dari reruntuhan WTC.

OBSESI KELOMPOK NEOKONSERVATIF DENGAN KONSEP PERTAHANAN RUDAL

Satu tinjauan yang paling menarik dan paling penting yang disarikan RAD adalah penjelasan dari sebuah obsesi Amerika mutakhir: "pertahanan peluru kendali nasional."

Menurut *World Policy Institute*, sejak program "Perang Bintang" yang asli yang dicanangkan oleh Reagan pada tahun 1983, $70 milyar telah dibelanjakan untuk membangun pertahanan peluru kendali nasional. Selama waktu itu, skala proyek tersebut telah jauh dikurangi dari sebuah rencana pertahanan nasional—untuk menghadapi serangan dini dari Soviet—yang berkekuatan 10.000 kepala rudal menjadi hanya satu dengan 20 rudal saja. Kantor Urusan Anggaran di

Kongres memperkirakan rancangan baru ini akan memerlukan tambahan dana $60 milyar—beberapa analis independen menghitung anggarannya akan mencapai dua kali angka di atas.

Setelah terjadinya tragedi 11 September, salah satu reaksi awalnya adalah meningkatnya apresiasi orang atas program pertahanan peluru kendali ini. Walaupun kita sesungguhnya tidak akan tahu dan kita tidak bisa membayangkan apa yang mampu ditanggulangi oleh program Perang Bintang tersebut terhadap model serangan teroris semacam ini. Dan jika saja program ini bisa terlaksana, apakah kejadiannya *akan* berbeda?

Dalam inkarnasinya saat ini, program pertahanan rudal ini 'dijual' sebagai bentuk pertahanan terhadap serangan "negara-negara jahat" seperti Iran, Irak, dan Korea Utara, yang saat ini membentuk "poros setan." Padahal, tak ada satu dari negara-negara ini yang punya kapasitas untuk menyerang Amerika Serikat bahkan tidak satu rudal pun. Rasanya, hanya Korea Utara yang mungkin berkemampuan seperti itu. Itu pun diperkirakan baru dalam kurun waktu 15 tahun mendatang. Bahkan jika satu di antara negara-negara ini benar-benar bisa memperoleh kemampuan terbatas seperti itu, tingkat kepastian dari sebuah serangan balik yang seketika akan dilakukan AS secara besar-besaran akan membuat setiap serangan lawan tidak akan punya kemungkinan untuk berhasil.

Untuk memberi pembenaran atas kebijakan ini, beberapa komentator menunjuk pada fakta bahwa 20 rudal antarbenua adalah cuma seukuran persenjataan nuklir jarak jauh milik Cina. Dengan menggabungkan fakta ini dengan fakta lain bahwa 100 persen sukses

dalam intersepsi (pencegatan terhadap rudal yang sedang melintas) adalah hal yang mustahil, mereka sampai pada gagasan bahwa pertahanan rudal punya tujuan lain—sebagai perlindungan terhadap serangan awal. Jika Amerika Serikat secara besar-besaran meluncurkan serangan pertama, hingga memusnahkan 19 dari 20 ICBM-nya (rudal antarbenuanya), kita bisa mengharapkan sistem pertahanan rudal mampu memunahkan satu sisanya yang sedang meluncur terbang.

Cina sudah barang tentu punya keinginan yang serupa pula. Sebelum peristiwa 11 September, Cina punya hubungan bilateral yang semakin memburuk dengan Amerika Serikat. Tegangnya hubungan ini bahkan lebih buruk daripada sesudah insiden serangan AS terhadap kedutaan besar Cina di Beograd tahun 1999. George W. Bush bahkan mengakui pada Agustus 2001, Cina mungkin sekali akan merasakan ancaman ini dan bahwa Amerika Serikat bisa mengerti jika Cina punya keinginan yang sama, yakni untuk membangun rudal antarbenua lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik lagi. Hal ini, tentunya, semakin menyempitkan logika yang mendasari rancangan pertahahan rudal AS yang ditujukan terhadap Cina. Lebih buruk lagi, tindakan yang dilakukan Cina bisa membuat India terpaksa harus membangun persenjataan sejenis, yang ujungnya akan membuat Pakistan untuk meresponsnya lagi. Demikian seterusnya, hingga dihitung-hitung secara menyeluruh, kebijakan semacam ini secara strategis akan terlihat kontraproduktif, belum lagi bila kita ingat akan biayanya yang mahal.

Karena keadaan yang membingungkan ini, para aktivis perdamaian kadangkala dengan mudah berasumsi bahwa ini adalah permainan dari perusahaan-perusahaan persenjataan. Keyakinan ini diperkuat lagi dengan penilaian ilmiah bahwa rancangan pertahanan ini, yang saat ini didasarkan pada pemanfaatan "kendaraan perang" yang terbang di lapisan atmosfer luar untuk mencegat rudal balistik antarbenua yang melayang dengan kecepatan tinggi, adalah tidak mungkin diwujudkan secara teknis saat sekarang ini. Hal tadi diperkuat lagi dengan telah terungkapnya apa yang sebut sebagai percobaan yang sukses, ternyata sesungguhnya cacat.[44)]

Peace Action, kelompok tempat saya bergabung, mengkampanyekan "Perang Bintang adalah konyol" karena alasan di atas—karena cuma akan membuang-buang biaya untuk sesuatu yang tidak mungkin berhasil. Belakangan, *Peace Action* memasang serangkaian iklan di *Metro* terbitan Washington yang menyebut pertahanan rudal sebagai "Enron di Luar Angkasa," lengkap dengan gambar babi gemuk yang sedang berlayar dengan damainya ke arah kehampaan.

Kebenaran di balik dokumen RAD ini berbeda dengan apa yang tampak di permukaan. RAD menjelaskan kebijakan tersebut dengan mengarahkan pusat perhatian pada "negara-negara jahat," tetapi bukan seperti yang sering dilaporkan. Dokumen tersebut secara menarik mengakui bahwa:

Semasa era pasca-Perang Dingin, Amerika dan sekutunya, di luar Uni Soviet, telah memiliki persenjataan nuklir utama dan adalah negara-negara seperti Irak, Iran dan Korea Utara yang punya keinginan paling besar

untuk mengembangkan kemampuan persenjataan tersebut sebagai alat pencegahan atas serangan lawan. Penggunaan cara-cara konvensional dengan pameran kekuatan militer atau, sederhananya, dengan memaksakan pengaruh politisnya di mancanegara, terutama di saat krisis, akan merupakan tindakan yang lebih rumit dan lebih dilandasi keterpaksaan karena pada saat itu pula tanah air Amerika dan wilayah sekutunya akan rentan terhadap serangan rezim "negara-negara jahat" yang lemah tapi mampu bekerjasama dalam penggunaan kekuatan rudal balistik tingkat sedang. Pembangunan pertahanan rudal yang efektif, handal, berlapis, serta berskala global adalah sebuah tindakan pencegahan yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemampuan Amerika untuk melindungi diri.[45)]

Sudah barang tentu, selama Perang Dingin, adalah satu fakta bahwa Amerika pernah punya keinginan yang serupa, hanya saja hal ini tidak pernah nyata-nyata dan secara terbuka diungkapkan dalam sebuah dokumen yang bisa dibaca umum sebagaimana dokumen RAD ini.

Pertahanan rudal diperlukan agar kita mampu menyerang negara-negara yang lainnya yang terbebas dari hukuman—terutama diperlukan agar negara-negara kecil dan lemah tadi tidak akan menjadi penghalang agresi Amerika dengan konsekuensi ancaman balik terhadap sekutu Amerika di wilayah sekitarnya maupun terhadap pasukan Amerika sendiri di garis depan.

Yang diperlukan adalah sebuah sistem global dengan komponen "medan perang yang melebar" berbasis di seluruh penjuru dunia, "Jadi dibutuhkan sebuah wacana pertahanan dengan mandala (medan perang) lebar serta bertingkat tinggi (pada lapisan atmosfir tinggi) seperti,

Theater High Altitude Area Defense (THAAD = mandala pertahanan di lapisan atmosfir tinggi) milik Angkatan Darat dan *Theater-Wide System* (sistem mandala luas) yang dirancang Angkatan Laut."[46)] Sistem pertahanan *Theater-Wide* dengan kemampuan pencegatan dengan kecepatan tinggi yang dikehendaki AS memerlukan pembatalan dari batasan yang telah ditetapkan dalam Traktat ABM (Anti-Ballistic Missile - sebuah perjanjian tentang pembatasan jumlah peluru kendali antarbenua). Hal ini menjelaskan kepada kita alasan dari Pemerintahan Bush yang memaksakan kehendaknya dengan tindakan yang mengacaukan seperti di atas.

Sekali lagi, dokumen mengungkapkan: "Faktanya, adalah sebuah kesalahpahaman untuk mengira bahwa sistem pertahanan ini adalah sistem pertahanan rudal 'nasional', karena model pertahanan semacam itu—dengan medan perang yang meluas—adalah elemen vital bagi perlindungan sekutu AS serta pasukan AS di garis depan di mancanegara terhadap serangan persenjataan jarak jauh."[47)] Dengan kata lain, pertahanan rudal tak ada hubungan apa pun dengan pertahanan nasional.

TATA DUNIA BARU YANG *BARU*

Ke mana pun kita memandangnya, sebuah gambaran yang menakutkanlah yang akan kita peroleh. Dominasi politik Amerika harus didasarkan pada keunggulan militer yang begitu hebat, dan masih diperkuat lagi dengan sesekali melakukan perang-perang kecil untuk melawan musuh yang tak kuasa untuk menolaknya, kemudian dilanjutkan dengan pendudukan oleh militernya dan pemasangan rezim yang mau menaati

tekanan dari Amerika. Secara otomatis pula gagasan sistem dan kebijakan perekonomian Amerika akan masuk di dalam proses ini. Demikianlah yang terjadi baru-baru ini di Bosnia. Konstitusinya yang telah dimasuki oleh campur tangan AS mengharuskan Bosnia untuk membuka diri terhadap "pasar bebas" dan mengharuskan kepala Bank Sentral negaranya dijabat oleh bukan orang Bosnia. Tentu saja, menurut NSS, "tingkat pajak yang secara marjinal lebih rendah" dan "kebijakan hukum dan peraturan yang sesuai dan mampu mendorong investasi bisnis" di negara-negara asing tadi adalah faktor esensial bagi keamanan nasional kita.

Di dalam RAD, gambaran ini 'kering' dari setiap provokasi, tidak masalah seberapa pun palsunya ancaman serius yang diperlihatkan oleh negara-negara ini—sebaliknya, dapat dipahami bahwa "Amerika dan sekutunya... telah menjadi pemilik persenjataan nuklir utama." Agaknya karena Amerika telah siap kalaupun para neokonservatif-nya telah turun dari kekuasaan, dokumen ini lebih jujur daripada banyak dokumen lain yang bisa kita dapatkan yang sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintahan saat ini. Hal yang sering didengungkannya sebagai "perdamaian Amerika" hanya dapat dibaca dan dipahami sebagai resep bagi Pax Americana dalam bentuk sebuah kekaisaran dan bukanlah sesuatu yang punya konotasi perdamaian: "Jika perdamaian Amerika harus dipelihara, dan diperluas, hal tersebut harus berpijak di atas hegemoni militer AS yang tak terbantahkan."[48)]

Gambaran polos serupa ini hanya sedikit dikembangkan oleh NSS di dalam rancangan yang berintikan tindakan agresi tak beralasan yang dikehendaki Amerika

untuk mendominasi dunia, yang melibatkan upaya keras untuk membenarkan rancangan tersebut dengan memasukkan doktrin 'tindakan pencegahan' yang kini mulai berkurang gaungnya. Dengan memahami betul bahwa "konsep pertahanan tradisional tidaklah efektif untuk menanggulangi ancaman terorisme musuh... yang perlindungan paling potensialnya adalah karena bentuknya yang tanpa kewarganegaraan,"[49] maka logislah jika "sekali dayung dua tiga pulau terlalui" dipakai sebagai slogan dengan praktiknya: menyerang dan menundukkan terlebih dahulu negara-negara atau sasaran kecil yang lemah lainnya, yang rasa-rasanya tak ada satu pun dari mereka yang akan mampu menahan serangan militer Amerika.

Alih-alih mengikuti pemikiran mendalam ini untuk menyimpulkan bahwa gagasan perang tradisional tidak berhasil baik terhadap jaringan teroris multinasional yang tidak memiliki kewarganegaraan, secara oportunistik tragedi 11 September yang sepenuhnya tidak ada hubungannya, dan bahkan berkebalikan, dipakai sebagai dasar rancangan bagi kebijakan luar negeri yang sangat agresif sebagai bentuk *perlindungan* bagi rakyat Amerika dari serangan teroris.

Menimbang bahwa gagasan rancangan ini adalah dengan cara melakukan agresi terbuka oleh Amerika Serikat secara berulangkali, maka tidaklah mengejutkan bahwa pengingkaran terhadap *International Criminal Court* (ICC = Mahkamah Kriminal Internasional) dan penolakan setiap konsep pertanggungjawaban internasional terhadap Amerika Serikat adalah bagian esensial dari kebijakan baru ini. Bukan saja Amerika Serikat tidak mau mengesahkan perjanjian untuk mendirikan

mahkamah tersebut, Strategi Keamanan Nasional (NSS) membawa kita melangkah lebih jauh:

"Kami akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar beragam upaya kami untuk mencapai komitmen keamanan global dan melindungi Amerika tidak akan dirintangi oleh kemungkinan-kemungkinan penyelidikan, dakwaan, atau tuntutan dari Mahkamah Kriminal Internasional (ICC), yang jurisdiksinya tidak kami setujui dan tidak mencakup warganegara Amerika Serikat."[50)]

Amerika Serikat telah memiliki sendiri perjanjian bilateral dengan Afghanistan, Republik Dominika, Timor Timur, Gambia, Honduras, Israel, Kepulauan Marshall, Mauritania, Mikronesia, Palau, Romania, Tajikistan, Uzbekistan, Kuwait, dan India,[51)] yang berisi kesepakatan dari mereka untuk tidak saling mengekstradisikan warganegara mereka masing-masing untuk bisa dihadirkan dan diadili oleh Mahkamah Kriminal Internasional.

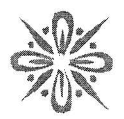
Sebuah perjanjian *American Servicemembers Protection Act* dipahami oleh banyak orang sebagai bagian perjanjian "Penjajahan Den Haag" karena perjanjian ini memberi otorisasi bagi presiden untuk mengumumkan perang sebagai tindakan pencegahan jikalau ada di antara personil Amerika yang hendak diajukan ke depan mahkamah internasional. Meskipun hal ini dipandang sebagai sebuah tindakan yang diperlukan untuk melindungi prajurit Amerika biasa, sejatinya—dalam hubungannya dengan ICC—adalah untuk menolak kemungkinan pengadilan bagi Henry Kissinger—dan mungkin saja Bush, Cheney, Rumsfeld, dan yang lainnya dalam waktu dekat di masa depan. Tentu saja, menurut *New York Times*, "Dalam sebagian besar pernyataan yang

mereka sampaikan kepada masyarakat umum, para pejabat pemerintahan menerangkan bahwa hal ini disebabkan karena mereka menguatirkan nasib para prajurit Amerika yang punya kemungkinan akan diajukan ke pengadilan tadi atas dasar tuntutan politis. Tetapi dalam berbagai diskusi dengan para sekutunya, mereka menyatakan, kini terdapat keprihatinan mendalam akan adanya kerentanan terhadap para pemimpin sipil puncaknya untuk terkena dakwaan dari mahkamah internasional."[52)]

Sebuah resep tindakan agresi tidaklah lengkap tanpa strategi untuk bisa selamat dari pembalasannya.

Bab 3

SEBUAH TINJAUAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AS SEJAK TRAGEDI 11 SEPTEMBER



SERANGAN 11 SEPTEMBER membuat kelompok neo-konservatif mendapatkan Pearl Harbor mereka yang baru—sebuah kesempatan yang sempurna bagi pemerintahan Bush untuk mulai melaksanakan visi yang terpapar di atas, yang secara relatif tidak terhalang lagi oleh kondisi dunia pra-11 September. Dalam beberapa jam saja setelah terjadinya peristiwa tersebut, mereka telah siap menjalankan rencana mereka dalam membentuk sebuah dunia baru.

PERSENJATAAN, PERTAHANAN RUDAL, DAN DOMINASI NUKLIR

Tragedi 11 September adalah alasan alami untuk mendongkrak besarnya anggaran militer. Gedung Putih telah mengumumkan anggaran militer untuk tahun fiskal 2004 total sebesar $399,1 milyar.[53] Angka ini kurang

lebih 30 persen di atas anggaran yang sama pada akhir dekade '90-an, anggaran belanja ini pun lebih tinggi dibanding angka yang telah direncanakan PNAC, yang tentunya tidak meramal akan terjadinya tragedi 11 September, dan karenanya tidak mengharap tingkat anggaran yang lebih tinggi ini bisa tercapai.

Pergeseran juga terjadi dari kebijakan nuklir jangka panjang ke arah sebuah dominasi nuklir yang baru. Nuclear Posture Review, sebuah penelitian rahasia Pentagon yang disampaikan kepada Kongres pada 31 Desember 2001, hingga sejumlah penemuannya bisa bocor ke masyarakat umum, memulai laporannya dengan tajuk yang menyatakan bahwa Amerika Serikat harus siap untuk mengarahkan sasarannya kepada tujuh negara—Cina, Rusia, Irak, Korea Utara, Iran, Libya dan Suriah—dengan persenjataan nuklir. John Bolton, ketika itu adalah Kepala Staf Menteri Luar Negeri urusan pengawasan persenjataan, secara eksplisit membenarkan maksud yang tersamar ini bahwa Amerika Serikat membatalkan janjinya untuk tidak menggunakan persenjataan nuklir terhadap negara-negara nonnuklir. Ia menjelaskan, "Kami tidak bisa mengikuti tuntutan teoretis sebagaimana yang dibuat oleh pemerintahan negara-negara lain."

Nuclear Posture Review juga menginginkan pengembangan generasi persenjataan nuklir yang baru, yang disebut-sebut sebagai "penghancur bunker." Persenjataan ini akan dirancang hingga punya kemampuan menembus bumi dan setelah itu baru meledak, serta ditujukan untuk menghancurkan bangunan bawah tawah yang atau tanpa diperkuat dengan beton bertulang. Bangunan yang dijadikan sasaran tersebut mungkin saja merupakan

tempat penyimpanan senjata pemusnah massal atau bahkan merupakan pabrik yang memproduksinya. Ini diharapkan mampu dilakukan tanpa membahayakan warga sipil yang ada di permukaan tanah. Di luar fakta bahwa setiap penggunaan persenjataan nuklir adalah (hampir) secara universal dikutuk oleh komunitas internasional dan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, para ahli meragukan ide bahwa persenjataan semacam ini tidaklah akan berpengaruh terhadap manusia yang ada di permukaan tanah di atas bangunan bawah tanah yang jadi sasarannya. Menurut Stephen Schwartz, dalam tulisannya di *Bulletin of the Atomic Scientists*, bahkan efek ledak dari senjata nuklir mini yang hanya berbobot 0,1 kilo ton, yang skalanya hanya 1/100 dibanding daya ledak bom yang dijatuhkan di Hiroshima, tidak akan mungkin bisa menyimpan radiasi ledaknya hanya di bawah tanah saja:

Menimbang gagasan para perancang bahwa persenjataan nuklir yang lebih kecil bisa dipakai untuk menghantam target di bawah tanah tanpa menyebabkan kerusakan di permukaaan tanahnya. Untuk sepenuhnya aman, mini nuklir berbobot 100 ton yang menembus sasaran bunker bawah tanah yang diperkuat harus menembus kedalaman 230 kaki (melalui tanah, batuan padat, dan beton bertulang) sebelum meledak, padahal kemampuan ini adalah mustahil menurut tinjauan fisika saat ini.[54)]

Rancangan lain di Nuclear Posture Review memerlukan biaya $15 juta untuk melanjutkan kembali pemanfaatan Lahan Percobaan Nevada dan memperbaiki standar "tiga sekawan nuklir" —rudal berbasis kapal

selam, peluru kendali yang berbasis di daratan, dan pembom strategis berkemampuan nuklir.[55]

Menyatukan unsur-unsur ini bukanlah hal yang sulit. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, karena tingkat keberhasilannya yang rendah, secara teknis pertahanan rudal masih bisa dimanfaatkan untuk melindungi serangan pertama yang dilakukan Amerika Serikat, tetapi tidak akan mampu bertahan terhadap serangan pertama yang dilakukan besar-besaran oleh musuh. Pengembangan senjata penghancur bunker adalah sebuah upaya untuk membuat serangan pertama menjadi lebih terlihat mungkin secara politis, karena Amerika Serikat dapat mengklaim (terlepas benar atau tidaknya) bahwa senjata semacam itu tidak membahayakan manusia. Mereka pun bisa menyatakan bahwa persenjataan ini bukanlah senjata nuklir "betulan". Pembatalan janji untuk tidak menyerang bangsa-bangsa nonnuklir diperlukan sebagai langkah awal dalam penggunaan persenjataan serupa ini. Terungkapnya daftar sasaran yang jelas-jelas menyebut Cina, yang merupakan keprihatinan strategis utama bagi para neokonservatif selama ini, seperti juga daftar "negara-negara jahat" lainnya yang memang telah lama diincar Amerika Serikat, akan melengkapi gambaran yang jelas-jelas memperlihatkan transisi yang terjadi ke arah kebijakan dominasi nuklir yang didasarkan pada, baik secara politis maupun tinjauan dari segi kemiliteran, ancaman serangan pertama persenjataan nuklir lawan. Apakah ancaman seperti ini akan terealisasi atau tidak, hal tersebut bukanlah aspek yang penting—jelaslah, rencana tersebut akan memanfaatkan alasan ini demi meningkatkan pengaruh politis dan hegemoni Amerika Serikat di dunia.

PANGKALAN DAN MINYAK

Pemerintahan Bush mencanangkan waktu selama sepuluh tahun ke depan setelah tragedi 11 September untuk melakukan tindakan ekspansi dan campur tangan, dan hampir kesemuanya akan secara eksplisit dilakukan atas nama perang terhadap terorisme, tetapi sesungguhnya temanya akan berputar-putar pada basis, penggantian rezim, dan minyak.

Pada Januari 2002, analis militer William Arkin memberi catatannya perihal pangkalan:

Sejak 11 Septembar, menurut sumber-sumber Pentagon, kota-kota tenda militer telah dibangun di 13 lokasi di sembilan negara yang bertetangga dengan Afghanistan, sehingga secara mendasar telah memperluas jaringan basis-basis militernya di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, dari Bulgaria dan Uzbekistan sampai Turki, Kuwait dan sekitarnya, lebih dari 60.000 personil militer Amerika Serikat kini tinggal dan bekerja di sejumlah pangkalan di garis depan ini. Ratusan pesawat terbang datang dan pergi di lapangan terbang yang disebut-sebut hanya merupakan "lapangan terbang perintis."[56)]

Dia melanjutkan analisisnya dengan menambahkan, "Pangkalan-pangkalan ini akan memudahkan Amerika Serikat untuk melakukan pameran kekuatannya, sementara—di lain pihak—pangkalan-pangkalan tersebut bisa jadi malah akan menambah pula frekuensi serangan teroris terhadap Amerika."

Sejak saat itu, jaringan pangkalan-pangkalan militer dan basis pasukan Amerika Serikat yang baru telah meluas sampai berjumlah cukup banyak yang berlokasi di banyak tempat di dunia. Pengawasan militer atas aliran perdagangan minyak telah mewujud dalam dua cara.

Pertama, kontrol potensial atas negara-negara produsen minyak, hingga pengawasan bisa dilakukan langsung pada sumbernya. Dan yang kedua adalah kontrol atas transportasi minyak ke seluruh dunia melalui dominasi angkatan laut yang mengawasi titik-titik sempit di tempat-tempat yang dilalui oleh sebagian besar kapal tanker dunia.

ASIA TENGAH

Mari kita mulai dari Asia Tengah. Banyak penulis yang mengulas kepentingan keberadaan Amerika Serikat di Afghanistan adalah karena rencana pembangunan jalur pipa gas alam dari Turkmenistan, yang merupakan negara yang memiliki cadangan gas alam ketiga terbesar di dunia, akan melalui Afghanistan. Rancangan tersebut ditinggalkan pada tahun 1998, saat pemerintahan Clinton meluncurkan serangan rudalnya terhadap Afghanistan serta karena pertimbangan bahwa negara ini tidak akan pernah stabil iklim politisnya sehingga kurang memberi jaminan keamanan bagi perusahaan-perusahaan komersial.

Ada pula alasan lainnya yakni tentang nasib jalur pipa minyak dari kedalaman Laut Kaspia yang kaya dan belum dieksploitasi secara besar-besaran (negara-negara yang berbatasan dengan Laut Kaspia adalah Rusia, Azerbaijan, Iran, Turkmenistan, dan Kazakhstan) bagi kebutuhan pasar di Asia Timur dan Asia Selatan yang meningkat cepat. Iran, tak dapat dibantah lagi, adalah rute terbaik untuk jalur pipa tersebut, karena mereka punya prasarana yang siap dioperasikan untuk memompa minyak yang melewati dan memasukkannya ke

dalam kapal-kapal tanker yang telah menunggu di Teluk Persia untuk selanjutnya dikirim ke seluruh dunia. Akan tetapi, Amerika Serikat punya banyak persoalan dengan Iran, pertama karena sanksi pedagangan dan investasi yang diperbuatnya di tahun 1996, dan yang lebih mutakhir adalah karena dimasukkannya Iran ke dalam sekumpulan negara yang dijulukinya sebagai "poros setan." Jalur pipa sepanjang jalan darat menuju Cina akan menjadi sangat panjang dan bisa menambah biaya pengelolaan minyak sampai ke tingkat yang signifikan. Sebuah jalur pipa yang melalui Afghanistan bukan merupakan pemecahan masalahnya, karena—seperti telah disebutkan sebelumnya—kondisi negara ini jauh dari kestabilan politik. Hanya saja banyak pula yang menimbangnya sebagai pemecahan terbaik, walaupun kurang sempurna, dari berbagai pilihan yang ada. Banyak pula kritikan pedas atas analisis signifikansi strategis Afghanistan. Sebagai contohnya adalah pendapat yang dikemukakan Ken Silverstein di *America Prospect.* Kendati demikan, banyak pula perdebatan yang melenceng dari fokus utamanya. Memang benar, perang di Afghanistan memberi Amerika Serikat kontrol terhadap pemerintahan Afghanistan (sebagaimana akan kita saksikan belakangan, "demokrasi-demokrasi-an" yang diadakan Amerika Serikat di sana adalah sangat lemah bahkan oleh standar "pertunjukan demokrasi" yang dirancang Amerika Serikat), akan tetapi yang lebih penting lagi adalah kenyataan bahwa karenanyalah tercipta kehadiran militer Amerika Serikat secara permanen di seluruh wilayah.

Kehadiran militer Amerika Serikat secara permanen tersebut di Afghanistan saja jumlahnya mencapai 5.000

pasukan yang ditempatkan di bekas pangkalan udara Rusia di Bagram dan sekitar 3.000-4.000 personil lainnya di Kandahar, ditambah lagi di beberapa pangkalan lebih kecil lainnya. Di Pakistan, Amerika Serikat mengambil-alih lapangan terbang di Jacobabad sebagai fasilitas miliknya, sebagai tambahan bagi penggunaan—bersama basis-basis lainnya—ini adalah "bagian dari apa yang deprediksi oleh seorang sumber asal Pakistan akan menjadi 'keberadaan semi permanen' bagi pasukan Amerika Serikat di Pakistan."57) Kehadiran militer Amerika Serikat juga terjadi di sejumlah pangkalan tetap maupun pangkalan semi permanen yang dibolehkan oleh beragam persetujuan bilateral yang mengizinkan penggunaan lapangan terbang, basis dan fasilitas di negara-negara sekelilingnya, terutama Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. (Sebuah penggambaran yang rinci dan mendalam bisa kita dapatkan dalam artikel di *The Nation* yang berjudul "Operation Endless Deployment (Operasi Pembangunan Pangkalan Tanpa Berakhir)".)[58)]

Keberadaan Amerika Serikat di wilayah tersebut menghasilkan pula satu irisan militer yang membentang di antara Cina dan Rusia. Hal tersebut akan meningkatkan pengaruh militer Amerika Serikat atas minyak Asia Tengah, yang mungkin pada suatu satu hari nanti akan menjadi sumber penting bagi kebutuhan Cina dan Jepang.

ASIA TENGGARA

Bergerak ke selatan, kita akan menemukan beragam bentuk kerjasama militer Amerika Serikat-India, dengan sejumlah latihan bersama yang melibatkan angkatan laut,

darat dan udara, dan berlanjutnya kembali penyediaan sarana militer (dengan kata lain, penjualan senjata) Amerika Serikat buat India. Hal yang paling berarti adalah dilakukannya patroli bersama antara angkatan laut Amerika Serikat dan India yang dilakukan di sepanjang Selat Malaka,[59)] yang merupakan satu dari tiga titik temu utama aliran minyak dunia—25 persen dari minyak yang dikapalkan akan melalui selat ini. Bahkan keseluruhan minyak yang akan menuju Jepang melewati selat ini. Dengan kebutuhan minyak Cina yang diproyeksikan akan meningkat lebih cepat daripada produksinya, maka Cina akan tergantung pula pada lalu lintas perdagangan minyak di sepanjang Selat Malaka ini. Jadi, Amerika Serikat akan memiliki kontrol potensial atas aliran minyak ke negara-negara tersebut dan karenanya akan punya kekuatan politis atas mereka.

Salah satu tindakan awal pemerintahan Bush setelah tragedi 11 September adalah berusaha untuk membatalkan keputusan Kongres yang melarang hubungan dan penjualan sarana militernya kepada Indonesia, yang secara umum dijatuhkan karena keberhasilan para aktivis gerakan yang mengungkap kenyataan mengerikan pada saat pendudukan Indonesia atas Timor Timur (yang berakhir tahun 1999). Segera setelah peristiwa pengeboman di Bali, dengan Indonesia telah sepenuhnya menandatangani kesepakatan untuk "perang terhadap terorisme," pelanjutan kembali kerjasama tingkat tinggi kedua negara ini sekali lagi akan menjadi agenda kerja.

Militer Amerika Serikat juga telah kembali ke Filipina. Resminya, mereka terbebas dari status kolonial pada tahun 1946, tetapi masih tetap mempunyai hubungan yang jelas-jelas berbentuk neokolonial dengan

Amerika Serikat jauh setelah itu. Banyak orang Filipina memandang kemerdekaan Filipina sesungguhnya bukanlah di tahun 1946 tetapi tahun 1991, yakni ketika sebuah gerakan rakyat besar-besaran memaksa pemerintah Filipina untuk menggelandang militer Amerika Serikat ke luar dari pangkalan utamanya, termasuk Clark dan Teluk Subic. Pada waktu itu, konstitusi Filipina diamandemen untuk melarang kehadiran pasukan asing, kecuali untuk sekadar transit maupun untuk latihan.

Sejak Februari sampai Juli 2002, lebih dari 1.300 prajurit Amerika Serikat berada di Filipina, berlagak membantu militer Filipina untuk memburu kelompok Abu Sayyaf, segerombolan kecil bandit dan penculik yang diduga orang memiliki hubungan dengan ancaman teroris global terhadap Amerika. Sesungguhnya, banyak alasan untuk menduga bahwa sasaran sebenarnya dari operasi bersama Amerika Serikat-Filipina adalah berbeda. Setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Colin Powell di bulan Agustus, pemerintah Gloria Macapagal-Arroyo mendeklarasikan "perang habis-habisan" terhadap Partai Komunis Filipina (CPP = Communist Party of the Philippines) dan sayap bersenjatanya, Tentara Rakyat Baru (NPA = New People's Army)—dan hampir bersamaan waktunya Powell menambahkan kedua kelompok ini ke dalam daftar "organisasi teroris asing" milik Departemen Luar Negeri. Gerakan rakyat anti kehadiran militer Amerika memaksa penundaan rencana kedatangan pasukan Amerika Serikat pada musim semi 2003—pada akhirnya 1.200 prajurit tiba pada bulan April 2003, tetapi pemerintahan Gloria Macapagal-Arroyo terpaksa harus mengingkari peranan langsung mereka di dalam pertempuran.[60]

TIMUR TENGAH DAN NEGARA-NEGARA BALKAN

Amerika Serikat telah memiliki pangkalan darat militer di Timur Tengah, terutama di wilayah Teluk Persia, sejak Perang Teluk. Setelah peristiwa 11 September, jumlahnya meningkat. Sampai Maret 2003, di sejumlah basis di wilayah Teluk, pasukan Amerika Serikat mencapai lebih dari 250.000 personil. Pangkalan tetap Amerika Serikat berjumlah tiga di Oman, sebuah pangkalan militer yang modern dan sangat luas al-Udeid di Qatar, beberapa lainnya di Kuwait, Bahrain, dan Saudi Arabia, dan basis Pasukan Elite yang baru di Djibouti. Dengan sejumlah pangkalannya ini, cakupan militer Amerika Serikat telah meliputi Selat Bab El Mandeb (yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden) serta di Selat Hormuz (yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Oman), dua dari titik temu utama bagi lalu lintas minyak dunia.

Sejak tragedi 11 September, Amerika Serikat membangun pangkalan bagi Pasukan Elitenya di Georgia, untuk melatih pasukan antiteroris untuk melaksanakan patroli di Celah Pankisi, yang diduga merupakan tempat pengungsian bagi anasir-anasir Al-Qaeda dan bagi para pejuang Chechnya. Bisa kita sebutkan pula adanya Kamp Bondsteel yang sangat besar yang terletak di Kosovo, berintikan 7.000 pasukan tetap, dan keberadaannya merupakan salah satu konsekuensi utama dari Perang Yugoslavia. Namun bisa kita lihat pula nanti pengaruhnya atas kedekatan jaraknya dengan jalur pipa Trans-Balkan AMBO (Albania, Macedonia, Bulgaria Oil) yang direncanakan, yang akan membawa minyak Kaspia dari

pelabuhan di Laut Mati sampai ke Laut Adriatik tanpa harus melalui Bosporus yang terkenal ramai.[61)] Penempatan pasukan Amerika Serikat pada pangkalannya di bagian tenggara Eropa adalah satu keharusan yang ditekankan di dalam dokumen "Rebuilding America's Defenses," dan merupakan bagian esensial untuk mengarahkan Eropa Timur secara langsung untuk berada di bawah "payung perlindungan" Amerika Serikat.

KOLOMBIA

Intervensi Amerika Serikat di Kolombia menggabungkan dua tema utama yakni menekan gerakan rakyat bersenjata serta minyak. Selama beberapa tahun, Amerika Serikat memberi dukungan bagi teror yang terorganisasi yang mengancam negara Kolombia di bawah slogan "perang candu." Ini dilakukan dengan melibatkan serangan besar-besaran bahan senyawa perusak dedaunan yang mengingatkan kita pada Perang Vietnam, yang bukan hanya merusak tanaman koka tetapi juga memusnahkan beragam tanaman pangan. Untuk itu, telah diusulkan pula percobaan dengan menggunakan senyawa perusak daun, yang disebut "Agent Green."[62)] Selama waktu ini, puluhan ribu orang Kolombia terbunuh, di atas dua juta dari mereka menjadi pengungsi, dan pranata sosial sebagian besar pedesaaan Kolombia hancur lebur.

Sejak tragedi 11 September, beragam upaya melawan narkoba telah sepenuhnya berbalik peranannya. Pada bulan November, Pasukan Elite Amerika Serikat mulai "melatih" militer Kolombia untuk menghadapi pemberontakan, sebuah tindakan yang nyata-nyata

bersesuaian dengan anggaran Kolombia tahun 2002 yang di dalamnya terkandung apresiasi senilai $94 juta untuk membantu melindungi jalur pipa Cano-Limon, yang akan membawa 100.000 barel minyak per hari menuju pantai Kolombia untuk kepentingan sebuah perusahaan Occidental Petroleum.[63)] Karena dipandang sebagai simbol dominasi asing, jalur pipa tersebut sering dirusak dan dibom sampai lebih dari 900 kali sejak awal tahun 1980-an oleh FARC dan ELN, yang juga mengutip pembayaran royalti minyak dari pejabat pemerintahan setempat.

VENEZUELA: "PENGGANTIAN REZIM" DAN SERANGAN TERHADAP DEMOKRASI

Operasi Amerika Serikat di Venezuela, sebuah negara produsen minyak utama, setelah tragedi 11 September mungkin merupakan kasus yang paling banyak mengungkapkan kelicikan Amerika Serikat. Siapa pun yang mengikuti liputan *New York Times* tentang kisah Presiden Hugo Chavez Frias mengetahui bahwa Chavez adalah sasaran utama bagi upaya Amerika Serikat dalam "penggantian rezim," sebuah pemahaman yang jelas tercermin pada komunike yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Bush sesaat setelah dilantik.

Mereka yang ingin memahami fenomena Venezuela dan Chavez secara mudah dengan membaca liputan media utama dapat dimaafkan jika mengira Chaves adalah seorang diktator militer yang dibenci oleh rakyatnya, sebuah kesan yang secara konsisten ditampilkan dalam liputan *New York Times*. Ketika terjadi sebuah upaya kudeta pada tanggal 12 April, sesungguhnya, baik

surat kabar *New York Times* maupun Departemen Luar Negeri awalnya bereaksi dengan menyebut kudeta tadi sebagai sebuah kemenangan bagi demokrasi—walaupun tindakan pertama dari pemimpin kudeta itu, Pedro Carmona Estanga, "seorang pengusaha yang bertanggung jawab" adalah membubarkan dewan nasional negaranya.

Setelah berita itu menyebar ternyata Chavez malah terpilih (dengan 62 persen suara) dan setelah gerakan rakyat secara spontan timbul untuk membantu "orang yang dibenci" ini kembali berkuasa, penguasa Amerika Serikat saat itu terpaksa menarik kembali ucapannya dan harus mengakui bahwa kudeta bukanlah cara yang baik untuk mendongkel pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Akan tetapi, seorang pejabat dalam Pemerintahan Bush cepat-cepat menambahkan, Chavez harus mengerti bahwa "legitimasi bukanlah sesuatu yang begitu saja dianugerahkan oleh mayoritas pemilih"[64)]—sebuah aspek yang tentunya dipahami benar oleh Pemerintah Bush.

Sejak saat itu terungkaplah bahwasanya Amerika Serikat bukan cuma menyikapi upaya kudeta tersebut dengan tangan terbuka. Amerika Serikatlah yang secara aktif mendorong terjadinya kudeta. Sebuah lembaga National Endowment for Democracy (NED = Bantuan Nasional untuk Demokrasi), sesuai namanya, adalah sebuah organisasi, yang berlagak sebagai badan pemerintah, yang dirancang untuk menumbangkan demokrasi di negara-negara lain memberi sokongan sebesar 877.000 dolar bagi pasukan yang anti-Chavez selama tahun berjalan hingga kudeta terlaksana.[65)] Tindakan yang dieksploitasi oleh NED lainnya adalah pembelian 2.000 kotak suara di Yugoslavia, seharga kurang lebih 25 juta

dolar untuk menyokong kelompok-kelompok yang beroposisi terhadap Milosevic.[66]

Menurut Stratfor, perusahaan swasta yang bergerak di bidang intelejen militer (http://www.stratfor.com), CIA telah berdaya upaya untuk mengorganisasikan para pemimpin serikat pekerja perminyakan dan para komandan militer untuk melawan Chavez sejak musim panas tahun 2001. Otto Reich, asisten Menteri Luar Negeri Urusan Negara-negara Barat dan seorang pemegang posisi kunci dalam operasi pemerintahan Reagan di Amerika Tengah, bertemu beberapa kali dengan para pemimpin kudeta dan memberikan saran-saran bagi Carmona selama upaya kudeta—hal-hal yang di belakang hari dia ingkari. [67]

Chavez telah lama menjadi sasaran, bukan cuma karena ulahnya terhadap oligarki Venezuela, tetapi lebih dari itu karena beragam upayanya yang mampu mempengaruhi pasar minyak dunia. Venezuela di bawah Chavez telah kembali pada peran sejati mereka dalam memelihara kerjasama di antara negara-negara produsen minyak (Venezuela adalah pendiri OPEC), dan memainkan peran yang mengarah pada kenaikan harga minyak dari angka serendah $7 per barel di tahun 1998. Chavez bergerak menuju solidaritas dengan bangsa-bangsa yang tidak memproduksi minyak, memberi Kuba minyak dengan potongan harga, dan bertindak dengan meningkatkan royalti yang harus dibayar oleh perusahaan-perusahaan asing seperti Exxon-Mobil dalam eksploitasinya di Venezuela.

Venezuela memperlihatkan dengan begitu jelasnya bahwa "penggantian rezim" tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaksanaan demokrasi (dalam cara yang

tidak terlalu langsung, sebagaimana terjadi pada Afghanistan, Irak, dan Palestina). Sebuah pertanyaan kunci bagi para perencana Amerika Serikat tetap sama, seperti selama ini, yakni bagaimana meminimumkan potensi kebijakan yang independen di belahan dunia lainnya, terutama di Dunia Ketiga.

Bagian II

PERANG IRAK



JIKA KEBIJAKAN LUAR NEGERI Bush bercirikan pada penekanannya atas "penggantian rezim," perluasan basis militer, serta kontrol atas produksi dan transport minyak, maka ia ditandai oleh Perang Irak, yang memiliki kombinasi dari keseluruhan tiga aspek tadi tepat di jantung wilayah yang mengandung dua pertiga persediaan minyak dunia.

Sudah barang tentu, kepentingan "strategis" ini tidak pernah diminta oleh pemerintahan Bush. Negara-negara yang sering berperang jauh dari perbatasannya cenderung untuk bergantung secara retorika, jika bukan secara sebenarnya, pada beberapa macam kerangka justifikasi moral; Amerika Serikat pun tidak terkecuali.

Banyak argumen bagi perang tersebut telah hilang karena berbagai peristiwa; terutama, klaim bahwa Irak bersikap mengancam Amerika Serikat yang begitu seringnya digembar-gemborkan kini tak dapat dipertahankan lagi. Akan tetapi, evaluasi yang benar-benar

dilakukan untuk melihat alasan sesungguhnya dari perang itu sendiri memerlukan pertimbangan pembenaran analisis retrospektif. Hal tersebut bukan dinilai dari apa yang telah terungkap sejak perang terjadi, tetapi harus dipandang dari apa yang ada atau telah diketahui sebelum perang berlangsung. Sesungguhnya, keputusan bisa dibenarkan jika dinilai dari apa yang telah diketahui bukan dari apa yang telah dipelajari belakangan.

Ada dua kategori argumen yang utama bagi alasan terjadinya perang ini. Pertama, terfokus hampir secara eksklusif pada Pemerintahan Bush sampai beberapa minggu terakhir, yang merupakan pengembangan dari ancaman yang katanya ditunjukkan Irak terhadap Amerika Serikat, warga Amerika, atau mungkin terhadap "kepentingan Amerika Serikat" yang tidak disebutkan. Sumber dari ancaman ini adalah apa yang disebut-sebut sebagai persenjataan pemusnah massal Irak, dikombinasikan dengan kecenderungan Saddam untuk menggunakannya, bahkan, berulang kali disebutkan, "terhadap rakyatnya sendiri." Persenjataan baru yang merupakan rekaan ini memainkan peranannya baik dengan cara penyediaan persenjataan dari Irak buat Al-Qaeda atau organisasi teroris serupa lainnya untuk dipakai menghantam Amerika, atau, dalam beberapa kabar burung, dipakai Irak langsung dengan sasarannya warga Amerika. Kendati peran yang belakangan ini hanya berupa suatu kemungkinan dalam beberapa waktu mendatang, selama proses pemeriksaan (yang dimulai kembali bulan November 2002) Amerika Serikat secara teratur berupaya untuk menciptakan perasaan urgensi yang mendesak. Kedua kemungkinan tersebut sangat erat terikat dengan "doktrin tindakan pencegahan" Bush,

sebuah gagasan yang menyatakan ada hak bagi Amerika untuk menyerang negara-negara yang mungkin punya kemampuan untuk mengembangkan kapasitas persenjataan semacam itu dan berniat untuk menggunakannya di masa depan. Sebutan "tindakan pencegahan" diperlukan karena selama satu dasawarsa terakhir Irak tidak terlihat punya niat agresif terhadap satu negara manapun, apalagi terhadap Amerika Serikat.

Hal yang terikat secara kuat pula adalah sebuah argumen bahwa Amerika Serikat harus berperang melawan Irak, dengan atau tanpa persetujuan internasional, agar mampu menegakkan hukum internasional. Argumen ini agaknya merupakan turunan dari sebuah gagasan bahwa Irak bersikap mengancam, karena pelanggaran teknis dari beberapa resolusi Dewan Keamanan, yang kendati tanpa adanya ancaman yang berarti, cukuplah dipandang sebagai suatu pembenaran bagi kematian dan kehancuran yang ditimbulkan oleh perang.

Sebuah argumen kelas dua lainnya banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh neokonservatif yang kurang terkenal, tetapi pada umumnya tidak dipakai oleh Bush dan pejabat tinggi lainnya sampai beberapa minggu sebelum perang berawal. Argumen tersebut menyebutkan perang dilangsungkan untuk "membebaskan" Irak—sebuah argumen yang menjadi milik ideologi yang lebih besar, yakni "intervensi kemanusiaan," yang memainkan peranan utama sejak awal dasawarsa '90-an. Dalam kasus ini, perang dibenarkan karena Amerika Serikat akan membawakan demokrasi bagi Irak, dan mengakhiri keburukan yang disebabkan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan sendiri oleh pemerintah Irak.

Bahkan, dalam suatu pemutar-balikan fakta yang pandai (dan penuh kemunafikan), perang dimaksudkan untuk mengakhiri penderitaan rakyat yang disebabkan oleh sanksi. Beberapa ideolog, terutama Richard Perle dan Paul Wolfowitz, juga memasukkan alasan ini ke dalam visi Amerika yang lebih besar lagi. Yakni, visi yang memandang Amerika Serikat sebagai sebuah adidaya dari kekuatan pihak yang baik yang ada di dunia. Mereka memasukkan pula faham ini, terutama, dalam sebuah visi yang memanfaatkan slogan "perang terhadap terorisme" untuk membawa demokrasi ke seluruh Timur Tengah, memaksakan keruntuhan diktator dan rezim fundamentalis agama dan menggantikannya dengan demokrasi pluralis yang toleran terhadap Barat, yang otomatis akan menjadi sekutu dan pendukung "kepentingan Amerika Serikat."

Dengan hampir hancurnya argumen dalam kategori pertama, klaim "pembebasan" mulai bermunculan dalam perdebatan masyarakat umum. Malahan, komentar sebagian besar oposisi utama bagi program neokonservatif adalah "Orang-orang Arab belum siap dengan ragam demokrasi," bukan pernyataan yang mempertanyakan motif Amerika Serikat sesungguhnya.

Alasannya adalah begitu banyak perdebatan tentang perang ini yang telah dihilangkan dari sejarah kebijakan Amerika Serikat terhadap Irak dan terhadap Timur Tengah. Sebagai contoh, beberapa gerakan anti perang memuji "pengucilan"—sanksi, pemeriksaan persenjataan, dan "zona larangan terbang"—sebagai alternatif bagi perang. Padahal "pengucilan" ini telah memakan korban jauh lebih banyak dalam total angka kematian yang

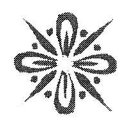
terjadi dibandingkan dengan tiga minggu berlangsungnya Perang Irak di musim semi tahun 2003.

Bab ini dimulai dengan tinjauan menyeluruh atas pengucilan, kemudian dilanjutkan dengan analisis "doktrin tindakan pencegahan," analisis kedua kategori argumen yang dipaparkan di atas, dan sebuah diskusi untuk menyimpulkan apa saja alasan utama yang mendorong kebijakan Amerika Serikat di wilayah ini—bukan kemerdekaan, tetapi kontrol terhadap minyak sebagai suatu komponen penting bagi hegemoni global.

Bab 4

MEMAHAMI "PENGUCILAN":

Irak setelah Sanksi Perang Teluk, Zona Larangan Terbang, dan Pemeriksaan Persenjataan



DALAM BULAN-BULAN yang mendekati terjadinya Perang Irak, argumen anti perang yang paling umum adalah pernyataan bahwa "pengucilan telah berlangsung dengan efektif." Dengan membandingkannya dengan kebijakan "pengucilan" komunisme oleh Amerika Serikat selama Perang Dingin,[68)] istilah ini kadang dipakai untuk menjelaskan kebijakan yang dibebankan kepada Irak setelah Perang Teluk, sebagian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagian lagi oleh Amerika Serikat. Pembebanan ini berlangsung selama lebih dari satu dasawarsa terutama atas kehendak Amerika Serikat. Istilah ini dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa kebijakan ini adalah suatu kebijakan pertahanan yang dirancang sebagai tindakan untuk berjaga-jaga terhadap ancaman yang ditunjukkan Irak (persis seperti klaim bahwa Perang Dingin adalah upaya defensif Amerika Serikat terhadap agresi Soviet), dan mungkin juga memberi implikasi bahwa tindakan ini merupakan suatu bentuk

kebijakan yang relatif pasif serta tidak akan membawa kerusakan bagi lawan.

PASCAPERANG

Pada tanggal 6 Agustus 1990, dalam hari-hari setelah Irak menduduki Kuwait, Amerika Serikat meloloskan U.N. Security Council Resolution (UNSCR = Resolusi Dewan Keamanan PBB) 661, yang menjatuhkan sanksi komprehensif terhadap Irak sampai mereka menarik diri dari Kuwait. Sanksi yang belum pernah ada sebelumnya, baik dari besar skalanya maupun dari dampaknya, berisi pelarangan keseluruhan ekspor dan impor, dengan obat-obatan sebagai satu-satunya perkecualian (segera sesudahnya, UNSCR 666 memberi pengecualian pula pada bahan pangan). Setiap barang yang diimpor harus mendapat persetujuan dari Komite Sanksi, yang beranggotakan satu orang dari masing-masing anggota Dewan Keamanan, dan setiap anggotanya dapat memveto kontrak dengan alasan apa pun. Sementara, Resolusi 665 tersedia bagi pelaksanaan blokade laut oleh dunia internasional dengan Amerika Serikat, yang juga merancang resolusi ini, sebagai pimpinannya.

Sanksi yang dibebankan terhadap Irak ini benar-benar mengena dengan telaknya. Ini dikarenakan perekonomian Irak dibangun melulu dari hasil ekspor minyaknya, yang memang merupakan sumber pendapatan negara yang dominan, dan uang yang diperoleh dari ekspor minyak inilah yang dipergunakan Irak untuk membeli barang-barang keperluan dalam negerinya. Sebelum invasi, Irak membeli sekitar 70 persen bahan pangannya dan sebagian besar persediaan obat-obatannya berasal dari manca-negara.[69]

Kendati teorinya, bahan pangan adalah barang yang dikecualikan dari sanksi, pada pelaksanaannya sanksi merupakan upaya yang sedikit banyak dimaksudkan untuk menekan kebijakan Irak dengan cara melaparkan rakyatnya. Sebagai contoh, antara 6 Agustus 1990 dan April 1991, Irak hanya bisa mengimpor kurang lebih 10.000 ton gandum—ekuivalen dengan impor Irak untuk mencukupkan kebutuhannya sehari di masa sebelum invasinya ke Kuwait. Bahkan Amerika Serikat pernah menghalangi kontrak impor makanan bayi dari Bulgaria karena, kata utusan Amerika Serikat di Komite Sanksi, orang dewasa mungkin sekali akan memakannya.[70)]

Irak kalah dalam Perang Teluk, tetapi karena perkembangan yang akan kita bahas belakangan, Saddam Hussein masih tetap berkuasa. Hal ini mampu memberi alasan akan penetapan kembali sanksi dan, sesungguhnya, memperkenankan Amerika Serikat memaksakan pengaruhnya atas Irak, kebanyakan melalui medium Dewan Keamanan PBB. Jika saja ada rezim lain yang tidak berhubungan dengan dan tidak memiliki reputasi buruk sebagaimana Saddam Hussein (terutama, karena invasinya ke Kuwait) mampu naik ke kursi kekuasaan, pengerahan dunia internasional untuk menyokong "pengucilan" akan menjadi jauh lebih sulit. Apalagi untuk melangsungkannya selama 12 tahun, sebuah tindakan yang mustahil.

UNSCR 687 DAN SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Mekanisme awal "pengucilan" adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB 687, yang diundangkan pada

bulan April 1991. Ketetapannya belakangan dimodifikasi dan ditambah dengan berbagai resolusi lainnya, tetapi kerangka yang dicitrakannya tidak pernah lekang sampai perang terjadi.

Resolusi yang luas cakupannya ini disebut-sebut oleh banyak orang sebagai "Induk bagi semua Resolusi," 687 berpusat pada dua konsep: sanksi, sebagaimana didiskusikan di atas, dan senjata pemusnah massal, sebuah terminologi yang mewadahi persenjataan biologis, kimia, dan nuklir. Sebagai sebutan yang selalu menjadi tema yang signifikan bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, 'senjata pemusnah massal' mengambil peran utama dalam propaganda sebelum Perang Teluk.

Ketika Pemerintahan Bush senior berjuang keras mencari jalan untuk meyakinkan perlunya perang kepada publik Amerika, beragam upaya dicoba—memulihkan pemerintahan Kuwait "yang sah", penegakan aturan hukum, melindungi akses ke minyak. Masyarakat umum Amerika menganggap tak ada satu pun dari tema-tema di atas yang cukup memadai untuk membenarkan konflik militer berskala besar. Menteri Luar Negeri James Baker tercatat melakukan *blunder* terburuknya ketika dia menyatakan, "Untuk memberi pemahaman bagi tingkat rata-rata warga negara Amerika Serikat, bisa saya katakan bahwa alasannya adalah tugas. Jika anda ingin menyimpulkannya dalam satu kata, ini tugas."[71)] Kendati hal ini masuk dengan mulusnya hingga memang sesuai dengan cermin dua ciri kecongkakan Pemerintahan Bush senior, sok berguna dan sok ningrat, penjelasan semacam ini sangat membingungkan rakyatnya.

Satu *casus belli* yang diterima oleh mayoritas masyarakat umum Amerika secara konsisten adalah

ancaman dari Irak yang punya kemungkinan besar akan mengembangkan persenjataan nuklir dalam waktu dekat.

Jadi, UNSCR 687 membutuhkan "pemusnahan, penghapusan, atau perlucutan, di bawah supervisi dunia internasional," atas semua persenjataan Irak, baik senjata biologis dan senjata kimia serta rudal balistik dengan jangkauan lebih dari 150 kilometer (ini penting terutama karena dipandang sebagai kendaraan pengangkut yang potensial bagi hulu ledak dari segala jenis senjata pemusnah massal), demikian pula dengan semua komponen dan fasilitas yang diperlukan untuk membangunnya. Resolusi ini juga memberi mandat agar Irak tidak sampai memiliki persenjataan nuklir atau yang komponen diperlukannya. Resolusi inipun melahirkan U.N. Special Commission (UNSCOM = Komisi Khusus PBB), yang berbagi tanggung jawab bersama-sama dengan International Atomic Energy Agency (IAEA = Badan Tenaga Atom Internasional) untuk memeriksa secara langsung fasilitas yang dimiliki Irak (IAEA mengawasi fasilitas nuklir) sebagai bagian dari pemantauan dan verifikasi perlucutan persenjataan Irak.

Sanksi, yang meliputi pelarangan impor (kecuali bahan pangan, obat-obatan, dan "kebutuhan esensial warga sipil") dan ekspor, akan tetap berlaku sampai Irak disahkan oleh UNSCOM dan IAEA sebagai negara yang bersih dari semua yang dikategorikan sebagai senjata pemusnah massal. Sayangnya, resolusi tersebut agak berwajah ganda; walaupun Paragraf 22 menyatakan perlucutan persenjataan akan mengarah kepada pencabutan sanksi, Paragraf 21 memberi pernyataan bahwa peninjauan sanksi akan dilakukan jika terjadi "kebijakan dan pelaksanaan yang baik dari Pemerintah

Irak." Amerika Serikat dan Inggris secara konsisten mengartikan, atau mengklaim sendiri dengan mengartikan paragraf ini sebagai peluang yang diberikan kepada mereka untuk menjatuhkan tuntutan apa pun yang mereka pandang sesuai.

PEMERIKSAAN PERSENJATAAN 1991-1998

Kesan dari pemeriksaan persenjataan yang selalu didengungkan oleh pemerintahan Bush dan sebagian besar pers adalah seperti kisah Keystone Cops, dengan adegan seorang inspektur nahas yang sungguh-sungguh mengumpulkan semua senjata, sementara orang-orang Irak mengendap-endap menyembunyikan semuanya di luar dan segera mengembalikannya begitu si inspekturnya pergi. Dalam versi resminya, pemeriksaan tidak berjalan karena mereka membutuhkan kerjasama Irak, yang tidak kunjung datang, hingga berakhir sepenuhnya ketika Irak "mengusir" para inspektur pada bulan Desember 1998—dalam beberapa variasi, pengusiran ini dipicu oleh kampanye pengeboman Rubah Gurun pada bulan itu juga.[72)]

Hal yang sebenarnya sedikit berbeda, tetapi kita harus mulai dengan mengakui bahwa Irak memang sungguh-sungguh melakukan tindakan terbaiknya untuk secara bertahap, sedikit demi sedikit mengungkap program persenjataannya dan secara konsisten mencoba untuk memakai tahapan tadi sebagai kartu truf untuk posisi tawar-menawarnya. Pemeriksaan dimulai pada bulan Juni 1991; dan pada 23 Juni, pejabat Irak menahan para inspektur yang mencoba menghadang kendaraan Irak yang mengangkut *Calutrons* (peralatan yang

berkaitan dengan nuklir) yang bergerak ke luar lokasi pemeriksaan. Pada bulan Maret 1992 Irak mengakui bahwa mereka menyembunyikan keberadaan 89 rudal balistik dan beberapa macam senjata kimia, tetapi mereka mengklaim telah menghancurkannya secara sepihak di musim panas 1991. Penghancuran secara sepihak ini kemudian menjadi masalah; pada saat-saat terakhir, upaya pemeriksaan yang utama bukan lagi mencari dan menemukan persenjataan tetapi hanya untuk menemukan dokumen yang memastikan klaim dari pihak Irak tadi sehingga dapat diverifikasi.

Ketika UNSCR 715, yang menjadi pijakan bagi Keberlangsungan Pemantauan dan Verifikasi, ditetapkan pada bulan Oktober 1991, Irak menolak menerima ketetapan tersebut dalam waktu yang lebih lama dari dua tahun. Dalam musim gugur tahun 1997, Irak mencegah UNSCOM memeriksa beberapa tempat dengan alasan tempat-tempat tersebut adalah "lokasi kepresidenan" yang berhubungan dengan kedaulatan nasional dan keamanan kepala negara, dan bahwa tempat-tempat tersebut tidak ada hubungannya dengan perlucutan persenjataan. Secara umum, bersesuaian dengan beberapa penemuan baru, Irak berulang kali mengamandemen penyingkapan awal yang berkategori "Sepenuhnya, Final, dan Lengkap". Banyak resolusi Dewan Keamanan kemudian ditetapkan dan mengharuskan Irak, di bawah ancaman bersenjata, agar segera tunduk.

Akan tetapi, kurangnya kerjasama ini tidak membuat para pemeriksa terhalang dalam melaksanakan tugasnya. Para pemeriksa tidak hanya punya wewenang untuk memeriksa suatu lokasi saja, tetapi lebih luas dari itu wewenangnya membolehkan mereka untuk mengambil

sampel tanah dan udara. Mereka pun memiliki akses untuk mendapatkan foto udara dan berbagai informasi lain yang dikumpulkan oleh badan-badan intelejen negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat. Dari tiga macam 'senjata pemusnah massal', program persenjataan nuklir adalah yang termudah untuk dideteksi karena radiasi yang dipancarkannya; senjata kimia berikutnya, karena senyawa kimia kadangkala dapat dideteksi dari sampel tanah. Senyawa biologis dapat saja dengan mudah disembunyikan dalam lemari es, tetapi fasilitas untuk memproduksi persenjataan dari senyawa biologis ini adalah lebih sukar untuk disembunyikan—dan persenjataan efektifnya adalah mustahil untuk tidak terdeteksi.

Jadi, sebagai contoh, pada bulan Juli 1995 Irak terpaksa mengakui keberadaan program persenjataan biologis ofensif. Pengakuan ini sering kali disalahpahami sebagai suatu konsekuensi hasil pengkhianatan Hussein Kamel, menantu Saddam Hussein dan Menteri Perindustrian dan Pertambangan, bukan dari hasil pemeriksaan, padahal pengkhianatan ini terjadi pada bulan Agustus 1995, sementara pengakuan ini terjadi satu bulan lebih awal.

Menurut laporan Amorim,[73)] pada bulan Maret 1999 yang diserahkan kepada Dewan Keamanan, keberhasilan UNSCOM dan IAEA termasuk—tetapi tidak terbatas pada—penghapusan keseluruhan "material nuklir yang bisa dijadikan senjata" pada bulan Februari 1994; pemusnahan keseluruhan atau hampir semua rudal, peluncur rudal, hulu ledak kimia dan biologis yang pernah diimpor Irak; pemusnahan lebih dari 88.000 amunisi kimiawi, sekitar 5.000 ton senyawa senjata kimia dan bahan kimia pembentuknya; dan penghancuran Al-

Hakam, kompleks penghasil persenjataan biologis terbesar, juga sebagian besar peralatan dan media tumbuh biologisnya. Walaupun ada pula beberapa masalah atas beragam persenjataan berdaya rusak rendah yang belum dapat dicari pemecahannya, seperti artileri berisi gas mustard yang diklaim Irak telah hilang setelah terjadinya Perang Teluk, laporan tersebut menyimpulkan: "Kendati beberapa unsur penting masih belum terpecahkan, sebagian besar program persenjataan Irak yang dituju telah dapat dimusnahkan."

Demikianlah, menurut seorang mantan pemeriksa persenjataan Scott Ritter, dalam pernyataannya pada musim gugur tahun 2002, "Problem utama kita pada titik ini adalah masalah akuntabilitas. Irak telah menghancurkan 90-95 persen senjata pemusnah massalnya. *Oke.* Tetapi kita harus ingat bahwa 5-10 persen sisanya tidak menjadi ancaman. Jumlah tersebut bahkan tidak dipandang sebagai suatu program persenjataan."[74)] Atas penghentian pemeriksaan, Ritter berkomentar, "Irak tidak memberi ancaman dengan 'senjata pemusnah massal'-nya kepada satu negara mana pun."[75)]

Jadi meskipun tanpa kerjasama Irak sepenuhnya, para pemeriksa dari UNSCOM menghasilkan porsi terbesar dari tugas yang mereka tanggung, tinggal beberapa problem yang kebanyakan adalah masalah teknis yang harus diselesaikan. Berikutnya, kita harus menimbang alasan sebenarnya yang menyebabkan terhentinya pemeriksaan persenjataan.

Sejak awal, Amerika Serikat mencoba untuk memastikan agar tiada jalan keluar untuk mengakhiri "pengucilan." Kebijakan Amerika Serikat kadangkala dikonsepsikan sebagai "gawang yang bergerak," tetapi,

sesungguhnya, gawangnya pun tak pernah ada. Penolakan untuk menyebutkan tindakan apa yang mencukupi agar dapat terbalas dengan terjadinya pencabutan sanksi, ditambah lagi dengan ketiadaan pendekatan "ada budi ada balas" sehingga selama ini tidak pernah ada insentif dalam bentuk apa pun bagi Irak selama mereka mematuhi resolusi yang dibebankan kepada mereka, membuat Irak tidak punya pilihan lain selain tunduk atas apa pun ketetapan perlucutan persenjataan.

Kesan yang tercermin dalam pembicaraan masyarakat umum di Amerika adalah jika saja pemerintah Irak benar-benar patuh, maka sanksi akan segera dicabut—suatu kepercayaan yang menarik menimbang secara berulang-kali para pejabat pemerintahan Amerika Serikat memberi pernyataan yang sebaliknya. Sebagai contoh, pada tanggal 20 Mei 1991, tujuh minggu setelah penetapan UNSCR 687, James Baker mengucapkan, "Kami tidak tertarik untuk melonggarkan sanksi selama Saddam Hussein masih tetap berkuasa."[76)] Pada tahun 1994, Menteri Luar Negeri Warren Christopher menulis dalam op-ed *New York Times*, Amerika Serikat tidak mempercayai ketundukan Irak terhadap Paragraf 22 Resolusi 687 adalah mencukupi sebagai pembenaran untuk mencabut embargo."[77)] Pernyataan yang mungkin paling merusak karena pemilihan waktu yang kurang tepat adalah satu pernyataan Madeleine Albright, yang ketika itu menjabat Menteri Luar Negeri, pada 26 Maret 1997, "kami tidak setuju dengan bangsa-bangsa yang berargumen bahwa jika Irak tunduk kepada kewajibannya sehubungan dengan senjata pemusnah massal, sanksi harus dibatalkan. Dalam pandangan kami, yang tidak akan goyah, Irak musti membuktikan maksud

damainya... Dan berlimpah bukti yang memperlihatkan niat Saddam Hussein yang tak pernah damai."

Rezim pemeriksa mulai hancur pada tahun 1997 sampai 1998, setelah Irak makin bertambah lelah atas ketiadaan progres terhadap sanksi (rinciannya diterangkan panjang lebar di dalam satu buku bagus yang ditulis Milan Rai, *War Plan Iraq*).

Krisis ini hampir dapat dicegah pada bulan Februari 1998 ketika Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan terbang ke Baghdad untuk memperoleh persetujuan terhadap pemeriksaan tempat-tempat yang disebut-sebut sebagai "lokasi kepresidenan," hal yang selama ini dicoba untuk dicegah oleh warga Irak.

Pada bulan Agustus, frustrasi karena ketiadaan progres terhadap sanksi (terutama, karena larangan penjualan minyak), Irak memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan para pemeriksa sampai keinginannya dikabulkan. Walaupun begitu, Irak masih membolehkan keberlangsungan pemantauan. Sesaat kemudian, Kofi Annan melaksanakan tinjauan terhadap sanksi secara komprehensif, hingga dia memberi pertimbangannya agar beban pembuktian bisa diambil-alih oleh para pemeriksa persenjataan. Kofi Annan juga menetapkan sejumlah jadual yang masuk akal buat penghentian sanksi.[78)]

Belakangan, pada tanggal 30 Oktober, Dewan Keamanan mengirimkan surat yang mendangkalkan upaya reformasi ini. Isinya, terutama, Dewan Keamanan "menghapus jaminan bahwa Irak akan dilepaskan dari sanksi pada tanggal tertentu."[79)] Pada tanggal 31 Oktober, dengan menimbang bahwa sanksi kemungkinan besarnya akan berlangsung selamanya, Irak memutuskan untuk menghentikan keseluruhan operasi UNSCOM di Irak.

Retaknya kerjasama ini biasanya diklaim oleh sumber-sumber resmi Amerika Serikat sebagai kesalahan Irak sepenuhnya. *Financial Times*, sebaliknya, dengan jelas menyatakan pada waktu itu bahwa "keputusan Mr. Saddam [sic] untuk melumpuhkan UNSCOM dipicu oleh penolakan Amerika Serikat secara eksplisit untuk berjanji akan mencabut embargo minyak jika Irak tunduk kepada segala keperluan perlucutan persenjataan."[80)]

Setelah retaknya kerjasama ini, di bawah ancaman serangan, Irak melanjutkan kembali kerjasamanya pada tanggal 14 November 1998. Bulan depannya, dilakukan lebih dari 300 kali pemeriksaan; laporan kepala UNSCOM Richard Butler, yang disampaikan di hadapan Dewan Keamanan pada tanggal 15 Desember, menyebutkan hanya terjadi lima insiden problematik yang relatif kecil. Entah bagaimana, sepenuhnya berpaling dari laporannya sendiri, dia menyimpulkan bahwa "tidak ada progres" yang tercapai.[81)]

Bill Clinton melihat draft awal tadi terlebih dahulu dan menyatakan dokumen ini terlalu lunak. Di kemudian hari, menurut *Washington Post*, pejabat pemerintahan Amerika Serikat memainkan "peranan langsung dalam menyusun kembali teks Butler selama serangkaian pembicaraan di sebuah lokasi yang aman di kantor misi Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa." Pada tanggal 15 Desember, atas "saran" Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Peter Burleigh, Butler menarik mundur para pemeriksa persenjataan tanpa memberitahukan Dewan Keamanan—dalam pelanggaran terbuka atas janji yang dibuatnya sendiri di hadapan Dewan Keamanan setelah penarikan awal sebelumnya.[82)] Kesimpulan bahwa Butler berkolusi dengan Amerika Serikat dengan

menyediakan beragam pembenaran, betapapun lemahnya, demi terlaksananya operasi Rubah Gurun tidak bisa dielakkan sama sekali.

Keprihatinan lain yang sering dikeluhkan oleh warga Irak adalah bahwa pemeriksaan merupakan kedok buat mata-mata Amerika Serikat. Sesaat setelah pengeboman dalam operasi Rubah Gurun, dugaan tersebut terbukti ketika *Washington Post* mengungkapkan bahwa Amerika Serikat selama hampir tiga tahun sering sekali memantau komunikasi radio sandi dari pasukan pengamanan terdalam Presiden Saddam Hussein dengan menggunakan peralatan yang secara rahasia dipasang di Irak oleh inspektur persenjataan PBB."[83)]

Dilaksanakannya Rubah Gurun memastikan dugaan adanya pengintaian tersebut. Dirancang sebagai operasi untuk "merusak" kemampuan Irak membuat persenjataan (alasan yang bodoh sekali karena pemeriksaan persenjataan telah mencapai hasil yang jauh lebih banyak daripada sekadar tindakan pengeboman, dan mudah diduga bahwa inspektur persenjataan punya kemungkinan besar tidak akan diperkenankan kembali ke Irak setelah operasi pengeboman ini). Operasi ini sebenarnya ditujukan kepada "sasaran rezim." Dari 97 lokasi yang jadi sasaran Rubah Gurun, hanya 11 saja yang berhubungan dengan 'senjata pemusnah massal'. Sebagian besar darinya adalah tempat-tempat pusat komando dan pengawasan, kesatuan-kesatuan pasukan Garda Republik, dan fasilitas utama pasukan pengamanan internal.[84)]

Operasi ini, yang telah dirancang setidaknya setahun sebelumnya, adalah serangan terhadap rezim, sebuah upaya yang memanfaatkan data intelejen yang diperoleh

dengan cara-cara spionase sebagaimana disebutkan di atas sebelum informasi tersebut menjadi "kadaluwarsa." Selama setahun perencanaannya, Amerika Serikat secara berkala mengarahkan para pemeriksa persenjataan untuk melakukan tindakan yang bisa mengakibatkan kesan provokasi.

Pada tahun 2002, dalam sebuah wawancara di satu stasiun radio Swedia, *Rolf Ekeus*, kepala UNSCOM dari tahun 1991 sampai 1997, mengkonfirmasikan seluruh kesimpulan ini. Financial Times melaporkan:

[Mr. Ekeus berkata] Setelah waktu berlalu, beberapa negara-negara, terutama Amerika Serikat, menginginkan untuk mempelajari lebih banyak tentang kemampuan Irak yang lainnya.

Mr. Ekeus berucap, Amerika Serikat mencoba mencari informasi tentang keberadaan Saddam Hussein, presiden Irak. Dia bilang dia mampu menolak tekanan tersebut, akan tetapi tekanan itu makin memuncak setelah dia tidak menjabat lagi di tahun 1997.

Yang paling celaka, dia menyatakan bahwa Amerika Serikat dan para anggota Dewan Keamanan lainnya menekan rombongan pemeriksa untuk menginspeksi daerah-daerah sensitif, seperti Departemen Pertahanan Irak, pada saat-saat yang secara politis menguntungkan bagi mereka untuk menciptakan situasi krisis. 'Mereka [para anggota Dewan Keamanan] menekan para pemimpin rombongan pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut—satu hal kontroversial dari sudut pandang warga Irak, dan karenanya terciptalah perintang hingga bisa dipakai sebagai pembenaran bagi tindakan militer langsung,' ucapnya.[85)]

Jauh dari urusan perlucutan senjata Irak, Amerika Serikat dengan serta-merta mendangkalkan keberhasilan dari rombongan pemeriksa dengan menghilangkan insentif bagi Irak (pencabutan sanksi); memanipulasi para inspektur untuk menciptakan beragam insiden politis; melakukan spionase; dan, akhirnya, menghapus program pemeriksaan persenjataan agar tindakan "penggantian rezim" dapat terlaksana dengan cara pengeboman dan invasi besar-besaran.

SANKSI

Saya mau bertaruh dengan siapa pun di sini bahwa kami lebih prihatin terhadap rakyat Irak daripada Saddam Hussein.

—Menteri Luar Negeri AS saat itu, Madeleine Albright, Ruang Pertemuan Balai Kota CNN, Columbus, Ohio, 18 Februari 1998.

Kami dengar setengah juta anak meninggal dunia. Maksud saya, jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang mati di Hiroshima. Dan, Anda tahu adakah pengorbaan tadi punya nilai yang sepadan?

—Lesley Stahl yang mengomentari sanksi PBB terhadap Irak, dalam acara 60 Minutes, 12 Mei 1996.

Saya pikir ini adalah pilihan yang sangat sulit, tetapi nilainya—kami pikir nilainya sepadan.

—Jawaban Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB saat itu, Madeleine Albright.

Sementara pemeriksaan terus berlangsung, drama yang lebih berarti dan lebih menekan dimainkan oleh Amerika Serikat, hingga semakin merusak dan menghancurkan keseluruhan tata masyarakat Irak.

Pendapat sebagian besar masyarakat Amerika Serikat tentang pembebanan sanksi terhadap Irak secara umum berpuncak antara dua kubu yang ditandai oleh pernyataan Madeleine Albright di atas—suatu penilaian yang tidak berprikemanusiaan perihal tujuan kebijakan Amerika Serikat yang dirasakan lebih penting daripada kematian kanak-kanak (suatu hal yang jarang secara jujur diakui), dan lagak suci dari kebesaran sikap pemerintahan Amerika Serikat yang prihatin atas kondisi rakyat Irak ditambah lagi dengan airmata buaya yang mereka teteskan atas kekejaman Saddam Hussein (yang digugat sebagian orang). Sebagaimana pertanyaan besar yang diajukan berkenaan dengan operasi pemeriksaan persenjataan yang berbunyi, "Mengapa dia tidak mau bekerjasama sehingga sanksi bisa dicabut." Sementara, pertanyaan besar yang berkenaan dengan sanksi adalah "Mengapa dia menunggu begitu lama sebelum memberikan persetujuannya bagi Program Minyak bagi Pangan?" dan "Mengapa dia menghabiskan uang untuk membangun istana-istana dan persenjataan militernya dan bukannya memberi makan rakyatnya?"

Mari kita mulai dengan mencatat bahwa istilah "sanksi" adalah suatu hal yang sangat-sangat disalahartikan oleh kita. Amerika Serikat banyak sekali menerapkan sanksi sepihaknya terhadap ratusan kejadian. Perserikatan Bangsa-Bangsa selama ini telah mengesahkan penetapan sanksi pada 14 peristiwa yang berbeda. Akan tetapi selama itu pula, mereka belum

pernah menetapkan sebuah pelarangan yang diterapkan oleh dunia internasional secara komprehensif atas keseluruhan ekspor dan impor suatu negara; tidak pernah pula terjadi suatu pembatasan terhadap impor dipaksakan dengan melibatkan seluruh pendapatan suatu negara dan menempatkan dana tadi di rekening bank yang diawasi dengan begitu ketat, ditambah lagi dengan sejumlah birokrasi yang menyulitkan dalam penarikan dana tersebut. Kerancuan yang ditimbulkan oleh istilah tadi dicontohkan terutama oleh suatu pernyataan yang bodoh dari Marc Cooper, seorang yang mengangkat dirinya sendiri sebagai juru bicara dari kelompok gerakan anti perang yang baru bermunculan. Dalam sebuah artikel yang mencerminkan kebodohan dari tujuan gerakan antiperang kelompoknya, dia menyarankan agar Golongan Kiri "harus meluruskan kisah sebenarnya di balik penetapan sanksi"—bagaimana bisa mereka menentang sanksi terhadap Irak padahal "seluruh Golongan Kiri Amerika mendukung sanksi yang sama-sama menyakitkan yang pernah terjadi terhadap negara aparteid Afrika Selatan?"[86)]

Sudah barang tentu, di Afrika Selatan, African National Congress (Partai Kongres Nasional Afrika), sebuah gerakan massa yang mewakili mereka-mereka yang betul-betul bakal menderita karena adanya penetapan sanksi, memang menginginkan penetapan-nya.[87)] Tetapi yang lebih penting lagi adalah suatu perbedaan dramatis terhadap praktik sanksi sebenarnya: Coba bayangkan tanggapan dari siapa pun yang menyarankan agar Afrika Selatan boleh dikepung oleh blokade laut, sehingga negara ini tidak bisa mengekspor barang apa pun selama bertahun-tahun dan kalau pun

berhasil, pendapatannya harus disita dan tidak boleh disentuh sama sekali, kemudian penggunaan dan penarikan dana—hasil dari ekspor tadi—bagi keperluan penyediaan obat-obatan dan prasarana yang penting bagi masyarakatnya seperti penjernihan air, sering kali diblokir dan ditunda; dan bahwa seluruh skenario ini terjadi setelah negara itu dibom hingga menjadi puing-puing.

Jika anda benar-benar mendengar kisah yang sesungguhnya, maka sanksi terhadap Irak bisa dipandang sebagai cerita horor yang paling buruk selama hidup kita.

TINJAUAN SINGKAT ASAL-MUASAL SANKSI

Dalam bulan-bulan setelah berakhirnya Perang Teluk, sejumlah laporan telah mengindikasikan bencana yang bakal terjadi. Pada bulan April, Harvard Study Team, sekelompok peneliti yang beranggotakan para doktor dan para ahli ilmu sosial, meramalkan: jika tidak ditangani, "paling sedikit 170.000 kanak-kanak di bawah umur lima tahun akan meninggal di tahun mendatang sebagai sebab dari dampak krisis Teluk yang berlarut-larut." Sebuah laporan yang punya kesimpulan serupa yang diterbitkan pada bulan Maret oleh Wakil Sekretaris Jendral PBB Martti Ahtisaari mengungkapkan bahwa Perang Teluk sudah mengarah pada "hasil yang mendekati kiamat," dan dia memprediksi terjadinya "bencana besar dalam waktu dekat."[88]

Selama tahun 1994, karena keruntuhan perindustrian serta ketiadaan dana yang masuk, Irak telah berada di

ambang bencana kurang gizi yang semakin meluas. Pada tahun 1996, program Minyak bagi Pangan (OFF = Oil for Food) dicanangkan. Pada awalnya, program ini memperkenankan Irak untuk menjual minyak senilai $4 milyar per tahun. Belakangan, kuota penjualannya dinaikkan dan dipatok pada $10.5 milyar, tetapi pada bulan Desember 1999 Irak sama sekali dilarang menjual minyaknya. Dana yang diperoleh dari penjualan minyak tersebut sebanyak 30 persen, pada awalnya tetapi belakangan turun menjadi 25 persen, diambil alih buat program Dana Kompensasi PBB, yang dimaksudkan sebagai pengganti kerugian bagi korban invasi Irak yaitu Kuwait. Sedangkan penerima dana yang paling besar adalah berbagai perusahaan minyak, termasuk perusahaan Kuwait Petroleum, yang mendapat dana kompensasi atas kerusakan sebesar $15.9 milyar. Tiga sampai empat persen lainnya masuk ke PBB sebagai biaya administratif, termasuk di dalamnya biaya yang dicadangkan buat program pemeriksaan persenjataan.

Semua uang yang diperoleh Irak atas penjualan minyaknya melalui program ini didepositokan dalam rekening bank di New York, dan dana tersebut hanya boleh ditarik bagi pembayaran kontrak pembelian dengan perusahaan-perusahaan asing yang disetujui oleh Komite Sanksi, sementara masing-masing anggotanya boleh menunda atau menahan kontrak apa pun, tanpa perlu menyediakan alasannya. Situasi ini membaik dengan lulusnya UNSCR 1409 pada bulan Mei 2002, yang secara otomatis membolehkan pembelian semua barang kecuali yang tertera dalam daftar barang tertentu.

Barang-barang yang dibeli melalui program Minyak bagi Pangan mulai masuk ke Irak pada bulan Maret 1997.

Sampai 21 Februari 2003, senilai $43 milyar barang telah disetujui untuk diimpor, tetapi hanya $26.6 milyar dari angka tadi yang benar-benar masuk ke Irak melalui program tersebut. Antara Maret 1997 sampai Januari 2002, rata-rata nilai penyediaan barang hasil impor per orang per bulannya adalah sekitar $14-15, dan sejak saat itu angka tadi membesar sekitar dua kalinya.

Tak pelak lagi, angka-angka ini tidak memenuhi tingkat kebutuhan minimum rakyat Irak. Pada bulan Mei 1997, penemuan yang dikeluarkan UNICEF, yang diperoleh dari penelitian 15.000 kanak-kanak Irak, mendapatkan 27.5 persen kanak-kanak tersebut menderita kurang gizi, menimbang jika kondisi tadi tetap terjadi pada usia di atas dua tahun, maka dampaknya akan "sulit untuk dibalikkan" dan "kerusakan yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan anak kemungkinan besar akan permanen."[89)] Selama berlangsungnya sanksi, tingkat melek huruf pada orang dewasa menurun dari 80 persen menjadi 58 persen[90)] dan pada anak-anak tingkat melek hurufnya pun menunjukkan penurunan serupa—suatu hal yang tidak tampak di negara-negara lain selama dasawarsa '90-an, bahkan tidak pula terjadi di negara-negara sub-Sahara Afrika yang diluluhlantakkan oleh AIDS.

Banyak yang telah memperkirakan angka kematian anak-anak Irak yang disebabkan adanya penetapan sanksi, akan tetapi sebuah penelitian yang paling memiliki otoritas—dan satu-satunya yang melibatkan data-data baru yang independen—dilaksanakan oleh UNICEF pada tahun 1999.[91)] Dengan mendasarkan penelitiannya pada survei hampir sejumlah 24.000 rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa tingkat

kematian anak usia di bawah lima tahun, di wilayah-wilayah Irak Tengah dan Selatan, mencapai rata-rata 56 dari 1.000 dalam periode 1984-89 dan 131 dari 1.000 selama tahun 1994-99—suatu peningkatan yang mencapai angka 130 persen.[92)] Dengan metode ekstrapolasi garis kecenderungan maka didapatkan perkiraan tingkat kematian yang besarnya mencapai 500.000 anak di bawah usia lima tahun selama periode 1991-98. Hendaknya kita berhati-hati dalam menghubungkannya dengan sanksi semata, akan tetapi kehancuran yang disebabkan oleh Perang Teluk dan sanksi, yang dipandang sebagai satu kesatuan, memang sesungguhnya harus dipertimbangkan sebagai mayoritas penyebab bencana kematian tersebut; karena kedua peristiwa inilah yang terjadi dalam kurun waktu antara dasawarsa 1980-an sampai 1990-an.

Tanggapan yang selalu diperlihatkan pemerintahan Amerika Serikat ketika dikonfrontasikan dengan angka-angka ini adalah antara menolak tingginya angka tersebut ataupun mengklaim bahwa semua kematian tersebut adalah karena kesalahan Saddam Hussein semata.

Beberapa dari tanggapan tadi jelas-jelas keliru, misalnya milyaran dolar dana yang diperoleh dari program Minyak bagi Pangan (OFF) yang dimelencengkan untuk keperluan militer (satu hal yang tidak memungkinkan karena uang tersebut tidak pernah masuk ke Irak, tetapi berada di bank di negara lain yang hanya dikeluarkan bagi pembelian barang-barang yang disetujui saja). Masalah lainnya yang sering disebut-sebut adalah nafsu presiden yang membangun banyak istana dan masjid. Kendati sifat ekstravagansa Saddam Hussein memang tidak diragukan, sekali lagi, uang OFF mustahil dipakai untuk pembangunan tadi. Lebih-lebih lagi, total

biaya yang dibelanjakannya ini merupakan jumlah yang sangat kecil dalam persentase pendapatan nasionalnya.

Keberatan lain, yang punya beragam konotasi, adalah klaim bahwa pada saat itu Irak membelanjakan banyak dana untuk membeli peralatan kedokteran canggih (seperti mesin MRI) untuk menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi buat orang-orang kaya sementara rumah-rumah sakit pemerintah sangat kekurangan jarum suntik, antibiotik, dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Adalah benar bahwa uang OFF teorinya bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan barang-barang yang esensial saja, bukan membeli barang keperluan yang mengakibatkan kesenjangan yang semakin lebar dalam masyarakatnya sebagaimana yang sering kali diklaim para pendukung sanksi, kendati pengaruhnya pun mungkin tidak terlalu berarti. Akan tetapi, keberatan ini pun bernada sangat sumbang.

Para pendukung ketidaksetaraan perekonomian yang begitu jomplangnya, yang berjalan ke arah apa yang disebut seorang ekonom, Paul Krugman, sebagai suatu Zaman Sepuhan baru yang terjadi di Amerika Serikat, sebagaimana melandanya gelombang perbedaan tingkat perekonomian global (angka perbedaan 30 banding 1 di antara 20 persen orang terkaya dengan 20 persen orang termiskin secara global pada tahun 1960 telah meningkat menjadi perimbangan 74 banding 1 pada tahun 1997), tiba-tiba saja, dalam kasus Irak ini, malah menunjukkan keprihatinannya. Mereka mengharapkan agar Irak bisa mengalokasikan kekayaan secara berimbang dan setara. Sementara di banyak tempat, sejumlah negara-negara lain malah punya kebijakan yang secara konsisten mengarah kepada meningkatnya

ketidaksetaraan di semua aspek. Sebuah negara dengan 41 juta rakyat, dengan jumlah populasi kanak-kanak yang tidak proporsional, yang diatur dan diawasi dengan sangat ketat dan mengikat, dan sama sekali tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memadai tidak sepantasnya dipersalahkan jika kondisi dan alokasi ketidaksetaraan tersebut terjadi seperti di Irak ini. Betapapun, Irak mampu membuat para jawara penganut pasar bebas menemukan faham sosialisme.

Kendati pemerintahan Irak melakukan sejumlah kekeliruan, mereka juga berhak menerima acungan jempol. Bencana kelaparan yang semakin merebak bisa ditanggulangi dengan dilembagakannya program distribusi bahan pangan secara besar-besaran dalam cakupan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Setiap minggunya ransum didistribusikan kepada rakyat, dan hampir seluruhnya gratis. Dipuji sebagai "yang nomor satu" oleh Tun Myat, koordinator bantuan kemanusiaan PBB di Irak yang bertugas dari tahun 2000 sampai 2002, program ini tak pernah luput dari pujian para pengamat.

Sudah barang tentu, masalah pujian atau makian buat pemerintah Irak, yang kesemuanya kasar dan brutal, adalah kurang fundamental jika kita bandingkan dengan tanggung jawab yang dipertanyakan kepada Amerika Serikat; kerusakan macam apa lagi yang terjadi karena sanksi yang harus dipersembahkan buat kebijakan Amerika Serikat?

MINYAK UNTUK PANGAN

Mungkin, hal paling menarik untuk dicatat tentang sanksi adalah penundaan panjang yang terjadi sebelum

akhirnya Irak diizinkan untuk menjual minyaknya, yang merupakan satu-satunya sumber pendapatan paling berarti bagi Irak. Dibutuhkan empat tahun sampai ditetapkannya UNSCR 986, lima tahun berikutnya sampai Irak menyetujuinya, dan lima setengah tahun lagi sampai penjualan minyak dimulai. Karena Amerika Serikat kelihatannya punya keinginan untuk membolehkan penjualan minyak tersebut sedari dini (15 Agustus 1991), yaitu dengan keluarnya UNSCR 706, maka tampaklah jika terjadinya penundaan ini merupakan kesalahan harus ditimpakan kepada Saddam Hussein sepenuhnya, yang diam saja menonton rakyatnya mati kelaparan selama bertahun-tahun sementara dia memaksakan hak prerogatifnya.

Sebenarnya, ceritanya agak berbeda.

Pada bulan Juli 1991, Sadruddin Aga Khan, yang dikirim ke Irak oleh Sekretaris Jendral PBB, memperkirakan akan diperlukan dana sebesar $22 milyar untuk mengembalikan kondisi sektor dasar Irak kembali ke kondisi sebelum perang. Karena angka perkiraan ini lebih banyak daripada penjualan minyak yang mungkin diperbolehkan bagi Irak, dia menyiapkan angka perkiraan minimumnya menjadi sejumlah $6.9 milyar bagi restorasi sepenuhnya di sektor kesehatan dan pertanian, setengah dari kapasitas tenaga listrik, 40 persen dari fasilitas air dan sanitasi, penyediaan sejumlah bahan pangan ke taraf yang mencukupi, dan perbaikan kecil-kecilan kerusakan fasilitas produksi minyak di bagian utara Irak. Kemudian dia menyarankan agar Irak diperkenankan untuk menjual minyaknya setara $2.65 milyar selama empat bulan; dengan permintaan untuk diperbaharui jika tidak bermasalah.[93)]

Ketika proposal ini didiskusikan di Dewan Keamanan, Amerika Serikat menuntut agar periodenya dipanjangkan menjadi enam bulan, dan jumlahnya dikurangi menjadi $1.6 milyar, ditambah lagi syarat lainnya yang menyatakan agar 30 persen dari hasil penjualan tadi dialokasikan buat Dana Kompensasi PBB. Akhirnya, ketika proposal tersebut disetujui, jumlah yang tersedia bagi kebutuhan dasar masyarakat Irak tinggal sejumlah $930 juta untuk enam bulan—per bulannya cuma 23 persen dari apa yang disarankan oleh Aga Khan sebagai patokan angka minimum.

Jadi, tidak mengejutkan ketika pemerintahan Irak menolak hitung-hitungan yang tidak memadai ini bagi biaya keperluan minimal populasinya. Belum lagi, jika Irak menimbang keterikatannya pada banyak kondisi yang diisyaratkan oleh proposal ini yang kemungkinan besar bisa merugikan Irak di masa depan, serta akan menyebabkan berkurangnya tekanan politis yang memungkinkan terjadinya persetujuan bagi angka penjualan minyak yang lebih tinggi nantinya. Seorang staf lembaga bantuan yang menjadi pengamat dari proses ini bahkan berkomentar pada pekan-pekan terbitnya laporan Aga Khan, "Pejabat PBB merasa yakin... bahwa maksud proposal ini adalah memberikan Saddam Hussein sebuah paket yang sangat tidak menarik sehingga Irak akan menolak dan karenanya akan dipersalahkan, setidaknya di mata Barat, karena membiarkan penderitaan bagi rakyatnya tetap berlangsung."[94)]

Di akhir tahun 1994, dengan persediaan uang yang menipis, pemerintah Irak mengumumkan pemotongan jatah bahan pangan sebesar 37 persen, menjadi di bawah

1.100 kalori per orang per hari—senilai dengan ambang batas tingkat kelaparan.[95] Dengan kondisi yang makin memburuk selama tahun 1995, Irak akhirnya terpaksa harus menerima Resolusi 986, yang membolehkan penjualan minyak senilai $2 milyar setiap enam bulan. Irak dipaksa harus menyerah, menerima pelanggaran serius atas kedaulatannya dan hal-hal yang belakangan berbalik menjadi penyebab kelumpuhan perekonomiannya sebagai balasan dari tingkat penjualan minyak yang diizinkan, yang jumlahnya sangat-sangat tidak memadai.

Akhirnya, Amerika Serikat menyetujui resolusi hanya karena tekanan politis internasional yang kalau tidak ditanggapi bisa jadi malah akan mengarah pada berakhirnya sanksi—seperti yang diucapkan oleh seorang pejabat pemerintahan Clinton, Robert Pelletreau, di hadapan Komite Kongres saat itu, "Implementasi resolusi bukanlah satu pertanda yang mengarah kepada pencabutan sanksi. Hal itu adalah sebuah pengecualian atas dasar prikemanusiaan yang melanggengkan dan bahkan memperkuat keberlangsungan sanksi."[96]

Seseorang bisa saja bertahan dengan pendapatnya bahwa pemerintahan Irak seharusnya menerima tawaran OFF dari sejak awal betapapun jeleknya tawaran tersebut karena krisis kemanusian telah mencapai ambang yang begitu akut sementara masalah-masalah lain bisa dirundingkan belakangan. Akan tetapi, untuk bisa mengklaim dirinya, seperti Madeleine Albright, bahwa Amerika Serikat punya rasa keprihatinan dan prikemanusiaan yang mendalam terhadap warga Irak daripada pemerintahan Irak sendiri adalah suatu pemutarbalikan kebenaran yang sangat memalukan.

PENAHANAN

Tak ada hal yang begitu jelas memperlihatkan politisasi Amerika Serikat pada urusan kemanusiaan dan kurangnya keprihatinan bagi rakyat Irak lebih baik dari apa yang dibuktikan dari sejarah penahanan, penundaan, dan veto. Kalimat berikut ini, saya sarikan sepenuhnya dari sebuah artikel yang ditulis Joy Gordon, yang disiarkan di *Harper's* edisi November 2002.

Resolusi UNSCR 687 itu sendiri, kendati tidak memberi arahan tentang kepemilikan peralatan militer konvensional Irak, tetapi memberi batasan bagi impor peralatan militer. Secara teoretis, barang yang punya potensi "bermanfaat ganda," yaitu bisa dipakai oleh warga sipil ataupun militer, harus ditinjau dan ditangani dengan lebih teliti lagi, dengan memantau terus penggunaan akhirnya; dalam pelaksanaannya, Amerika Serikat dengan seenaknya melarang sebagian besar jenis barang-barang yang bermanfaat ganda serupa ini. Mereka pun meluaskan definisinya. Selama sanksi berjalan, Amerika Serikat sering kali mengikuti kebijakan tak tertulis untuk melarang barang-barang yang menjadi input bagi perindustrian, yang diperlukan untuk menghidupkan kembali perekonomian Irak, tetapi mengizinkan masuknya barang-barang jadi untuk keperluan konsumsi—sebuah pola hubungan perekonomian yang lazim digunakan dalam penjajahan.[97)]

Penyelidikan Gordon menghabiskan waktu selama berlangsungnya sanksi dan melibatkan sejumlah sumber-sumber yang dekat dengan proses ini; mereka mengarah pada satu kesimpulan bahwa Amerika Serikat selama dasawarsa terakhir ini menggunakan segala cara secara

agresif dan disengaja untuk meminimumkan barang-barang kebutuhan dasar manusia yang masuk ke Irak."[98]

Amerika Serikat menjatuhkan lebih dari 1.000 penahanan atas perjanjian, diikuti oleh Inggris dengan lebih dari 100. Menurut Gordon:

Pada periode awal tahun 2001, Amerika Serikat menahan senilai $280 juta dalam bentuk suplai obat-obatan, termasuk vaksin untuk pengobatan hepatitis, tetanus, dan dipteri pada bayi, begitu pula dengan inkubator dan peralatan jantung.

Dasar pemikirannya adalah karena vaksin mengandung kultur hayati, kendati sudah sangat dipasifkan. Pemerintah Irak, alasannya, mampu mengekstrak kultur hayati ini, dan pada akhirnya mengembang biakkan jenis virus yang mematikan, dan kemudian secara efektif menyebarkan dengan menggunakan rudal atau sistem pengangkut lainnya.

UNICEF dan badan kesehatan PBB, bersama para anggota Dewan Keamanan lain, menolak keras dugaan itu. Seorang ahli persenjataan biologis asal Eropa mengatakan bahwa cara di atas adalah hal yang mustahil dilaksanakan. Pada waktu itu pula, dengan terjadinya wabah besar-besaran yang melanda Irak, dan angka tingkat kematian anak yang meroket, adalah suatu hal yang pasti bahwa mencegah vaksin bagi anak-anak masuk ke Irak akan menambah tingkat kematian bayi dan anak-anak.[99]

Amerika Serikat melunak hanya setelah *Washington Post* menuturkan kondisi dan situasi yang sesungguhnya. Tetapi berikutnya, pada tanggal 30 Desember 2002, dengan lulusnya UNSCR 1454, Amerika Serikat sekali lagi memasukkan beberapa antibiotik dasar, termasuk

streptomisin, ke dalam daftar barang yang harus ditinjau jika kuantitas dalam kontraknya "melebihi tingkat konsumsi wajar." Padahal, obat-obatan semacam itu telah lama menjadi barang langka di Irak.

Ada pula masalah lain yang terjadi begitu seringnya sampai-sampai mendapat sebutan khusus: "barang komplementer." Amerika Serikat dengan sangat selektif memberi persetujuan pada kontrak atau perjanjian dalam cara yang begitu rupa sehingga Irak memperoleh insulin tanpa jarum suntik, kantong darah tanpa kateter—bahkan fasilitas penjernihan air buangan tanpa generator yang dibutuhkan untuk menjalankannya.[100)] Berkebalikan dari maksud tujuannya, Irak akhirnya cuma membuang uang pada barang-barang yang tak berguna, yang ujung-ujungnya ditumpuk begitu saja di gudang-gudang, sehingga bisa dibilang ke mana-mana bahwa kerja pemerintah Irak cuma "menimbun" barang-barang saja.

Penahanan pun dipakai juga terhadap seluruh kebutuhan sektor prasarana. Menurut Gordon, sebagian besar kontrak yang berhubungan dengan pembangkit tenaga listrik dan telekomunikasi diblokir oleh Amerika Serikat.

Kasus penyediaan air yang dapat diminum mungkin merupakan satu keprihatinan terbesar atas kemanusiaan sejak akhir dekade '90-an (sebagaimana kasus bahan pangan yang terjadi selama beberapa tahun pertama penetapan sanksi). Fasilitas penjernihan air buangan milik Irak yang sebelumnya berjalan dengan baik, pada tahun 1996 rusak total. Ini terjadi karena kerusakan yang ditimbulkan oleh Perang Teluk (termasuk pengeboman sistematis terhadap semua pembangkit tenaga listrik, yang menyebabkan penjernihan air tersebut tutup), dan

disebabkan karena setelah Perang Teluk niat Irak untuk memperbaikinya terhalang oleh adanya sanksi. Setelah lima tahun program Minyak bagi Pangan, UNICEF mendapati akses rakyat akan air minum hanya sedikit membaik. UNICEF "secara khusus menunjuk pada kontrak bernilai setengah milyar dolar buat program pengadaan air bersih dan sanitasi yang belakangan diblokir—sepertiga dari total jumlah yang diajukan."[101]

Amerika Serikat bahkan tidak bisa menolak klaim yang memperlihatkan keburukannya ketika Amerika Serikat dengan sengaja menutup segala kemungkinan bagi Irak untuk dapat memperbaiki fasilitas penjernihan airnya. Sejumlah dokumen rahasia yang belakangan terungkap, termasuk laporan dari Defense Intelligence Agency (sebuah badan intelejen Departemen Pertahanan) berjudul "Kerentanan Fasilitas Penjernihan Air Irak" yang beredar di pos-pos komando sekutu sehari setelah pengeboman dimulai pada tahun 1991, memperlihatkan bahwa virus yang ada di dalam sistem air Irak yang diikuti oleh merebaknya wabah penyakit yang disebarkan lewat air secara eksplisit pernah diantisipasi sebelumnya.[102]

Penahanan secara eksplisit juga dipolitiskan. Pada bulan Juni 2001, ketika Amerika Serikat memaksakan berlakunya versi awal dari proposal "sanksi yang bijak" (sebentuk turunannya yang sangat berbeda belakangan dimasukkan ke dalam butir-butir UNSCR 1409), tiba-tiba ia mencabut kontrak senilai $800 juta yang ditahan, $200 juta dari kontrak itu melibatkan negara-negara yang menjadi anggota utama Dewan Keamanan. Untuk mengambil hati Cina, beberapa minggu kemudian Amerika Serikat membuka pemblokiran kontrak Irak

dengan Cina senilai $80 juta, termasuk di dalamnya beberapa kasus pemblokiran atas barang-barang bermanfaat ganda (yang biasanya dipakai sebagai alasan penahanannya). Setelah terlihat indikasi bahwa Rusia akan memveto draft resolusi, Amerika Serikat menahan hampir semua kontrak yang dibuat Irak dengan perusahaan-perusahaan Rusia."[103] Kelakuan seperti itu membuat olok-olok atas klaim yang menyatakan bahwa penahanan dilakukan atas dasar keamanan. Rakyat Irak menderita secara langsung sebagai hasil dari permainan politis Amerika Serikat.

SANKSI DAN STRUKTUR SOSIAL IRAK

Amerika Serikat, yang bersama-sama para sekutunya mengatur Irak selama sanksi, melihat terjadinya penurunan tingkat melek huruf, karena banyak sekolah dasar yang kosong disebabkan kelangkaan media bantu dan karena Irak terpaksa harus mengenakan biaya sekolah. Amerika Serikat melihat kehancuran yang hampir menyeluruh terjadi pada kelas menengah Irak dan kelangkaan para teknokrat secara besar-besaran. Ini disebabkan para doktor, ilmuwan, insinyur, dan mereka-mereka yang diperlukan rakyat lari ke Barat. Masyarakat Irak memberi kita gambaran tipikal yang menjadi ciri negara-negara Dunia Ketiga, ditambah lagi dengan evolusi ke arah negara korup yang begitu fenomenal serta kelas elit yang begitu kaya dan mewah sementara rakyatnya mengemis di jalan-jalan untuk mendapatkan sepotong roti.

Memang benar Saddam Hussein membangun banyak istana dan lebih mementingkan diri dalam melanggengkan kekuasaan dan militer daripada menye-

jahterakan rakyat Irak. Dan hal ini diketahui benar oleh Amerika Serikat ketika mendukungnya naik ke puncak kekuasaan di tahun 1980-an. Sanksi yang diterapkannya ini membuat rakyat Irak harus meminta belas kasihan pemerintah karena perekonomian lokal telah hancur dan seluruh barang yang dibutuhkan datang melalui pemerintah. Amerika Serikat tidak pernah menjelaskan logika di balik penderitaan yang harus ditanggung warga Irak untuk membuat Saddam Hussein mengubah kebijakannya sementara secara simultan mengklaim dirinya tidak peduli dengan penderitaan itu. Ini jelas-jelas merupakan resep bagi kebuntuan, sementara rakyat mati kelaparan.

Sanksi terhadap Irak adalah sebuah bentuk kontrol perekonomian lebih jauh dari apa yang pernah diimpikan oleh banyak ekonom IMF (kendati mereka bicara tentang "pasar bebas," apa yang sesungguhnya mereka inginkan adalah negara-negara yang perekonomiannya diawasi begitu ketat bagi kemaslahatan perusahaan-perusahaan asing). Dalam kasus lain, suatu negara ditekan untuk memotong anggaran pemerintahannya. Sementara, hasil minyak Irak disita begitu saja dan ditaruh di rekening bank asing sehingga mereka sama sekali tidak bisa menggunakannya untuk membayar gaji pegawai pemerintahannya. Negara-negara lain dianjurkan membeli dari perusahaan-perusahaan asing (melalui pemotongan tarif dan metode lainnya)—pendapatan Irak dari penjualan minyaknya hanya boleh dipakai untuk membeli dari perusahaan-perusahaan asing saja, atau dananya cuma dibiarkan tergeletak di bank, yang tak akan tersentuh tangan Irak.

Kontrol eksternal terhadap uang minyak Irak ini berkonotasi lengkapnya keruntuhan perekonomian negaranya—pemerintah Irak tidak bisa mempekerjakan kontraktor lokal atau membayar gaji dengan uang minyak tersebut, dan tidak ada satu jenis pun investasi yang bisa dilakukan. Pemerintah Irak juga harus membayar dengan harga tinggi atas pembelian bahan pangannya jika dibandingkan dengan membeli hasil pertanian rakyatnya sendiri, hal-hal yang menyebabkan semakin cepatnya dana menipis dan memusnahkan pasar pertanian dalam negeri.

Problem struktural yang mendasar ini masih saja berlangsung, kendati secara resmi pembatasan ragam barang yang boleh diimpor telah dilonggarkan—yang pertama karena ditetapkannya UNSCR 1284 pada bulan Desember 1999, yang memberi mandat pembuatan "daftar hijau" yang berisi jenis-jenis barang yang secara otomatis boleh disetujui untuk diimpor; ditambah lagi, berikutnya pada bulan Mei 2002, dengan lulusnya UNSCR 1409, yang menyatakan persetujuan otomatis atas segala barang kecuali yang termasuk "daftar merah." Meminjam frase yang dipakai oleh *Economist* merujuk proposal awal "sanksi yang bijak," resolusi-resolusi tersebut merupakan "sebutir aspirin padahal dibutuhkan tindakan bedah."[104)]

Seperti yang dilaporkan Kofi Annan, Minyak bagi Pangan" tidak pernah dimaksudkan... untuk menjadi pengganti aktivitas perekonomian yang normal."[105)] Dan, menurut Human Rights Watch (lembaga Pengamat Hak-hak Asasi Manusia)," program bantuan komoditi darurat seperti Minyak bagi Pangan, bagaimana pun baik pelaksanaan dan pendanaannya, tidak bisa menggantikan

kondisi yang rusak sebagai konsekuensi perang dan kemudian waktu sepuluh tahun atas terhentinya perekonomian Irak."[106]

Selain hancurnya fungsi perekonomian karena berlangsungnya sanksi, pembelian dan distribusi yang memusat atas seluruh kebutuhan masyarakat telah menjadi beban yang tak kuat lagi ditanggung oleh birokrasi Irak. Pada tahun 2000 sampai 2001, ketika sejumlah uang yang lebih besar datang dari program OFF, Sekretaris Jendral melaporkan bahwa "dengan meningkatnya tingkat pendanaan dan meluasnya cakupan dan gaung program ini, seluruh proses persiapan dan persetujuan rencana distribusi serta daftar berbagai barang, yang selama ini telah memakan waktu dan merupakan hal yang membosankan, saat ini tidak lagi menjadi kendala."[107]

Sanksi juga menyebabkan jatuhnya mata uang Irak. Nilai tukar resmi, aslinya, dijaga pada angka 0,311 dinar per 1 dolar; sanksi menyebabkan runtuhnya nilai tukar menjadi 2.000 dinar untuk 1 dolarnya pada tahun 2002. Sebagai hasil, pegawai sipil senior hanya bergaji $5 sampai $10 per bulan dan bahkan pejabat pemerintah yang terampil pun tak mampu lagi menyokong diri mereka tanpa pekerjaan tambahan.

Bahkan tanpa mengukur pengaruh manipulasi politis yang ditimbulkan oleh tindakan penahanan, pengawasan eksternal yang dilakukan terhadap perekonomian Irak sendiri saja sudah merupakan biang kehancuran. Karenanyalah Irak tidak mampu dibangun oleh beragam upaya rakyatnya sendiri, dan bahkan mengarah kepada pembusukan yang progresif di sejumlah aspek penting. Ringkasnya, tidak ada yang lebih buruk lagi daripada

pemaksaan larangan pedagangan yang dijatuhkan terhadap Irak dan "perdagangan bebas" yang dibebankan terhadap sebagian besar negara-negara lain di dunia saat ini, tetapi sesungguhnya hasilnya amat serupa karena faktor yang sama yang ada di dalam kedua kejadian ini—pengawasan Dunia Pertama terhadap, atau pengaruhnya atas, perekonomian Dunia Ketiga.

ZONA LARANGAN TERBANG DAN PEMBOMAN

Komponen ketiga "pengucilan" adalah "zona larangan terbang" dan pengeboman yang berkali-kali dilakukan karenanya. Amerika Serikat dan Inggris secara bersama-sama berpatroli di zona larangan terbang belahan utara Irak di atas garis 36 derajat Lintang Utara serta zona larangan terbang bagian selatan di atas garis 36 derajat Lintang Utara (Prancis mengundurkan diri dari keanggotaan pasukan bersama pada tahun 1996). Zona bagian utara ditetapkan pada bulan April 1991, yang pada garis besarnya adalah karena kemarahan dunia internasional atas terjadinya pembantaian pengungsi Kurdi di utara Irak—Amerika Serikat telah, sebagaimana disebut di atas, membiarkan peristiwa pembantaian orang Kurdi dan generasi jutaan pengungsi dengan pongahnya sampai suatu saat ketika gambaran yang tidak menyenangkan tersebut mulai terlihat di layar kaca para pemirsa Barat. Zona larangan terbang bagian selatan tidak ditetapkan sampai bulan Agustus 1992, walaupun pembantaian orang-orang Syi'ah setelah Perang Teluk tidak kalah menakutkan.

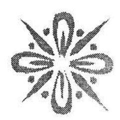
Amerika Serikat kadangkala mengklaim zona ini adalah hasil dari wewenang UNSCR 688, akan tetapi hal itu jelas-jelas keliru. UNSCR 688 bukanlah berbentuk resolusi Bab VII, yang berarti tidak memiliki wewenang atas penggunaan kekuatan bersenjata, dan resolusi ini tidak menyatakan penetapan zona larangan terbang—alasan terdekatnya adalah seruan terhadap para negara anggota untuk menyumbangkan "beragam upaya bantuan kemanusiaan." Penetapan zona larangan terbang sesungguhnya adalah tindakan yang tidak sah menurut hukum.

Setelah operasi pengeboman Rubah Gurun, zona larangan terbang sering dijadikan ajang konfrontasi. Meriam anti pesawat terbang Irak akan "menerangi" tempat itu ataupun kadangkala menyerang pesawat-pesawat tempur Amerika dan Inggris, dan mereka akan dibalas dengan lontaran bom. Menurut Hans von Sponeck, mantan koordinator bantuan kemanusiaan PBB untuk Irak, pengeboman ini membunuh ratusan warga sipil Irak, dan sebagian besar dari mereka adalah mereka yang berasal dari kelompok-kelompok Kurdi dan Syi'ah, yang semestinya harus dilindungi oleh keberadaan zona-zona larangan terbang.

Bab 5

11 SEPTEMBER DAN DOKTRIN TINDAKAN PENCEGAHAN:

Dari Pisau Lipat sampai Senjata Pemusnah Massal



SEJAK RUNTUHYA kedua menara kembar, gelagat Amerika Serikat untuk memerangi Irak terlihat jelas dan hampir dapat dipastikan perang akan berlangsung. Siaran CBS News pada bulan September 2002 memperlihatkan tindakan Menteri Pertahanan Rumsfeld yang pada jam-jam terjadinya serangan langsung menelepon beberapa ajudannya untuk mencari berbagai jalan sehingga serangan tersebut tampak sebagai ulah Irak—"yang terbaik dalam waktu singkat. Pertimbangkanlah apakah memadai untuk sekaligus menunjuk hidung S.H. [Saddam Hussein]. Bukan hanya OBL [Osama bin Laden]"—yang bukan merupakan suatu pengungkapan bagi mereka yang telah lama meneliti kebijakan Amerika Serikat terhadap Irak. Dan tidaklah begitu mengejutkan melihat tindakan Rumsfeld yang tidak mau terlalu memikirkan apakah Irak memang sesungguhnya terlibat—"Bergerak serentak...telusuri semuanya...Yang ada hubungannya ataupun yang tidak."[108]

Pada permukaannya, paling tidak, serangan yang dilakukan oleh jaringan teroris tak bernegara yang mengancam dengan menggunakan pisau lipat tidak memperlihatkan bukti yang cukup *prima facie* bahwa Irak, ataupun mereka yang disebut Amerika Serikat sebagai "negara-negara jahat" lainnya, memang punya niat dan rencana jahat dengan menyerahkan senjata pemusnah massal kepada teroris ataupun memakainya sendiri untuk menyerang Amerika Serikat secara langsung. Loncatan logika ini, yang dipuja dan dibukukan pula di dalam dokumen Strategi Keamanan Nasional, terlihat sekali. Sebuah organisasi teroris nonnegara tidak bisa dihadang karena Amerika Serikat akan mengalami kesulitan atau bahkan kemustahilan untuk mengadakan serangan balik; hal ini sangat berbeda jika kasusnya adalah negara. Negara mana pun di dunia ini memiliki kemampuan militer yang inferior, bahkan sangat terbelakang, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, maka negara-negara tersebut akan hancur jika harus berhadapan langsung dengan serangan balik militer Amerika Serikat.

Jadi, serangkaian tipudaya ditambah lagi dengan pertemuan menarik antara berbagai peristiwa yang terjadi dengan perdebatan tentang peristiwa tersebut, merupakan faktor-faktor yang diperlukan untuk mempengaruhi pemahaman umum masyarakat.

Serangan antraks adalah komponen kunci dalam proses ini. Segera setelah kejadian serangan antraks ini, para komentator konservatif memanfaatkannya sebagai bukti bahwa Irak telah mengarahkan sasarannya kepada warga Amerika. Belakangan, terungkap asal jenis antraks ini adalah dari Amerika sendiri, dan kesimpulan yang

paling masuk akal memperlihatkan sumber dari amplop-amplop surat berisi antraks ini berasal dari seorang pegawai pemerintahan Amerika Serikat, sehingga masalah tadi ditutupi dengan diam-diam. Akan tetapi dampaknya yang besar telah terjadi—Irak beserta potensi ancaman teror biologis yang dibawanya telah muncul ke permukaan sebagai sebuah masalah yang mendesak. Fakta bahwa Amerika Serikat telah begitu maju dalam mengembangkan antraks menjadi senjata dan ada orang-orang Amerika yang terbunuh karena program persenjataan biologis terlarang miliknya sendiri, diabaikan begitu saja.[109)]

Sejak bulan November 2001, Menteri Muda Luar Negeri urusan Pengawasan Persenjataan, John Bolton berpatokan pada kejadian tadi, bersama tuduhan yang dilayangkan oleh masyarakat umum Amerika bahwa Irak, bersama Korea Utara, telah melanggar Konvensi tentang Persenjataan Biologis dan Racun (BTWC = Biological and Toxin Weapons Convention). Kemudian dia menghubung-hubungkan isu ini dengan tragedi 11 September melalui cara-cara standar yang biasa dilakukan Amerika: "Kami juga mengetahui bahwa Osama bin Laden menimbang upaya untuk mencari dan memiliki senjata pemusnah massal sebagai salah satu tugas sucinya... Kami merasa bahwa dia mampu melakukan percobaan untuk menghasilkan senjata biologis berkemampuan rendah, mungkin dengan bantuan satu negara tertentu."[110)] Padahal tidak satu pun bukti yang menunjukkan ada suatu negara yang memang membantu Al-Qaeda memperoleh senjata pemusnah massal berbentuk apa pun. Tidak pula terdapat bukti-bukti yang baru hingga harus dilakukan jumpa pers mendadak seperti ini

(pelanggaran yang dilakukan Irak sudah lama diketahui, setidaknya sejak tahun 1995).

Pada bulan Desember 2001, House International Affairs Committee (Dewan Komite Urusan Luar Negeri) menyelesaikan mata rantai ini, ketika mereka menyiapkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa penolakan Irak untuk mengizinkan para inspektur persenjataan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bisa masuk ke dalam fasilitas-fasilitas yang telah disebutkan dalam ketetapan Resolusi Dewan Keamanan 687 harus dipandang sebagai suatu aksi agresi terhadap Amerika Serikat dan sekutunya"—suatu tata bahasa yang baik sekali, menimbang bahwa kata "agresi" biasanya dipakai untuk menerangkan suatu tindakan yang melibatkan penyerangan sesungguhnya. Hanya karena aktivitas yang dilakukan oleh gerakan anti sanksi yang menghujani Komite dengan ratusan e-mail, sehingga Komite menarik kembali kata "tindakan agresi" dan menggantinya dengan "memperbesar ancaman." Akhirnya resolusi tersebut bisa diluluskan Dewan dengan perbandingan suara 393-12.

Panggung pertunjukan sudah berdiri dan siap menampilkan babak pendahuluan "doktrin tindakan pencegahan."

DOKTRIN TINDAKAN PENCEGAHAN

Khususnya pada musim panas dan awal musim gugur tahun 2002, doktrin tindakan pencegahan dimainkan sebagai retorika pembenaran utama atas perang terhadap Irak dan juga dalam beberapa kesempatan debat yang tidak lazim di antara elit politik. Dick Armey (seorang wakil Partai Republik dari Texas),

yang baru saja melayangkan dukungannya atas tindakan pembersihan etnis Palestina di wilayah pendudukan Israel,[111] melontarkan opininya pada bulan Agustus bahwa perang terhadap Irak—sesuai dengan doktrin—akan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional (kendati belakangan di bulan Oktober, dia memberi suara setuju sewaktu menetapkan resolusi untuk perang). Henry Kissinger berkomentar, "Bukanlah merupakan kepentingan nasional Amerika untuk menetapkan "tindakan pencegahan" sebagai sebuah prinsip universal yang bisa dipakai semua bangsa."[112] Bahkan pada suatu ketika, George Bush Sr. tampaknya hampir-hampir saja bertindak, dengan kecaman beruntun yang datang dari dua mantan Menteri Luar Negerinya, James Baker dan Lawrence Eagleburger, serta mantan penasehat keamanan nasionalnya, Brent Scowcroft.

Hanya sayangnya, perdebatan menjadi semakin kabur dibandingkan dengan banyaknya yang bisa diungkapkan melalui perdebatan itu. Kedua belah pihak pun malah semakin mengabaikan konteks sejarah kebijakan Amerika Serikat. Sebagai hasilnya, bahkan para pendukung gerakan anti perang pun mendapat banyak kesalahpahaman tentang perang ini.

Pertama, perihal beberapa definisi yang dipakai. "*Pre-emption* (tindakan pencegahan)" sesungguhnya adalah istilah yang keliru, yang diadopsi sehingga pemerintah bisa mengklaim bahwa doktrin ini telah menyucikan sejarah hukum internasional. Istilah tersebut dahulu dipakai untuk merujuk suatu situasi ketika musuh terlihat pasti akan mewujudkan niat agresifnya, telah mengumpulkan bala tentaranya, dan nyata-nyata hampir melakukan serangan. Dalam situasi seperti ini, hukum

internasional membolehkan negara yang akan diserang tersebut—sebelum benar-benar diserang—untuk menyerang terlebih dahulu. Kendati hukum internasional memberi jalan keluar lain buat pihak yang akan diserang, yaitu dengan mengajukan masalah tersebut ke depan Dewan Keamanan PBB terlebih dahulu jika waktunya memang masih memungkinkan.

Perang Enam Hari pada tahun 1967, ketika semua setuju bahwa pihak yang pertama memulainya adalah Israel, kadangkala dipertimbangkan sebagai contoh yang sah dari suatu tindakan pencegahan karena 'tampak' jelas dan semakin mendekat ancaman yang diperlihatkan oleh tentara Arab yang berkerumun di dekat perbatasan. Catatan sejarah memperlihatkan dengan pasti tidak begitu kejadiannya—faktanya, angkatan udara Mesir terlihat sangat tidak siap untuk menghadapi konflik sehingga sebagian besar pesawatnya hancur sebelum dapat diterbangkan. Cobalah bayangkan sebuah skenario berikut: Misalnya terjadi mobilisasi besar-besaran pasukan Amerika Serikat dan Inggris di Teluk Persia, terdapat pula pola serangan udara tertentu dan semakin meningkat terhadap Irak, serentetan retorika brutal, dan terjadi pula penolakan untuk bernegosiasi secara konsisten. Pada keadaan seperti itu, serangan Irak terhadap pasukan tersebut mungkin sekali akan dipandang sebagai tindakan pencegahan yang sah.

Ketika Bush bicara bahwa kita harus menyerang Irak karena besar kemungkinan mereka mempunyai senjata biologis atau kimia, atau mereka, di suatu saat nanti, akan memiliki persenjataan nuklir atau suatu sistem pengangkut yang bisa menjangkau sampai ke Amerika Serikat, walaupun mereka tidak membuat gerakan yang

bisa diartikan sebagai indikasi serangan terhadap Amerika Serikat, maka dia sedang menganjurkan apa yang biasanya dikenal sebagai perang preventif—yaitu perang yang pada intinya ditujukan untuk mencegah suatu negara agar tidak bisa memiliki perlengkapan dan persenjataan yang akan dipakainya buat menyerang negara yang lain. Karena alasan pembenaran di atas dapat dengan mudahnya digunakan oleh negara mana pun untuk menyerang sesamanya, maka sejak dahulu kalangan hukum internasional memandang perang preventif sepenuhnya haram untuk dilakukan.

Lebih dari itu, logika dasar doktrin ini juga sangat membingungkan—selama orang mengerti bahwa doktrin boleh digunakan oleh suatu negara terhadap negara lain kecuali terhadap Amerika Serikat yang punya hak imperial istimewa. Jika Negara A merasa Negara B akan menyerangnya dengan memakai alasan tindakan pencegahan, maka dari definisinya, Negara A boleh menyerang Negara B terlebih dahulu sebagai tindakan bela diri. Dengan doktrin ini, Irak punya hak yang lebih banyak dan lebih aman untuk menyerang Amerika Serikat daripada sebaliknya.

NSS berisi berbagai upaya keras Amerikat Serikat untuk memberi pembenaran doktrin ini, sebagian dengan cara mengklaim bahwa doktrin tersebut bersesuaian dengan interpretasi hukum internasional yang diterima banyak pihak, dan sebagian lagi oleh sebuah pernyataan bahwa "Amerika Serikat telah lama memiliki opsi penggunaan tindakan pencegahan untuk membalas bentuk-bentuk ancaman tertentu terhadap keamanan nasional kita."

Jika seseorang mengerti benar dan mengartikan "tindakan pencegahan" sebagai "agresi, terhadap pihak yang memperlihatkan nihil atau sedikit ancaman" dan "ancaman terhadap keamanan nasional kita" berarti "ancaman terhadap hegemoni Amerika Serikat atau kepentingan perusahaan Amerika Serikat," maka pernyataan di atas adalah benar-benar betul.

Diskusi tentang tindakan pencegahan cenderung untuk menyatukan dua masalah yang berbeda—pertama, apakah suatu intervensi bisa dipandang sebagai aksi agresi ataukah tidak; dan yang kedua, apa retorika pembenaran yang harus disiapkan sebagai alasan bagi intervensi.

Ketika Senator Mark Dayton (Partai Demokrat - Minnesota) menulis di kolom opini *Washington Post*, "menurut para peneliti Perpustakaan Kongres, Amerika Serikat selama 213 tahun sejarahnya tidak pernah meluncurkan serangan dalam bentuk tindakan pencegahan terhadap negara lain,"[113)] Dengan pernyataannya, dia jelas-jelas cuma mau memberi kesan bahwa perang Irak sekarang ini berbeda dari yang lain karena keseluruhan perang yang dilakukan Amerika Serikat sebelumnya dibenarkan sebagai respons terhadap serangan negara lain, sementara yang satu ini adalah suatu aksi agresi yang tak dapat dibenarkan. Memang banyak di antara pendukung gerakan anti perang yang mempercayai hal ini, yaitu Amerika Serikat tak pernah "yang menembak duluan;" yang merupakan disosiasi Perang Teluk ke-2 dari sejarah kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebelumnya, padahal hal ini cuma mencerminkan disosiasi sejarah yang pernah terjadi pada generasi sebelumnya, misalnya pada kasus Perang Vietnam.

Faktanya, perang terhadap Irak adalah kasus mutakhir dari serangkaian tindakan agresi yang pernah dijalankan oleh Amerika Serikat. Pada sebagian besar kejadiannya, tindakan pencegahan bukanlah pembenaran yang diumumkan. Di Panama, contohnya, Amerika Serikat mengklaim bahwa invasinya merupakan suatu tindakan pembelaan diri karena Panama adalah [salah-satu dari beberapa] tempat transit kapal-kapal pengangkut obat-obatan terlarang untuk memasuki Amerika Serikat. Alasan inilah yang menjadi dasar serangan Amerika Serikat—suatu doktrin yang bisa dipakai oleh hampir setiap negara untuk bisa menyerang yang lain. Di Vietnam, insiden Teluk Tonkin sepenuhnya memang direkayasa dan kemudian dimanfaatkan sebagai pembenaran bagi perang. Intervensi yang lain lagi, misalkan kudeta yang dijalankan CIA di Iran dan Guatemala tidak disiapkan pembenarannya, karena mereka memang merupakan operasi "tersamar," padahal terlihat sekali bahwa aksi tersebut merupakan agresi yang ilegal, dengan konsekuensi yang sangat merusak.

Signifikansi dari tindakan pencegahan sesungguhnya terletak pada perubahan retorika yang coba ditampilkan Amerika Serikat.

Bahkan bahasanya pun bukan yang baru digunakan. Sebagai contoh, pemerintahan Reagan mengklaim pengeboman atas Libya pada tahun 1986 sebagai "tindakan pencegahan karena pembelaan diri."

Jika kita kembali memandang terminologi tersebut di masa lampau, kita dapat melihat bahwa doktrin ini sejak dahulu telah diimpikan dalam sejumlah peristiwa. Sesungguhnya, walaupun alasan resmi pembenaran bagi intervensi semasa Perang Dingin adalah kepentingan kita

semua untuk menahan laju agresi komunis, kadangkala seseorang bisa melihat kesamaan logikanya dengan doktrin "tindakan pencegahan" yang kini ada. Ketika Reagan menyiapkan pembenaran dalam menciptakan dan menyokong gerilyawan Contra yang penuh darah di Nikaragua dengan menekankan bahwa Nikaragua hanyalah berjarak dua hari berkendaraan dari Harlingen, Texas, hanya satu cara yang bisa mengartikannya yaitu sebagai berikut: Telah lama kita mengenal rencana jahat Soviet untuk menghancurkan Amerika dari segi kemiliteran; gerakan pribumi seperti Sandinista boleh dipandang sebagai salah satu upaya Soviet untuk menciptakan basis di garis depan bagi operasi militernya terhadap Amerika Serikat; jadi, jikalau Amerika Serikat menghancurleburkan Nikaragua begitu saja, hal tersebut—sederhananya—adalah hanya sebuah upaya untuk mempertahankan diri terhadap serangan yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Kelihatannya memang konyol, akan tetapi cara inilah yang memang paling banyak dipakai sebagai alasan pembenaran serangkaian intervensi Amerika Serikat di masa Perang Dingin, yang diperuntukkan bagi konsumsi publik Amerika.

Contoh yang jelas lain—justru yang lebih relevan bagi keadaan sekarang—adalah pengembangan doktrin strategis bahwa kepemilikan senjata pemusnah massal saja dapat dijadikan alasan pembenaran bagi perang terhadap suatu negara. Hal ini merupakan perkembangan dari strategi standar yang menjadi patokan di dasawarsa 1990-an, yang bergeser dari kebijakan "atas dasar ancaman," yang berfokus pada niat negara-negara lainnya, ke arah pendekatan "atas dasar kemampuan,"

yakni jika suatu negara (kecuali, tentunya, sekutu dekatnya) telah memiliki kemampuan militer yang signifikan, maka mereka otomatis akan digolongkan sebagai ancaman.[114)] Karena alasan "kemampuan" saja tidak bisa mengungkap apa yang diniatkan atau direncanakan oleh suatu negara, maka serangan militer yang muncul dari pendekatan "atas dasar kemampuan" yang disebutkan di atas, serta khususnya yang berdasarkan pada alasan kepemilikan—baik yang betul memiliki ataupun yang hanya disangka memiliki—senjata pemusnah massal, akan secara otomatis masuk klasifikasi sebagai perang preventif dari negara tersebut.

Kendati telah dicobakan berkali-kali selama bertahun-tahun, konsep ini barulah sungguh-sungguh diluncurkan pada bulan Agustus 1998 yaitu yang ditandai dengan terjadinya pengeboman cabang pabrik farmasi El Shifa di Sudan dengan klaim bahwa mereka menghasilkan sejumlah senyawa kimia yang menjadi bahan penghasil senjata kimia. Belakangan, terjadi pula operasi Rubah Gurun di bulan Desember 1998. 'Senjata pemusnah massal-lah yang menjadi pembenaran atas kedua serangan tersebut, walaupun, sebagaimana sebelumnya telah kita diskusikan, dalam kenyataannya tidak ada satu pun yang benar-benar berurusan dengan 'senjata pemusnah massal'.

Apa yang baru dari "doktrin tindakan pencegahan" hanyalah kodifikasinya yang kini dipertegas gaungnya. Sementara, satu hal yang telah diperbuatnya adalah apa saja yang sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat dalam memantapkan pengaruhnya, serta menyediakan alasan yang masuk akal untuk mengklaim niat agresif dari wilayah tertentu dari suatu negara sebelum Amerika

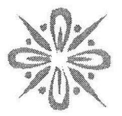
Serikat melakukan perang dengan negara tersebut. Terlepasnya retorika "pertahanan," baik sebagian atau pun seluruhnya, secara terbuka membuat dunia bisa melihat kebijakan Amerika Serikat luar dalamnya, dalam artian cara yang ditempuh Amerika Serikat kini tidak lain dan tidak bukan hanyalah memprovokasi pihak-pihak oposisinya.

Kodifikasi juga punya konsekuensi lain, yakni pengaruh yang nyata-nyata membuat gelisah kaum elit Amerika Serikat yang berpartisipasi dalam perdebatan ini. Mungkin hal yang paling jelas adalah, sebagaimana dicatat Kissinger, 'tindakan pencegahan' semakin beranjak ke arah universal sehingga akan mengancam klaim Amerika Serikat dalam memonopoli "legitimasi" penggunaan kekuatan bersenjata, yang selama ini banyak dia bagikan kepada Israel, Inggris, dan mungkin beberapa negara Eropa Barat. Jika Rusia boleh menyatakan klaim yang sama semisal hak untuk menginvasi Georgia, atau India menduduki Pakistan, maka Amerika Serikat harus turun dari statusnya sebagai "satu-satunya adidaya."

Secara simultan, dalam kasus Irak, keseluruhan perdebatan tentang istilah tindakan pencegahan di atas menjadi tidak relevan lagi karena begitu berlimpahnya alasan—tidak ada satu pun ancaman datang dari Irak yang harus diganjar dengan "tindakan pencegahan."

Bab 6

ANCAMAN DARI IRAK



PADA MUSIM SEMI tahun 2003, pernyataan Amerika Serikat bahwa perang diperlukan karena ancaman yang diperlihatkan Irak telah mencapai proporsi yang menggelikan dan mengandung kebohongan. Satu tuntutan yang sering dibuat AS, termasuk dalam Pidato Kenegaraan, adalah Irak pernah berupaya membeli uranium dari Nigeria. Ketika dokumen yang mendasari klaim di atas kemudian diserahkan kepada *International Atomic Energy Agency* (IAEA), mereka melihatnya sebagai suatu pemalsuan bukti yang keji. Beberapa kesalahan dokumen di atas antara lain adalah pencantuman nama yang keliru dari Menteri Luar Negeri Nigeria dan rujukannya pada konstitusi yang sudah kadaluarsa—informasi yang sebenarnya mudah didapat bahkan lewat pencarian informasi tersebut di internet saja.[115)] Hans Blix, kepala pemeriksa persenjataan, mencirikan kegagalan pemerintahan AS dalam mengungkap pemalsuan tadi sebagai "mengganggu."[116)]

Beberapa kekonyolan lain adalah dakwaan George W. Bush bahwa program pesawat udara tak berawak (UAV = *unmanned aerial vehicles*) Irak akan membawa ancaman bagi AS walaupun jarak yang memisahkan kedua negara ini adalah ratusan mil, dan ada samudra luas di antara Amerika Serikat dan Irak. Ketika UAV akhirnya terungkap, mereka terbukti hanya sedikit lebih baik daripada mainan anak-anak, dan tidak mampu mengangkut persenjataan yang berarti.

Terdapat juga kebohongan yang sama sekali palsu dan tidak ketinggalan pula permainan silat lidah Amerika Serikat. Setelah Irak mulai memusnahkan rudal Al-Samoud 2-nya, pada 3 Maret 2003, juru bicara pers Gedung Putih, Ari Fleischer menuturkan bahwa Saddam Hussein "menyangkal kepemilikan pesenjataannya, tetapi belakangan dia memberi pernyataan bahwa persenjataannya telah dihancurkan. Jika dia berbohong bahwa dia tidak pernah punya, bagaimana anda dapat mempercayainya ketika dia memberi pernyataan dia telah menghancurkannya?" Sesungguhnya, Irak telah menyerahkan berkas-berkas pernyataan tadi pada 7 Desember 2002, yang memberi indikasi bahwa Al-Samoud 2 telah melampaui jarak yang diizinkan yaitu lebih dari 150 km pada 13 dari 40 percobaan.

Belakangan terungkap pula bahwa seorang pengkhianat tingkat tinggi Irak Hussein Kamel (yang juga menantu Saddam) yang mengungkapkan beberapa rahasia program persenjataan Irak secara terus-menerus disebut sebagai "bukti" bahwa program pemeriksaan persenjataan tidak berjalan dengan efektif. Ia juga memberi pernyataan kepada UNSCOM bahwa Irak telah menghancurkan persenjataannya. "Saya telah meme-

rintahkan penghancuran keseluruhan senjata kimia. Semua persenjataan—biologis, kimia, rudal, nuklir—telah dihancurkan," ucapnya dalam wawancara sesaat sebelum kematiannya. Yang tersisa, tambahnya, hanyalah dokumentasi teknis dan cetak produksinya belaka.[117] Walaupun orang tidak bisa begitu saja mempercayai pernyataan ini, fakta menunjukkan bahwa pernyataan tadi ia sampaikan tanpa tekanan apa pun. Sementara, atas desakan AS, selama delapan tahun berjalan satu pernyataan Hussein Kamel diulang-ulang dimainkan sebagai bukti kongkret. Sedangkan pernyataannya yang lain disembunyikan AS. Satu perbuatan yang tidak adil dan tercela.

Amerika Serikat mati-matian mencoba untuk mengganggu jalannya pemeriksaan persenjataan. Sungguhpun Klausul 10 UNSCR 1441 tentang penetapan kembali pemeriksaan mengharuskan semua negara-negara anggota menyerahkan seluruh informasi yang relevan kepada tim inspektur persenjataan, Amerika Serikat menolak, sampai 5 Februari 2003, untuk menyerahkan setiap informasi yang dia peroleh dari penyadapan percakapan radio yang dilakukan secara ekstensif. Setelah AS mulai menyediakan informasi, para inspektur mengeluhkan informasi yang didapat dari AS mengarahkan mereka ke "rimba tak berarah" dan bahwa informasi yang diberikan hanyalah "sampah" belaka.[118]

Amerika Serikat juga berulah untuk mendangkalkan pemeriksaan dengan cara memberi pernyataan tidak akan menghentikan serangan militernya ke sana. Pernyataan ini pada dasarnya tidak menganggap kerjasama yang diberikan Irak. Ketika Hans Blix menerbitkan ultimatum tentang penghancuran rudal Al-Samoud 2 yang

diceritakan di atas, Pemerintahan Bush segera membalas dengan pernyataan bahwa perlucutan rudal, meski merupakan kondisi yang disyaratkan, tidaklah akan mengubah kondisi secara nyata. Segera setelah Irak menyetujui dan mematuhi perintah Blix, George W. Bush segera menyatakan bahwa perlucutan persenjatan Irak saja tidak mencukupi untuk mencegah terjadinya perang, dan bahwa "penggantian rezim" adalah merupakan hal yang diperlukan.[119)]

Tampaklah kebijakan Amerika Serikat sebelum perang cenderung memperlihatkan bahwa Amerika Serikat pun tidak mempercayai klaim yang digembar-gemborkannya sendiri tentang senjata pemusnah massal Irak, dan berniat melakukan cara apa pun untuk melencengkan kebenaran sehingga menutup semua kemungkinan berdamai dan mengarah kepada satu-satunya alternatif yang dikehendaki Amerika Serikat yaitu berperang.

Fakta bahwa Irak tidak memakai senjata pemusnah massalnya terhadap Amerika Serikat jelas memperlihatkan bahwa tidak ada ancaman yang datang dari Irak.

Jika memang Amerika Serikat benar-benar prihatin atas segala urusan tentang 'senjata pemusnah massal', tindakannya setelah "penggantian rezim" terlihat sangat mengherankan. Lokasi-lokasi yang diperkirakan menjadi tempat persembunyian persenjataan tersebut banyak sekali dibiarkan tidak terjaga selama berpekan-pekan. Padahal sebagian besar anggota pemeriksa persenjataan baru akan datang ke Irak pada akhir April 2003. Menimbang kondisi runtuhnya rezim Saddam Hussein akan memudahkan, bukan menyulitkan, bagi organisasi teroris untuk menyusup dan memperoleh akses yang

lebih mudah terhadap 'senjata pemusnah massal,' maka—sekali lagi—hanya satu yang dapat disimpulkan: Pemerintah Bush tidak mempercayai klaimnya sendiri.

Akhirnya, jika 'senjata pemusnah massal' memang akan ditemukan di Irak (dan karena pemerintahan Amerika Serikat telah menolak kembalinya para inspektur persenjataan PBB ke Irak, akan selalu jadi alasan yang baik untuk mengira bahwa setiap "temuan" tadi adalah hasil rekayasa Amerika Serikat) kasus tentang Saddam Hussein yang selama ini disebut telah mengambil sikap yang mengancam Amerika Serikat bahkan akan berkurang lebih jauh lagi. Jika Saddam Hussein tidak memakainya dalam kondisi yang paling kritis, yakni pada saat "penggantian rezim," mengapa pula dia disangka akan mengancam Amerika Serikat pada masa damai?

MAKSUD IRAK

Untuk mengevaluasi dan meninjau kembali kasus ancaman Irak kepada "Barat," kita harus membaginya ke dalam dua faktor, yaitu maksud atau niat dan kemampuan—hanya masalah kepemilikan persenjataan saja tidaklah langsung merupakan bukti atas niat untuk menyerang Amerika, walaupun para pemirsa setia acara Minggu pagi di TV bisa dimaafkan jika berpikiran sebaliknya. Di sini, "niat" tidak berarti kecenderungan hasrat hati, melainkan keinginan yang terkecil yang dihubung-hubungkan dengan tingkat kemampuan yang dapat dipercayai.

Dengan meninggalkan sebentar kecurigaan kita atas dugaan peran Irak dalam serangan 11 September, akan kita dapati ternyata tidak terdapat satu bukti pun yang

memperlihatkan niat Irak untuk menyerang dengan sasaran Amerika.

Menurut sebuah laporan yang dibuat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, *Patterns of Global Terrorism 2000*, "rezim tidak pernah berupaya untuk melakukan serangan teroris anti Barat sejak kegagalannya dalam merencanakan pembunuhan mantan Presiden Bush tahun 1993 di Kuwait."[120)] Bahkan pernyataan terakhir tersebut tidak dapat dipercayai berdasarkan penyelidikan seorang jurnalis Seymour Hersh yang menuliskannya dalam sebuah artikel pada tahun 1993. Bukti utama yang disebutkan pemerintahan Amerika Serikat adalah bahwa rancangan komponen alat pemicu bom tersebut menunjukkan berasal dari Irak. Hersh, sebaliknya, mewawancarai sejumlah pakar bom yang menyatakan komponen tesebut sesungguhnya adalah "barang produksi massal, biasanya dipakai untuk *walkie-talkie* dan model-model pesawat terbang serta mobil."[121)] Kasus lainnya serupa dan sama mengada-adanya.

Penuturan yang dilontarkan seorang penulis, Laurie Mylroie, Irak ada di balik pengeboman gedung WTC tahun 1993, pada garis besarnya didasarkan kepada analisis spekulatif identitas dari seseorang tersangkanya, bahkan sama-sekali tidak dipercayai oleh sejumlah analis pemerintahan Amerika Serikat sendiri.[122)] Sebaliknya, Saad Al-Bazzaz, pengkhianat double prase "tingkat tinggi", menyatakan bahwa pada dasawarsa 1980-an, Saddam Hussein membuat keputusan yang jelas dan tegas untuk tidak melakukan tindakan terorisme terhadap Barat.[123)]

Sementara Bush secara terus-menerus melontarkan keberadaan ancaman dari Irak, para pejabat intelejennya

sendiri menolak klaim tersebut. Direktur CIA, George Tenet, dalam sebuah suratnya kepada Kepala Komite Intelejen Senat, Bob Graham, mengatakan dengan pasti bahwa "Baghdad sekarang ini terlihat memiliki sedikit kekurangan untuk dapat melancarkan serangan teroris konvensional maupun serangan persenjataan kimia dan biologis terhadap Amerika Serikat." Bahkan, dalam komentarnya seputar kelemahan dari perang sebagai "tindakan pencegahan," dia menambahkan "Jika Saddam menyimpulkan bahwa serangan yang dipimpin Amerika Serikat tidak lagi dapat dicegah, maka kemungkinan besar dia tidak lagi dapat menahan diri untuk tidak meggunakan cara-cara terorisme."[124)]

Ancaman yang diklaim terakhir ini tidak pula terwujud, tetapi jika Amerika Serikat memang benar-benar percaya bahwa Irak memiliki sejumlah kemampuan 'senjata pemusnah massal' yang membahayakan, maka penilaian Tenet di atas bisa digunakan sebagai salah satu argumen untuk menentang tindakan perang. Fakta menunjukkan, betapa tidak berharganya kasus bagi perang terhadap Irak jika hanya didasarkan kepada tekanan, yang selama ini belum pernah terjadi, dari Pemerintahan Bush terhadap para bawahan mereka sendiri—termasuk di antaranya para pejabat CIA, FBI, dan Departemen Energi, untuk memodifikasi, bahkan memalsukan, berkas-berkas laporan sehingga mereka mau mendukung atasan-atasannya yang sejalan dengan arahan pemerintahan. Menurut Vincent Cannistraro, mantan kepala kontra-intelejen CIA, "Pada dasarnya, informasi yang sudah 'diolah kembali' kemudian dikirimkan ke tingkat atas untuk diumumkan dan

karenanya terdapat banyak ketidakpuasan di lingkungan di intelejen, terutama di antara sejumlah analis di CIA."[125]

Argumen yang biasa dijadikan alasan bahwa Irak berniat untuk melakukan serangan, di balik keinginan hati kecil Saddam Hussein untuk membalas kekalahannya setelah Perang Teluk, adalah sejarah yang diperlihatkan Irak sewaktu melakukan tindakan agresi regionalnya, dan terutama tindakan Saddam sendiri yang memakai senjata kimia "kepada rakyatnya sendiri." Pada intinya, kasus ini mengisahkan tindakan Irak sewaktu menggunakan senjata kimia terhadap suku Kurdi pada tahun 1988 di tengah-tengah berlangsungnya perang Iran-Irak, makanya belakangan, pada tahun 2003, Irak 'naik derajat' dengan statusnya yang baru sebagai rezim pelaku ancaman terhadap Amerika, yang harus ditindak dengan cara-cara memeranginya habis-habisan dan menggulingkan rezim pemerintahannya."

Dari fakta yang kita temukan dalam catatan sejarah, kesimpulan tadi ternyata jauh berbeda. Selama ini, Irak tercatat memakai senjata kimia tersebut pada dua macam kondisi. Yang pertama, terhadap militer Iran selama Perang Iran-Irak. Yang kedua, yang berhubungan dengan Perang Iran-Irak juga, terhadap Halabja dan segelintir kota-kota lainnya di bagian utara Irak, ketika banyak organisasi politik terkemuka suku Kurdi, yaitu KDP dan PUK, melawan Irak dan berpihak kepada Iran. Ini memang merupakan kejahatan perang, dan keinginan untuk memakai senjata kimia terhadap target yang kebanyakan merupakan warga sipil seperti kota Halabja adalah, mungkin sekali, merupakan kasus yang lebih kriminal lagi.

Akan tetapi, Amerika Serikat sepenuhnya mendukung Irak selama perang Iran-Irak. Amerika Serikat 'mengasuh' Irak sejak dini, pada tahun 1982, dengan menghilangkan Irak dari sebuah daftar milik Departemen Luar Negeri yang berisi negara atau lembaga yang menyokong terorisme internasional serta belakangan pada tahun 1984, dengan melakukan pemulihan sepenuhnya hubungan diplomatik antara kedua negara. Amerika Serikat bahkan sepenuhnya membiayai Irak selama dasawarsa 1980-an, dengan memberikan jaminan pinjaman senilai lebih dari 5 milyar dolar. Ditambah lagi dengan penyediaan sejumlah lebih dari 1,5 milyar dolar barang-barang ekspor yang sensitif bagi kebutuhan strategis, termasuk apa yang disebutkan di dalam laporan Komite Senat sebagai "bahan-bahan biologis ala ramuan penyihir."[126)] Amerika Serikat secara simultan meyediakan persenjataan untuk Iran, mengejar sasaran ganda yang bertujuan untuk mencoba menggerakkan kudeta militer di dalam negara itu dan membuat Irak dan Iran saling melancarkan serangan yang menghancurkan kedua negara tersebut (perkiraan angka korban yang meninggal dalam perang Iran-Irak mencapai sekitar 500.000 sampai 1 juta).[127)]

Pemerintahan Amerika Serikat terus melangsungkan penyediaan bantuan bagi Irak sebagaimana serangan terhadap rakyat Kurdi terus pula berjalan. Pemerintahan Amerika Serikat tetap menolak mosi dari Kongres untuk memberi kecaman terhadap tindakan keji Irak tersebut.[128)] Baru-baru ini, dari sebuah dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat yang sudah terungkap terlihat adanya indikasi bahwa intelejen Amerika Serikat sepenuhnya memahami Iraklah penjahatnya—dan,

menurut penuturan Joost Hilterman, dari *Human Rights Watch* (lembaga pengamat hak-hak asasi manusia), Departemen Luar Negeri menginstruksikan para diplomatnya untuk menyatakan bahwa Iran juga harus dipersalahkan"[129)] sembari mengabaikan rincian yang dapat memperlihatkan kekeliruan cerita di atas. Untuk mendukung upaya disinformasi ini, *Army War College* di Amerika Serikat menerbitkan sebuah laporan yang mengklaim bahwa Iran berada di balik serangan terhadap Halabja. Amerika Serikat juga memastikan agar Dewan Keamanan tidak mengambil tindakan yang berarti atas masalah itu.

Dengan kata lain, Irak memakai senjata kimianya hanya jika mereka yakin bahwa mereka telah mendapat persetujuan sepenuhnya dari adidaya Nomor Satu, dan memanfaatkannya dalam serangan terhadap kedua sasaran, suku Kurdi dan bangsa Iran, yang mereka ketahui betul bahwa hal tersebut kurang atau bahkan tidak dipedulikan oleh negara-negara adikuasa Barat. Kekejian Saddam Hussein yang paling berarti yang ketiga adalah penindasan berdarah terhadap pemberontakan Irak setelah masa Perang Teluk. Ini pun mereka lakukan dengan materi sokongan AS.

Invasi ke Kuwait, yang dipandang tidak menampilkan kekejaman yang lebih besar daripada yang sebelumnya, sedikit banyak punya arti yang mendua. Amerika Serikat dengan sengaja memberi kepada Saddam Hussein serangkaian pertanda bahwa Amerika Serikat tidak akan menentang ancaman serangan Irak dan, bahkan atas insiden pelanggaran perbatasan yang dilakukan Irak di bagian utara Kuwait. Pertanda-pertanda itu termasuk pula beberapa pernyataan dari pejabat

pemerintahan seperti Duta Besar untuk Irak, April Glaspie, juru bicara pers Gedung Putih, Margaret Tutwiler, dan Asisten Menteri Luar Negeri, James Kelly bahwa Amerika Serikat tidak merasa berkewajiban untuk melindungi Kuwait, bahkan mereka menyatakan bahwa Amerika Serikat "tidak punya opini" atas "perselisihan perbatasan Arab-Arab."[130)] Pada saat itu, Amerika Serikat bisa melihat adanya mobilisasi pasukan Irak di perbatasannya dengan Kuwait. Bisa jadi Saddam Hussein jika tidak yakin sepenuhnya dengan pertanda-pertanda yang jelas tersebut dan jika dia pun berpikir bahwa menduduki keseluruhan Kuwait merupakan tindakan yang kelewatan, maka dia mungkin akan menahan diri dan mengurungkan niatnya untuk menduduki Kuwait.

Kesemuanya ini memperlihatkan bahwa Irak menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukan tindakan agresi regionalnya tanpa persetujuan Sang Adidaya. Sementara, pada isu penyerangan Irak secara langsung kepada Sang Adidaya, bagi Irak tentunya hal tersebut lebih karena keterpaksaan belaka. Ketika Irak berada dalam serangan Perang Teluk, mereka tidak memakai senjata kimianya, apa pun jenisnya. Dan, bahkan, sewaktu berlangsungnya Perang Teluk II—suatu tindakan invasi untuk "penggantian rezim"—Irak juga tidak menggunakan persenjataan semacam itu.

Tidak ada suatu negara pun yang akan berani menyerang satu negara yang berkemampuan ribuan rudal balistik nuklir antarbenua yang bukan saja sanggup dan pernah digunakannya, tetapi, yang menakutkan lagi, secara eksplisit terkadang pula dipakainya sebagai modal untuk mengancam negara-negara lain, seperti terhadap Vietnam Utara pada tahun 1969[131)] dan sebelum Perang

Teluk I, dan dalam kondisi umum lainnya sebagaimana dijelaskan dalam *Nuclear Posture Review*. Bagi Irak, bahkan memberikan 'senjata pemusnah massal' kepada teroris bukanlah merupakan dasar untuk menghindarkan diri dari pembalasan AS. Bukan karena alasan bahwa pada akhirnya mereka akan terbukti, tapi oleh karena alasan yang sederhana, dengan atau tanpa bisa dibuktikan keterlibatannya *toh* Irak pula yang akan ditunjuk sebagai tertuduhnya.

Kenyataan tersebut tidak berubah pada 11 September 2001.

IRAK, AL-QAEDA, DAN TRAGEDI 11 SEPTEMBER

Sejak awal, dalam strategi gambit (yaitu mengorbankan bidak untuk mendapatkan kemenangan) yang dimainkan Amerika Serikat, upaya untuk "habis-habisan" terhadap Irak adalah untuk mengklaim bahwa mereka punya beberapa persekongkolan dengan Al-Qaeda atau bahkan Irak telah terlibat secara langsung dalam tragedi 11 September.

"Logika"-nya sederhana—orang-orang Arab Saudi dan Mesir terlibat di tragedi 11 September, jadi kita harus menyerang Afghanistan, Irak, dan kemudian mungkin Iran, Suriah, dan Libya. Taktik-taktik ini dipakainya secara langsung—lemparkan lumpur banyak-banyak dan kita bisa harapkan kemungkinan akan ada lumpur yang menempel. Cara ini berjalan dengan baiknya: walaupun Pemerintahan Bush tidak punya bukti apa pun yang memperlihatkan hubungan persekongkolan Irak dengan terorisme, tetapi semakin banyak pula mayoritas publik

yang mempercayai klaim tersebut. Demikianlah, menurut hasil beberapa pengumpulan pendapat, mayoritas rakyat Amerika percaya bahwa Irak terlibat dalam serangan 11 September.[132)]

Banyak tersedia alasan yang masuk akal untuk meragukan keterlibatan mata rantai antara Irak dan Al-Qaeda atau kelompok-kelompok Islam radikal lainnya. Al-Qaeda melihat, pemerintah Arab Saudi kurang mengajak rakyatnya memperdalam ajaran agamanya dan tindakan pemerintah Arab Saudi dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun tampak bagi kita Pemerintah Arab Saudi telah sebegitu ketatnya menerapkan ajaran agamanya, Al-Qaeda masih melihatnya terlalu lemah. Di lain pihak, Partai Ba'ath, pada awalnya adalah sebuah organisasi yang sangat agresif yang mengarah pada ajaran sekular. Kendati belakangan rezim Irak beralih dan memakai konteks agama sebagai faktor pemersatu setelah berakhirnya Perang Teluk, Al-Qaeda dan Osama bin Laden selalu memandang Ba'ath sebagai sekumpulan orang-orang kafir. Yang menarik lagi, bahkan kendati Gedung Putih terus-menerus menyatakan bahwa Saddam Hussein adalah berada dalam satu perahu dengan Al-Qaeda, pemerintah Amerika Serikat juga menerbitkan sebuah laporan yang berbunyi: "Para pakar mengetahui bahwa Saddam Hussein adalah seorang yang tanpa agama yang berasal dari sebuah partai yang sekular—bahkan ateis."[133)]

Klaim pemerintahan Amerika Serikat tentang kemungkinan hubungan antara Irak dan Al-Qaeda tidak pernah terbukti. Pada pertengahan bulan Februari 2003, Colin Powell, seorang anggota kabinet dalam Pemerintahan Bush yang layaknya paling dapat dipercaya,

menjatuhkan martabatnya sendiri ketika mengklaim bahwa rekaman pembicaraan bin Laden—yang berisi celaan dia atas perang terhadap Irak tetapi, sebaliknya, juga melecehkan pemerintahan Irak sebagai "sosialis" dan "orang-orang kafir" yang "telah kehilangan legitimasinya dari sejak jauh-jauh hari"—adalah paling tidak merupakan bukti bahwa bin Laden telah berkolusi dengan Pemerintah Irak.[134)]

Orang-orang bisa bilang bahwa Powell tidak akan membungkuk begitu rendahnya jikalau memang ada bukti yang sejati. Kini, marilah kita tinjau kembali dakwaan-dakwaan tersebut.

Pertama adalah klaim bahwa Mohammed Atta, pembajak pesawat terbang dan pemimpin operasi serangan 11 September pernah bertemu dengan Ahmed Al-Ani, seorang pejabat intelejen Irak di Praha pada bulan April 2001. Bahkan kalaupun ini benar, hal tersebut tidak merupakan bukti kongkret adanya keterlibatan Pemerintah Irak dalam tragedi 11 September—tugas utama intelejen Irak di Praha, dan tempat-tempat serupa lainnya, adalah mengawasi para pembangkang dan kelompok-kelompok oposisi Irak. Kendati demikian, sesungguhnya, rekaman dan catatan Amerika sendiri memperlihatkan bahwa Atta malah berada di Virginia Beach, Virginia, pada awal April, sewaktu katanya pertemuan yang diklaim di atas diselenggarakan. Bahkan Presiden Republik Ceko, Vaclav Havel, telah memberi pernyataan kepada para pejabat Amerika bahwa tidak ditemukan bukti atas adanya pertemuan semacam itu.[135)]

Klaim utama lainnya yang secara khusus disampaikan Powell di hadapan sidang Dewan Keamanan pada 5 Februari 2003, berurusan dengan Abu Musab Al-

Zarqawi, seorang militan dari Jordan yang rupanya terlibat dengan kelompok yang dikenal dengan nama Ansar Al-Islam yang memiliki markas besar di bagian utara Irak. Al-Zarqawi tidak terbukti memiliki hubungan yang jelas, baik dengan Al-Qaeda maupun dengan pemerintahan Irak, tetapi pemerintah Amerika Serikat memutarbalikkan logika dan menyulapnya sehingga dia tampak punya peranan sebagai penghubung di antara kedua pihak.

Satu-satunya koneksi yang terjadi antara Al-Zarqawi dan pemerintahan Irak adalah bahwa dia pernah mendapat perawatan medis di sebuah rumah sakit di Baghdad, sebuah indikasi yang sama sekali tidak bisa dipandang sebagai bukti kasak-kusuk tingkat tinggi yang mengaitkan Irak dengan serangan teroris anti-Amerika.[136)] Pimpinan Ansar Al-Islam, Mullah Krekar, menolak kemungkinan adanya hubungan di antara Ansar dan Al-Qaeda.[137)] Markas Ansar Al-Islam sendiri berada di Irak Utara, area yang berada di bawah kontrol kelompok-kelompok Kurdi pro-Amerika Serikat dan anti-Saddam Hussein, sehingga eksistensi mereka bukanlah merupakan alasan kuat untuk memulai perang dengan Irak.

Hampir bersamaan waktunya dengan klaim Powell di atas, datang pula laporan rahasia dari dinas intelejen Inggris yang menyimpulkan ketiadaan hubungan antara pemerintahan Irak dan Al-Qaeda, dan sesungguhnya setiap upaya untuk menciptakan hubungan di antara keduanya "runtuh di tengah jalan karena ketidaksepakatan dan jurang perbedaan ideologi."[138)] Sebelumnya, *Washington Post,* mengutip seorang "pejabat senior sebuah negara Eropa" yang tak disebut namanya,

yang menyatakan bahwa "laporan intelejen memberi indikasi bahwa Saddam Hussein secara pribadi menentang pemberian izin bagi bin Laden dan Al-Qaeda untuk menggunakan Irak sebagai pangkalannya karena dia kuatir mereka mungkin sekali akan menggoyang rezimnya."[139] Menurut Jean-Louis Bruguiere, seorang hakim dari Prancis yang menghabiskan waktu selama dua dasawarsa untuk menyelidiki teroris berbendera Islam dan teroris Timur Tengah, "Kami tidak menemukan adanya mata rantai di antara Irak dan Al-Qaeda. Dan kami telah meneliti 50 kasus yang melibatkan Al-Qaeda atau sel-sel radikal Islam lainnya. Saya pikir jika ada bukti terdapatnya mata rantai serupa itu, kami pasti telah menemukannya."[140]

Hal yang utama, argumen keberadaan mata rantai Irak dengan Al-Qaeda tersedia melalui diktum Menteri Pertahanan Rumsfeld yang terkenal, "ketiadaan bukti bukan berarti tidak terbukti."

PENYALURAN SENJATA PEMUSNAH MASSAL KEPADA TERORIS

Keprihatinan utama yang selalu didengungkan adalah bahwa Irak akan memberikan 'senjata pemusnah massal' kepada organisasi teroris tertentu—kemungkinan dari kalangan Islam. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, hal ini tidak akan membuat Irak terlepas dari tindakan pembalasan.

Lebih jauh lagi, Saddam Hussein memandang persenjataan kimia sebagai penjamin kestabilan rezimnya, yang menyelamatkannya pertama kali dari Iran dan yang

belakangan dari Amerika Serikat. Memberikan persenjataan dengan potensi sebegitu hebatnya kepada kelompok-kelompok yang tidak dapat sepenuhnya dia kontrol, terutama kelompok Islam yang dirasakan sebagai ancaman terhadap rezimnya, adalah hal yang gila, dari sudut pandangnya. Richard Butler, mantan kepala UNSCOM, menuturkan dalam kesaksiannya di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, "Saya tidak melihat adanya bukti yang menunjukkan Irak menyediakan [senjata pemusnah massal] kepada kelompok-kelompok teroris non-Irak. Saya mengira bahwa, khususnya menimbang aspek psikologi dan aspirasinya, Saddam akan enggan untuk berbagi dengan pihak lain apa yang dia percaya sebagai sumber kekuatannya yang tidak terhapuskan."[141)]

Faktanya, menurut *Australian Strategic Policy Institute* (Lembaga Kebijakan Strategis Australia), "Kecil kemungkinan Saddam Hussein merupakan sumber penyedia 'senjata pemusnah massal' bagi teroris" (Rusia dan Pakistan disebut-sebut lebih mungkin sebagai sumbernya), dan bahkan lebih penting lagi, "'senjata pemusnah massal' Irak adalah lebih mungkin tersedia bagi, dan sampai ke tangan, Al-Qaeda pada saat kerusuhan yang mungkin sekali akan terjadi setelah invasi Amerika Serikat, dibandingkan pada saat berada di bawah pengawasan ketat rezim Saddam Hussein sewaktu masih berkuasa."[142)] Jadi, bagi seseorang yang benar-benar prihatin tentang ancaman 'senjata pemusnah massal' yang bakal jatuh ke tangan organisasi teroris nonnegara, maka perang terhadap Irak bisa jadi merupakan perwujudan terburuk dari skenario yang tidak dikehendaki di atas.

SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Sebelum kita mendiskusikan senjata pemusnah massal Irak, satu hal yang hendaknya dicatat adalah bahwa frase "senjata pemusnah massal" itu sendiri menampilkan propaganda kemenangan bagi pemerintahan Amerika Serikat. Kemampuan persenjataan kimia yang digunakan Irak di medan pertempuran mempunyai daya penghancur yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan bom nuklir. Bahkan kekuatan persenjataan kimia Irak tidaklah lebih hebat daripada persenjataan konvensional Amerika Serikat yang secara berkala digunakan, misalkan seperti *daisy cutters*. (Amerika Serikat juga menggunakan persenjataan kimia, seperti 11 juta galon senyawa *Agent Orange* yang disemprotkan di atas medan Perang Vietnam.) Persenjataan biologis lebih menakutkan dalam kerangka dampaknya yang secara teoretis sangat hebat dan karena efek yang dengan mudah bisa menyebar lebih jauh dari yang dikehendaki penggunanya, akan tetapi mereka adalah yang paling ekstrim tingkat kesulitannya untuk efektif dibiakkan menjadi setingkat persenjataan.

Tidak ada orang di luar Irak yang tahu pasti bagaimana dan di mana persenjataan semacam itu berada, tetapi kita memang mengetahui bahwa tidak pernah ada satu negara lain yang telah mengalami perlakuan dari para pemeriksa persenjataan yang punya wewenang begitu besar, yang melakukan tugasnya dalam jangka waktu panjang, dengan frekuensi ketat, dan dirasakan mengganggu bagi Irak. Kini kita telah mengenal 'senjata pemusnah massal' Irak dengan lebih dekat dan lebih banyak daripada pengetahuan kita tentang persenjataan serupa milik negara lain, termasuk Amerika Serikat.

Analisis terbaik, yang didasarkan kepada beragam berkas dan dokumen yang resmi serta hasil dari para analis sendiri, yang mungkin sekali dimiliki Irak adalah "*Claims and Evaluations of Iraq's Proscribed Weapons*," oleh Dr. Glen Rangwala dari Cambridge University, tersedia di internet (diperbaharui secara berkala) pada http://middleeastreference.org.uk/Irakweapons.html. Sumber dari sebagian besar pernyataan di bawah dapat ditemukan dalam dokumen tesebut.

Amerika Serikat telah menyebarkan klaim tentang dugaan kemampuan 'senjata pemusnah massal' Irak. Hampir keseluruhannya telah disangkal, seperti klaim bahwa tabung aluminum berkualitas tinggi yang diimpor Irak untuk pemakaian di mesin sentrifugal; kesimpulan mutakhir yang dikatakan inspektur IAEA adalah: Irak mengklaim bahwa tabung tersebut digunakan untuk keperluan artileri konvensional, suatu klaim yang mungkin lebih mendekati kebenaran (walaupun impor dari barang tersebut merupakan pelanggaran atas UNSCR 687 dan resolusi yang berikutnya). Lebih dari itu, sejumlah klaim dilontarkan bahwa produksinya masih berlangsung di berbagai fasilitas atau pabrik-pabrik tua, seperti Al-Qaim dan Tuwaitha (nuklir) atau Al-Dawra. Dugaan tersebut langsung ditolak setelah kunjungan langsung dilakukan ke sana.

Beberapa kesimpulan utama bisa ditarik. Selama berlangsungnya pemeriksaan dari 1991-1998 (dan lebih banyak lagi baru-baru ini dari bulan November 2002 dan seterusnya), produksi 'senjata pemusnah massal' secara sembunyi-sembunyi adalah sebenarnya kemustahilan, dan bahkan Amerika Serikat sendiri tidak melontarkan klaimnya mengenai hal ini. Lebih jauh lagi,

mayoritas senyawa kimia dan biologis yang mungkin pernah dihasilkan Irak akan terdegradasi—termasuk, apalagi, persediaan antraks Irak, karena tidak ada bukti bahwa Irak telah menghasilkan dalam bentuk kering yang tahan lama, dan demikian pula kasusnya dengan racun botulinum. Senyawa *mustard* yang diletakkan dalam selongsong artileri mungkin merupakan pengecualian, tetapi dalam kuantitasnya yang tidak seberapa menjadikannya relatif tidak penting.

Sehubungan dengan senyawa kimia dan biologis, problemnya adalah: Irak tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan atas ketidakcocokan di antara sejumlah yang diperolehnya (angka ini adalah konstanta yang diketahui, karena penyuplai utamanya adalah perusahaan-perusahaan Jerman dan Amerika) dan apa yang mereka klaim telah dipakai dalam Perang Iran-Irak, ataupun hancur dalam serangan Perang Teluk, maupun yang memang secara sepihak dihancurkan. Jadi, perkiraan jumlah kimia senyawa yang mungkin ada, secara mudahnya, adalah angka maksimum dari ketidakcocokan itu sendiri, bukannya perkiraan yang mengandalkan pengetahuan dan analisis yang sebenarnya. Serupa dengan hal itu, perkiraan jumlah senyawa biologis adalah berdasar pada jumlah media tumbuh yang tidak bisa diperhitungkan jumlahnya, ditambah lagi dengan proyeksi yang tidak realistik atas laju pengoperasian peralatannya. Semasa operasi pembersihan pascaperang, dengan segera terlihat jelas bahwa angka-angka tadi, yang telah digembungkan dan digembar-gemborkan sana-sini, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan.

Rasa takut publik yang paling banyak dimanfaatkan dan dicecoki pemerintahan Bush, tentunya, adalah

bahwa Irak kemungkinan besar akan mampu mengembangkan persenjataan nuklir dalam waku dekat (walaupun, sebagaimana didiskusikan sebelumnya, Irak tidak akan mampu menggunakannya secara efektif untuk menyerang bangsa lain). Klaim yang berulang-ulang ditiupkan berbunyi: jika Irak memperoleh material berkemampuan fisi nuklir maka Irak akan mampu membuat bom dalam waktu enam bulan sampai setahun saja. Padahal, pernyataan tersebut merupakan pelecehan atas fakta bahwa justru memperoleh komponen fisi nuklir itulah yang lebih sulit daripada pembuatan bomnya sendiri—serta merupakan situasi yang paling mudah terdeteksi dan terhalangi hanya dengan pemantauan yang efektif. Irak tidak mungkin dapat membangun fasilitas pengayaan nuklirnya tanpa terdeteksi oleh emisi sinar gamma, dan upaya untuk mendapat uranium atau plutonium yang telah diaktifkan dari negara-negara lainnya adalah hal yang mudah untuk dipantau. Faktanya, jika saja para pemeriksa persenjataan diperkenankan untuk melanjutkan tugasnya, Mohammed El-Baradei memprediksi, IAEA merasa mampu hanya dalam beberapa bulan mendatang, dalam kondisi tertentu dan dengan kerjasama yang proaktif dan mencukupi dari pihak Irak, untuk dapat memastikan dengan sebenar-benarnya bahwa Irak tidak memiliki program persenjataan nuklir."[143)]

Dengan Hans Blix pun menyatakan kesiapannya, semakin jelaslah, yang dibutuhkan dan yang menjadi tujuan utamanya adalah sebuah kondisi gencatan senjata, agar para inspektur persenjataan ini diberi kesempatan lebih banyak untuk melanjutkan tugasnya. Sementara, tidak tersedia pembenaran atas alasan yang sering

dikemukakan Amerika Serikat, "waktunya sangat mendesak."

SUBVERSI AMERIKA SEKIKAT ATAS PELUCUTAN SENJATA INTERNASIONAL

Faktanya, kebijakan Amerika Serikat terhadap senjata pemusnah massal di seluruh dunia jelas-jelas tidak bertujuan pada perlucutan senjata. Beragam upaya "pelucutan senjata" di masa lampau oleh Amerika Serikat selalu terpusat pada suatu gagasan bahwa Amerika Serikat dan sekutu terdekatnya (dan segelintir rival yang tidak bisa dikontrolnya seperti Cina) merebut hak kepemilikan senjata pemusnah massal (nuklir, kimia, atau biologis) sebagai hak eksklusif mereka sendiri. Akan tetapi, bagi mereka-mereka yang berada di luar lingkaran tesebut, kepemilikannya merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral.

Sebuah perjanjian, *Nuclear Nonproliferation Treaty* (NPT = Perjanjian Perlucutan Persenjataan Nuklir) secara eksplisit menyandikan hal tersebut. Perjanjian yang dirancang sedemikian rupa sehingga lima negara (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Cina) dinyatakan sebagai negara-negara nuklir dan seluruh negara di luarnya adalah sebagai negara-negara non-nuklir permanen. Akan tetapi, Butir VI NPT, scara tegas menyatakan bahwa, sebagai tambahan atas dilakukannya penghentian "proliferasi horizontal," "proliferasi vertikal" musti dihentikan pula, dan negara-negara nuklir harus mengarahkan diri mereka menuju penghapusan persenjataan mereka secara permanen. Amerika Serikat secara konsisten mengabaikan Butir VI ini, dan melanjutkan

programnya selama lebih dari satu dasawarsa setelah diloloskannya NPT hingga meningkatkan kuantitas dan kualitas persenjataan nuklirnya; hasilnya, NPT kehilangan seluruh kredibilitasnya dan negara-negara Dunia Ketiga secara rutin mengeluhkan tentang standar ganda yang tersirat dari perjanjian tersebut. Sesungguhnya, jika Amerika Serikat tidak menjadi pihak pertama yang mendangkalkan NPT dan belakangan malah menghancurkan *Comprehensive Test Ban Treaty* (Perjanjian Larangan Percobaan Nuklir Komprehensif), maka besar kemungkinannya India, dan juga Pakistan, tidak akan memamerkan kemampuan persenjataan nuklirnya secara terbuka seperti yang kini terjadi.

Chemical Weapons Convention (CWC = Perjanjian tentang Persenjataan Kimia) malah jauh lebih baik. CWC menyediakan perlakuan yang setara bagi seluruh bangsa-bangsa, dan melarang keseluruhan kategori senjata kimia. Perjanjian ini juga memiliki prosedur pelaksanaan yang berarti—masing-masing penandatangan dapat menuntut "pemeriksaan atas keberatannya" terhadap negara lainnya. Amerika Serikat tidak meratifikasi perjanjian ini sampai tahun 1997, dan hanya bersedia memusnahkan seluruh persenjataan kimianya baru pada tahun 2008. Ketika Amerika Serikat akhirnya meratifikasi perjanjian ini, mereka memasukkan begitu banyak klausul pengecualian pemeriksaan, sehingga membuat ratifikasi, pada garis besarnya, menjadi tidak punya pengaruh lagi. Amerika Serikat juga secara rutin menggunakan dan bermaksud memakai senyawa kimia yang "tidak mematikan" (yang sering kali memakan korban), yang dilarang dalam perjanjian ini. Hal yang menarik adalah pada bulan Maret 2002, AS terpaksa

harus mencopot Jose Bustani dari tugasnya sebagai kepala *Organization for the Prevention of Chemical Weapons* (Organisasi Pelarangan Persenjataan Kimia) karena dia mencoba memasukkan Irak dalam CWC (menggiringnya ke arah pemeriksaan persenjataan kimia).[144)]

Amerika Serikat juga mengkompromikan upaya-upaya pengawasan persenjataan biologis dengan cara-cara mirip standar ganda. *Biological dan Toxin Weapons Convention* (Perjanjian tentang Persenjataan Biologis dan Racun), yang disebarluaskan pada tahun 1972, kini telah ditandatangani oleh 146 negara, tetapi sampai kini pun tidak mempunyai mekanisme pengawasan, sehingga beberapa penanda tangan, termasuk Uni Soviet, Irak, dan hampir pasti Amerika Serikat sendiri, melanggarnya. Pada tahun 1995, negara-negara memulai proses untuk mengembangkan protokol komprehensif seperti pada CWC, yang berpuncak pada draft persetujuan pada tahun 2001. Setelah bertahun-tahun melunakkan mekanisme penindakan, sebagian karena mekanisme membolehkan kepemilikan bahan-bahannya di tangan perusahaan-perusahaan bioteknologi, maka pada bulan Juli 2001, AS mengumumkan bahwa mereka tidak dapat mendukung mekanisme serupa ini, dan malahan merencanakan untuk mengandalkan diri dengan cara-cara spionase, persetujuan multilateral atas larangan atau pembatasan ekspornya bersama sekutu-sekutunya yang disebut sebagai Kelompok Australia, dan jika perlu menggunakan tindakan militer. Akhirnya pada Desember tahun itu juga, Pemerintahan Bush merancang sebuah tindakan yang memupuskan harapan akan berlakunya mekanisme pengawasannya.

Semua masalah yang terjadi karena beragam upaya ini bisa dikembalikan jika saja Amerika Serikat mau menyerahkan atau mengurangi persediaan senjata pemusnah massal miliknya. Akan tetapi, perang terhadap Irak, telah mengubah situasinya secara keseluruhan; sehingga perlucutan senjata adalah mustahil dalam waktu dekat. Sesungguhnya, harapan dari banyak negara-negara adalah sebuah mekanisme untuk memastikan agar AS tidak menyerang mereka di masa mendatang, sehingga bagi mereka proliferasi merupakan cara yang harus terlaksana sekarang juga.

Salah satu momentum yang paling muskil dan paling menggelikan di dunia pasca-11 September terjadi pada tanggal 9 April 2003, ketika John Bolton, Kepala Staf Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di bidang pengawasan persenjataan dan keamanan internasional, memakai Perang Irak sebagai peringatan bagi Iran, Suriah, dan Korea Utara: "Dengan menghormati masalah proliferasi senjata pemusnah massal di masa pascakonflik, kami punya harapan besar agar sejumlah rezim mau menarik pelajaran yang pantas dari Irak bahwa mengejar tujuan memiliki senjata pemusnah massal tidak lagi menjadi agenda nasionalnya."[145)]

Ini adalah pelajaran yang ganjil untuk dipetik hikmahnya, karena Irak jelas-jelas diserang karena tidak memiliki lagi mekanisme pertahanan diri, dan serangan terjadi ketika negara itu telah dilucuti persenjataannya, terutama setelah Irak memusnahkan rudal Al-Samoud 2. Maka, pelajaran yang bisa dipetik oleh negara-negara tersebut, dan bahkan semua negara Dunia Ketiga, adalah kebalikannya. Hal ini dinyatakan secara blak-blakan oleh Korea Utara: "Perang Irak memperlihatkan bahwa meng-

izinkan perlucutan persenjataan melalui rezim pemeriksa persenjataan tidak mampu mencegah terjadinya perang malah akan lebih memicunya. Ini menyiratkan bahwa penandatanganan perjanjian nonagresi dengan AS tidak akan membantu mencegah terjadinya perang."[146)]

KOREA UTARA DAN BERAKHIRNYA PELUCUTAN SENJATA INTERNASIONAL

Korea Utara adalah sebuah negara totalitariter lain yang dalam beberapa hal bahkan lebih buruk daripada Irak. Beberapa gerakan antiperang terdahulu malah menyatakan bahwa Korea Utara adalah satu negara jahat yang potensial membawa ancaman agresi, bahkan mungkin terhadap Amerika Serikat sendiri. Sesungguhnya, sebuah argumen mendasar tentang perang Irak adalah, "Korea Utara adalah jauh lebih besar ancamannya, jadi mengapa kita malah menyerang Irak?"

Sebenarnya, seluruh "krisis" Korea Utara dimulai pada akhir tahun 2002 ketika Korea Utara diduga memberi pengakuan kepada seorang pejabat Amerika Serikat bahwa mereka punya persenjataan nuklir (Korea Utara menyangkal hal tersebut) sebagai balasan atas kebijakan luar negeri pemerintahan Bush yang agresif.

Pada tahun 1994, ketika Korea Utara mengancam untuk menarik diri dari *Nuclear Nonproliferation Treaty* dan mulai membuat bom nuklir, pemerintahan Clinton mampu menarik mundur niat Korea Utara tersebut dan sampai pada suatu kesepakatan yang dikenal sebagai Kerangka Kesepakatan. Sebagai insentif bagi Korea Utara untuk tetap pada statusnya sebagai negara nonnuklir, Amerika Serikat dan negara-negara lainnya mengapalkan

bahan bakar minyak untuk keperluan Korea Utara, Amerika Serikat juga akan menyediakan dua sarana pembangkit listrik tenaga nuklir air ringan (*light-water nuclear reactor*) pada tahun 2003, dan Amerika Serikat menegaskan tidak akan mengarahkan serangan pertamanya terhadap Korea Utara. Karena kondisinya yang sangat memerlukan sumber-sumber energi dan juga tidak miliki dana yang memadai untuk membeli minyak di pasar dunia, Korea Utara memberi pernyataan bahwa mereka memang punya segelintir alternatif energi nuklir.

Setelah membuat persetujuan ini, Amerika Serikat melanggar komitmennya sendiri. Pada tahun 2003, bahkan rancangan pembangunan reaktor nuklir air ringan pun tidak terwujud. Dan yang lebih mengherankan lagi, Amerika Serikat tidak memberi penegasan kembali perihal terbebasnya Korea Utara dari tujuan serangan pertama persenjataan nuklirnya. Terutama—dan sekali lagi mengherankan—karena NPT, yang juga ditandatangani Amerika Serikat, secara eksplisit menyatakan bahwa negara-negara nuklir tidak boleh menggunakan persenjataan nuklirnya terhadap negara-negara non-nuklir. Sesungguhnya, lebih buruk daripada ini, sebagaimana disebut sebelumnya, Amerika Serikat telah secara eksplisit mempertimbangkan untuk menggunakan persenjataan nuklir terhadap Korea Utara di dalam skenario yang dirancangnya di *Nuclear Posture Review*. Dengan dimasukkan Korea Utara ke dalam "poros setan" pada Pidato Kenegaraan tahun 2002 dan terbukanya hasrat para neokonservatif untuk menyerang Korea Utara, maka beberapa alasan ini cukup untuk membuat Korea Utara takut, sehingga Korea Utara membuat persiapan untuk mempertahankan dirinya.

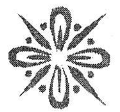
Maka Korea Utara menyatakan bahwa mereka punya hak yang sama untuk membuat persenjataan nuklir, dan mengumumkan penarikan dirinya dari NPT (semua penanda tangan punya hak untuk mundur, jika mereka mengirimkan pemberitahuan 90 hari di muka), dan menutup fasilitas nuklirnya terhadap para inspektur persenjataan internasional.

Apakah pemerintahan Bush akan mempertimbangkan untung rugi untuk memerangi Korea Utara masih akan kita lihat perkembangannya—sebagai tambahan dari persenjataan nuklir potensialnya, Korea Utara memiliki alat pertahanan diri konvensional secara besar-besaran dalam bentuk puluhan ribu keping artileri sejangkauan Seoul yang mampu menjangkau pula pasukan Amerika Serikat yang berpangkalan di perbatasan. Keputusan pemerintahan Amerika Serikat untuk memulangkan 14.000 prajurit infantri Amerika Serikat di perbatasan, merupakan upaya mudah dalam menakut-nakuti elit penguasa Korea Selatan agar menyetujui dengan diam-diam tuntutan Amerika Serikat sehubungan dengan Korea Utara. Akan tetapi, hal ini pun dilihat oleh beberapa pihak sebagai kemungkinan awal terjadinya perang.[147)]

Jika Korea Utara dapat mencegah perang terhadapnya, maka ini terjadi hanya karena mereka punya kemampuan untuk mempertahankan dirinya sendiri; sementara, Irak tak mampu lagi untuk bertahan, makanya dia tidak bisa mencegah meletusnya perang.

Bab 7

HUKUM INTERNASIONAL



SEMENJAK PRESENTASI yang dilakukan pemerintahan Bush pada sidang Majelis Umum PBB tanggal 12 September 2002, dan ditetapkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR 1441) pada bulan November 2002, klaim bahwa perang diperlukan untuk menegakkan hukum internasional dan, bersamaan dengan itu, untuk meningkatkan "relevansi" PBB, merupakan dua alasan utama dari serangkaian pembenaran.

Argumen tersebut terlihat sangat konyol. Irak tidak mengancam satu negara mana pun dengan agresinya, dan yang dapat dibuktikan hanyalah pelanggaran atas resolusi Dewan Keamanan. Itu pun masalah yang teknis belaka, yang kebanyakan merupakan dokumentasi tidak lengkap perihal keberadaan persenjataannya, apakah memang eksis atau tidak, dan atas rencana penggunaannya yang sampai kini tidak terbukti perwujudannya.

Pada saat yang sama, banyak bangsa-bangsa lain yang memiliki senjata pemusnah massal dan jelas-jelas melanggar resolusi PBB. Israel, sebagai contoh, melanggar dengan perhitungan yang sangat konservatif, sejumlah 30 resolusi, di antaranya terhadap hal-hal yang sangat substantif, misalnya masalah terus berlangsungnya pendudukan ilegal terhadap bangsa lain, serta pelanggaran Perjanjian Jenewa Keempat melalui sejumlah pelanggaran batas dan pengambilalihan secara efektif wilayah tertentu.[148)] Invasi Israel yang dilakukan berulang-ulang ini serta insiden pengeboman atas Lebanon nyata-nyata merupakan pelanggaran atas resolusi PBB dalam beberapa kasus dan pelanggaran hukum internasional dalam setiap kasusnya. Indonesia, teman Amerika Serikat lainnya, melanggar resolusi PBB selama seperempat abad di Timor Timur dengan hukuman yang relatif ringan. Moroko secara tidak sah menduduki Barat Sahara. Demikian seterusnya. Pada setiap kasus ini, Amerika Serikat tidak membutuhkan perang untuk menegakkan hukum internasional; Amerika Serikat dengan mudahnya bisa menggunakan cara-cara penghentian bantuan dan penjualan perangkat militernya terhadap negara-negara tersebut.

Amerika Serikat sendiri juga merupakan negara yang amat meragukan atas klaimnya bahwa ia mendapat mandat khusus untuk menegakkan hukum internasional. Semenjak keputusan Mahkamah Peradilan Internasional (*International Court of Justice*) tahun 1986 yang menghukum Amerika Serikat dan membenarkan Nikaragua, Amerika Serikat telah menolak keberadaan dan otoritas ICJ ($17 milyar kompensasi atas kerusakan yang diperintahkan untuk dibayarkan AS, selama ini tidak

pernah dipatuhi). Sesaat setelah tuntutan hukum tersebut diputuskan, Amerika Serikat sesungguhnya telah memveto sebuah resolusi Dewan Keamanan yang berisi ketetapan bagi semua negara untuk mematuhi hukum internasional.

Sudah barang tentu, Amerika Serikat tidak perlu melanggar satupun resolusi Dewan Keamanan, karena Amerika Serikat selalu punya hak untuk memvetonya—sebagaimana yang dilakukan ketika Dewan Keamanan mencoba untuk mengutuk invasinya yang ilegal dan dilakukannya secara terang-terangan terhadap Panama pada tahun 1989, dan pada tujuh kejadian selama berlangsungnya perang *contra* terhadap Nikaragua. Dan baru-baru ini selama perang terhadap Irak berlangsung, alasan yang masih terus dinyatakan berulang-ulang adalah bahwa Pemerintahan Bush memiliki hak yang melekat untuk berperang kendati perang itu sendiri tidak ditetapkan oleh Dewan Keamanan—walaupun hal tadi akan menempatkan Amerika Serikat berada dalam kategori pelanggar Piagam PBB.

Bahkan kendati kita memang benar-benar setuju dengan argumen ini pun, akan kita temui beberapa kelemahan mendasar di dalamnya. Satu hal, adalah memungkinkan untuk berargumen bahwa ada beberapa pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat terhadap hukum internasional, yaitu ketika Amerika Serikat datang ke Irak, dan terutama saat penetapan rezim "pengucilan" khususnya setelah Perang Teluk, sehingga akan melepaskan Irak dari semua kewajibannya.

Mari kita mulai membahasnya. Irak telah berada dalam serangan ilegal selama dasawarsa lalu dengan sejumlah pengeboman termasuk kampanye Rubah

Gurun, bahkan pada saat Amerika Serikat sedang dituntut untuk mematuhi hukum internasional.

Amerika Serikat juga mengambil sejumlah langkah yang tidak sah dan/atau yang bisa dipertanyakan keabsahannya sewaktu Amerika Serikat menumbangkan rezim "yang sedang dalam pengucilan" yang sah: (1) menetapkan sebuah "*Iraq Liberation Act* (Aksi Pembebasan Irak)" pada bulan Oktober 1998, yang menganggarkan $97 juta bagi kelompok-kelompok yang mencoba untuk menggulingkan pemerintahan resmi Irak, yang jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Irak dan hukum internasional; (2) menyatakan bahwa hanya dengan penggantian rezim sajalah maka sanksi akan dicabut, yang merupakan pelanggaran atas UNSCR 687; dan (3) menggunakan pemeriksaan persenjataan untuk melakukan spionase, hingga informasi yang diperoleh darinya belakangan dipakai untuk memilah-milah sasaran selama operasi Rubah Gurun.

Akan tetapi masalah yang paling meyakinkan sebagai balasan terhadap argumen hukum internasional adalah sebuah fakta bahwa perang Amerika Serikat terhadap Irak adalah aksi agresi yang terencana.

Semua tanda-tanda ini menunjuk kepada arah yang sama.

Pertama, pada bulan Agustus 2002, Menteri Pertahanan Rumsfeld memerintahkan agar daftar sasaran pengeboman lebih diperluas lagi daripada sekadar tujuan penegakan zona larangan terbang, yaitu agar mencakup pusat-pusat pengendalian dan komando, dan secara umum lebih daripada sebatas reaksi atas ancaman belaka. Menurut John Pike dari globalsecurity.org, ini adalah "bagian dari strategi mereka untuk terus maju dan

melemahkan pertahanan udara lawan" sebagai persiapan untuk perang yang akan dilaksanakan belakangan.[149)] Pada bulan Desember 2002, perluasan tujuan tadi bisa terlihat dari peningkatan sebanyak 300 persen atas tonase bom yang dijatuhkan untuk setiap lokasi vital yang telah terdeteksi—sebuah pertanda yang jelas bahwa penegakan zona larangan terbang bukan menjadi tujuan utama dari operasi pengeboman. Sebuah surat kabar London, *Guardian*, mengisahkan para pejabat Gedung Putih secara pribadi mengakui bahwa patroli zona 'larangan terbang,' yang dilakukan bersama oleh pesawat terbang RAF dan Amerika Serikat dari pangkalannya di Kuwait, adalah dirancang untuk melemahkan sistem pertahanan udara Irak dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan tujuan asli yang telah mereka tuturkan."[150)] Melemahkan pertahanan udara dan pusat kendali dan komando lawan adalah cara-cara standar sebagai langkah pertama di seluruh tindakan perang yang dilakukan Amerika Serikat sejak tahun 1991. Jadi, tembakan salvo yang pertama telah diletuskan bahkan pada saat pemeriksaan persenjataan masih berlangsung. Dalam dua bulan pertama tahun 2003, pengeboman terjadi hampir setiap hari.[151)]

Berikutnya, dalam perselisihan di dalam Dewan Keamanan atas draft yang belakangan ditetapkan sebagai UNSCR 1441, pemerintahan Amerika Serikat mencoba taktik transparan yang telah berhasil-guna dalam kasus sebelumnya. Ketika akan memulai perang terhadap Yugoslavia, pemerintahan Clinton mengajukan kepada pemerintahan Serbia sebuah draft kesepakatan (dikenal sebagai draft Rambouillet, sesuai nama kota tempat mereka bertemu) yang isinya pada intinya adalah ultima-

tum yang mengharuskan Serbia untuk menyerah kepada pendudukan militer yang tidak dipastikan lamanya dan dilakukan oleh pasukan NATO (baca Amerika) atau menghadapi perang.[152)] Taktik yang serupa inilah yang mereka cobakan terhadap Afghanistan.[153)]

Dalam draft asli UNSCR 1441, Amerika Serikat memasukkan, misalnya, sebuah ketetapan bahwa "UNMOVIC dan IAEA harus memiliki hak untuk mendeklarasikan tempat-tempat yang harus dibekukan kegiatannya dan dinyatakan sebagai zona larangan-terbang atau larangan berkendaraan, zona pengecualian, dan/atau koridor lintas udara dan lintas darat," dan menambahkan bahwa untuk itu bisa dikerahkan "pasukan bersenjata," yang secara potensial termasuk pula pasukan bersenjata *suatu* bangsa. Ini tampak betul oleh anggota Dewan Keamanan lainnya sebagai sebuah cetak biru bagi pendudukan Amerika Serikat atas Irak, makanya kemudian klausul di atas ditolak, sebagian besar sebabnya karena sejarah yang dialami draft Rambouillet.

Beberapa pihak telah mengklaim bahwa UNSCR 1441 itu sendiri adalah sebuah otorisasi yang mencukupi sebagai alasan bagi terjadinya perang. Ini pastilah keliru; bukan saja karena tidak ada ketetapan yang spesifik perihal konsekuensi dari ketidakrelaan, paragraf 4, 11, 12, dan 14 secara eksplisit memerlukan adanya pertimbangan atas kerelaan Irak dan konsekuensinya untuk tunduk dan menyerah kepada Dewan Keamanan, bukan kepada salah satu negara anggotanya.

Lebih jauh lagi, Amerika Serikat tidak pernah berniat memperbolehkan proses pemeriksaan yang disyaratkan oleh 1441 untuk berjalan berlarut-larut. Menurut seorang analis strategi, Michael Klare, keseluruhan aktivitas

diplomatik yang dilakukan pemerintah sehubungan dengan masalah Irak pada musim gugur tahun 2002 sampai awal tahun 2003 hanyalah merupakan kedok belaka.[154)] Perang telah benar-benar direncanakan paling tidak sejak musim semi tahun 2002, tetapi kemudian pada musim panas terjadi banyak perdebatan serius di kalangan internal militer atas apa yang disebut sebagai "opsi Afghanistan," yang melibatkan pasukan berjumlah 50.000-75.000 personil dan sangat tergantung pada kekuatan pertahanan udara dan pasukan oposisi Irak, serta sebuah rencana mutakhir, "Cahaya Badai Gurun," dengan kekuatan 200.000-250.000 personil dan merupakan invasi berskala penuh.[155)]

Keputusan diambil pada akhir Agustus, tetapi rancangan yang melibatkan lebih banyak orang ini, menurut Klare, membutuhkan paling tidak enam bulan sebagai masa persiapan perang.[156)] Semenjak saat itulah, jadwal waktunya bukan lagi tentang diplomasi, resolusi PBB, dan pemeriksaan persenjataan, akan tetapi lebih pada waktu yang tersedia bagi persiapan perang, penyempurnaan persenjataan para sekutu wilayahnya (teristimewa Kuwait dan Turki) yang dibutuhkan sebagai area landas bagi invasi, dan, mungkin, penambahan persediaan persenjataan presisi yang habis di kala perang Afghanistan (sekitar 800 rudal jelajah dan 23.000 peluru kendali habis terpakai selama perang).[157)]

Itulah sebabnya, sejak mendekati awal Februari, lagu yang terus diulang-ulang oleh Gedung Putih adalah 'waktunya hampir habis,' bahwa masalahnya harus diputuskan "dalam hitungan pekan, bukan bulan." Padahal, hal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan ancaman dari Irak yang semakin mendekat, tidak

pula sebagai tanggapan atas kegagalan pemeriksaan persenjataan (kendati faktanya, semakin lama mereka semakin efektif). Ini disebut-sebut hanya karena pasukan telah tiba dan siap untuk maju perang.

Kesimpulan nyata yang bisa kita peroleh adalah bahwa perang tersebut telah ditetapkan, tak perduli apa pun tindakan Irak. Tak ada lagi yang bisa diperbuat Irak kecuali menyerah bulat-bulat atau pun melakukan "penggantian rezim" yang bisa menghentikan niat Amerika Serikat untuk berperang. Alasan inilah yang membuat kasus ini jelas-jelas merupakan tindakan agresi.

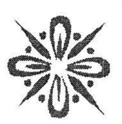
Agresi itu sendiri merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang paling fundamental. Dalam bahasan Persidangan Nuremberg, hal ini dipandang sebagai sebuah tindak kejahatan terhadap perdamaian. Seorang mantan anggota Mahkamah Agung Amerika Serikat, Robert Jackson, yang menjadi kepala jaksa penuntut Amerika Serikat pada Persidangan Nuremberg yang pertama, menyebut tindakan perang agresif sebagai kejahatan internasional yang paling utama dan yang membedakannya dengan kejahatan perang lainnya hanyalah inti yang terkandung di dalamnya yang merupakan akumulasi dari keseluruhan dosa."

Memang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia ada suatu negara diharuskan untuk melucuti persenjataannya sendiri dan bahkan dihukum oleh "komunitas internasional" agar patuh seluruhnya maupun sebagian kepada segala syarat perlucutan senjata, pada saat negara tersebut sedang berada di bawah serangan yang semakin meningkat dari negara lain dan dinyatakan berulang kali bahwa mereka akan diserang oleh tindakan perang berskala penuh—dan

bahwa keseluruhan skenario ini dilakukan atas nama penegakan hukum internasional.

Bab 8

DEMOKRASI DAN HAK-HAK ASASI MANUSIA:
Pembebasan Irak



ARGUMEN LAIN BAGI PERANG, yang awalnya tidak dianggap oleh Pemerintahan Bush sampai awal bulan Maret, tetapi setelah itu benar-benar dimanfaatkan sepenuhnya karena isu 'senjata pemusnah massal' mulai kehilangan gaungnya, adalah klaim bahwa perang bertujuan untuk membebaskan Irak. Perang terhadap Irak diperlukan untuk membawa demokrasi dan hak-hak asasi manusia kepada rakyat Irak. Argumen tersebut berlanjut, agar penderitaan karena penetapan sanksi bisa terhenti, maka perang diperlukan sebagai langkah pertama yang harus diambil untuk mendatangkan demokrasi ke wilayah Timur Tengah. Hingga wilayah ini bisa bermandikan cahaya Amerika yang terang dan hangat.

Tidak masalah, apakah pemerintahan Bush percaya akan propagandanya sendiri, tetapi hasilnya semakin terlihat dan bisa diterima baik oleh publiknya. Politik liberalis yang terus berlangsung dan berbaur dengan pembenaran melalui isu kemanusiaan atas perang yang

dilakukan oleh Amerika Serikat selalu membingungkan. Sementara publik Amerika banyak yang mengetahui bahwa Perang Vietnam bukanlah perang demi kemanusiaan atau bukan pula suatu pertempuran untuk mendatangkan kebebasan dan demokrasi bagi masyarakat Vietnam. Yang mereka pikirkan, elit politisi Amerika Serikat kini tidak lebih ramah daripada semasa Perang Vietnam; dan tentunya mereka pun tidak melihat George W. Bush lebih memiliki rasa kemanusiaan daripada Lyndon Johnson.

Dan, sesungguhnya, ini adalah pemerintahan Amerika Serikat yang sama, yang pernah membuat rancangan bagi Afrika yang melibatkan tekanan keras melalui Bank Dunia untuk memaksakan program menswastakan perusahaan air. Contoh yang lebih mutakhir ditampilkan oleh kejadian di Cochabamba, Bolivia. Bechtel Corporation (yang sekarang ini mendapat rezeki besar berupa kontrak pembangunan kembali Irak selepas perang) mengandalkan monopoli dalam penguasaan kebutuhan air untuk menaikkan harganya sebesar tiga kali lipat dalam satu gebrakan.[158)] Ini adalah pemerintahan yang melalui IMF dan Bank Dunia, secara terus menerus telah mengutip pembayaran atas program pendidikan dasar di seluruh Afrika (dan sekaligus mengabaikan hak masyarakat miskin di sana untuk bisa melek huruf). Ini pula pemerintahan yang sama, yang berkutat bertahun-tahun untuk menjauhkan bangsa-bangsa Afrika dari ketersediaan obat-obatan AIDS dengan jumlah yang mencukupi dan dengan harga yang relatif bisa terjangkau bagi kepentingan seluruh masyarakat Afrika. (Dan sekarang ini, pemerintah ini pula yang mencoba untuk melarang dan membatasi Deklarasi Doha,

satu dari sedikit perkembangan baik di dunia pasca-11 September, yang berisi kesepakatan seluruh negara, yang intinya setiap negara punya hak ketika menghadapi keadaan darurat medis untuk mengabaikan perlindungan hak cipta dari perusahaan obat-obatan).[159)] Bagaimanapun, untuk berpikir bahwa pemerintahan ini hanya di motivasi oleh keprihatinan atas hak-hak asasi manusia khususnya dalam perang dengan negara lain, diperlukan usaha keras untuk memikirkannya berkali-kali.

Seseorang mungkin akan bertanya pula, jika memang ada keprihatinan besar serupa itu perihal hak-hak asasi manusia, mengapa hal ini jarang sekali terwujud ketika Amerika Serikat mampu berbuat sesuatu pada kondisi yang tidak melibatkan perang. Keprihatinan seperti ini pun selama ini tidak mengarahkan Amerika Serikat untuk mendanai *Global AIDS Fund* dalam jumlah yang memadai, maupun menghapuskan kontribusinya dalam hutang yang dipinjamkannya kepada negara-negara Dunia Ketiga yang digunakan untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan dasar dan hak asasi sejumlah besar rakyat di negara-negara tersebut; keprihatinan ini pula, bahkan, tidak pula membuat Amerika Serikat menghentikan dukungan militer dan diplomatiknya pada negara-negara seperti Israel, Mesir, Kolombia, Turki, dan Saudi Arabia yang telah melakukan pelanggaran besar terhadap hak-hak asasi manusia dengan menggunakan peralatan yang mereka peroleh dari Amerika Serikat.

Dalam buku saya, *The New Crusade*, saya mengupas pertanyaan ini, dengan memberi perhatian utama pada contoh-contoh yang terjadi di Somalia, Rwanda (ketika Amerika Serikat secara aktif melakukan tindakan untuk mencegah pembantaian massal), Kosovo, dan

Afghanistan, dan saya sampai pada intisari prinsip-prinsip intervensi kemanusiaan Amerika Serikat berikut ini:

- krisis kemanusiaan adalah dalih, bukan alasan. Amerika Serikat melakukan intervensi jika mereka melihat ada keuntungan yang bisa diraih, biasanya dalam bentuk kontrol perekonomian dan politik maupun tempat bagi pijakan militernya.
- Amerika Serikat tidak terlalu peduli apakah intervensinya bisa memperbaiki krisis kemanusiaan atau malah memperburuk keadaan. Intervensi dirancang terutama untuk melayani kepentingannya yang tersebut di atas.
- Amerika Serikat kurang tertarik pada metode-metode aksi kemanusiaan dan penjagaan perdamaian, yang mensyaratkan kesabaran para penjaga perdamaian yang ditempatkan di wilayah tersebut. Intervensi semacam ini dipandang terlalu bertele-tele, dan tidak menghasilkan imbalan berupa pengaruh dan kontrol yang lebih besar atas wilayah tersebut. Padahal di lain pihak, penggunaan pasukan militer secara besar-besaran akan selalu menguntungkan Amerika Serikat bagai kekaisaran yang memperlihatkan kehendaknya untuk memamerkan kekuatan, keunggulannya yang dahsyat, dan yang terutama, terbebas dari pembalasannya.[160]

Jadi, ada dua pertanyaan besar yang boleh kita pertimbangkan sehubungan dengan kasus "pembebasan" Irak. Pertama, gagasan bahwa intervensi Amerika Serikat adalah untuk menciptakan demokrasi. Kedua, gagasan bahwa Amerika Serikat berkehendak untuk menolong rakyat Irak—bagaimanapun juga, seseorang bisa selalu beragumen bahwa jika saja Amerika Serikat memperoleh

kontrol sepenuhnya atas Irak, mungkin sekali terjadi kondisi yang lebih baik bagi rakyat Irak daripada sewaktu mereka hidup di bawah Saddam Hussein. Sebaliknya, yang lain pun bisa mendebatnya, Amerika Serikat sangat berkeinginan untuk menciptakan demokrasi, tetapi tidak peduli atas hak-hak sosial dan hak kebutuhan dasar masyarakat Irak.

DEMOKRASI

Ditinjau dari sejarahnya, terlihat relatif jelas arah kebijakan demokrasi yang dibawa Amerika Serikat bagi Irak dan Timur Tengah—permusuhan dan subversi. Pada tahun 1953, CIA mensponsori kudeta di Iran yang berhasil menggulingkan perdana menteri yang terpilih secara demokratis dan mendirikan negara monarki terpimpin. Pada tahun 1958, ketika pemberontakan rakyat Irak besar-besaran berhasil menumbangkan monarki Hasyimiah, yang pada dasarnya bersikap patuh kepada Inggris, Amerika Serikat bereaksi dengan mengirimkan 14.000 marinir ke Lebanon sebagai pameran kekuatan dan memprakarsai agenda untuk melakukan kudeta terhadap pemimpin militer yang mendapat dukungan rakyat untuk tampil ke tampuk kepemimpinan, Abdel Karim Qassem. Pada tahun 1963, dalam sebuah kudeta yang dilakukan oleh Partai Ba'ath yang dibantu CIA, Qassem digulingkan dan terbunuh (Ali Saleh Sa'adi, ketika itu menjabat Sekretaris Jendral Partai Ba'ath Irak, menuturkan "Kami datang ke tampuk kekuasaan dengan kereta CIA").[161)]

Setelah Perang Teluk, George Bush Sr., mengajak militer dan rakyat Irak (rencana aslinya adalah cuma

mengajak pihak militer) untuk bangkit dan menggulingkan Pemerintah Irak. Warga Irak melakukannya persis sesuai keinginannya, dengan apa yang belakangan dikenal sebagai gerakan intifada Irak. Dimulai dari para prajurit yang tidak puas yang baru kembali dari Perang Teluk, gerakan ini menyebar dengan cepatnya hingga melanda bagian selatan Irak, tempat mayoritas Syi'ah Irak terkonsentrasi. Dalam beberapa pekan, pemberontakan ini telah melibatkan suku Kurdi di Utara dan bahkan sejumlah kecil Arab Sunni. Peristiwa inilah yang merupakan ancaman yang paling serius yang dihadapi pemerintahan Saddam Hussein.

Diakui secara umum bahwa Amerika Serikat, saat itu, tetap berdiam diri dan membiarkan para pemberontak tersebut dibantai oleh sisa-sisa tentara Irak yang loyal (sebagian besarnya pasukan Garda Republik). Sesungguhnya, keterlibatan Amerika Serikat dalam memelihara Saddam Hussein untuk tetap berkuasa jauh lebih mendalam daripada peristiwa di atas. Setelah Perang Teluk, pasukan sekutu telah menduduki bagian Selatan Irak, dan zona larangan terbang sudah ditetapkan, tetapi pada awal bulan Maret 1991, Jendral Norman Schwarzkopf mengubah sebagian persyaratan larangan terbang sehingga hanya diperuntukkan bagi pesawat terbang bersayap tetap saja. Dengan perubahan ini, pemerintah Irak bisa menerbangkan helikopter yang dipersenjatai meriam udara untuk memburu dan menghabisi para pemberontak.

Militer Amerika Serikat mengambil sejumlah langkah lainnya yang membantu Saddam Hussein mengalahkan pemberontakan tersebut. Menurut seorang mantan mayor di Angkatan Darat Irak yang membangkang dan

bergabung dengan para pemberontak, Amerika tidak bertindak netral: "Sikap mereka semakin menjadi-jadi dalam campur tangannya kendati tanpa memakai senjata... Di Nassiriyah, pesawat terbang Amerika Serikat mengudara di atas helikopter pasukan Irak untuk memberinya perlindungan. Pasukan Amerika menghentikan para pemberontak agar tidak bisa mencapai depot persenjataan untuk mendapatkan amunisi. Pasukan Amerika dan Perancis yang berada di bagian selatan Irak menggali parit untuk memperlambat laju para pemberontak dan menghentikan mereka ketika mereka mengejar pasukan Saddam. Akhirnya, pasukan Amerika menyediakan pasukan Garda Republik pro-Saddam sebuah jalan pintas yang aman untuk mereka lalui demi menyerang posisi pasukan pemberontak."[162]

Tidak hanya menghalangi para pemberontak untuk menjarah depot-depot persenjataan, dalam beberapa kejadian, pasukan sekutu juga melucuti persenjataan para pemberontak secara paksa.[163] Maka tidak ada keraguan lagi, terlepas dari serangkaian kesalahan yang tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya, Amerika Serikat memang sengaja bertindak untuk menjaga agar Saddam Hussein tetap berkuasa, sehingga mereka pun harus dibebani sebagian tanggung jawab atas peristiwa pembantaian yang dilakukan pasukan Pemerintah Irak.

Pada tahun 1996, Brent Scowcroft, yang menjadi penasehat keamanan nasional sewaktu peristiwa intifada, menuturkan kepada stasiun televisi ABC, "Saya sejujurnya berharap [pemberontakan tersebut] tidak pernah terjadi. Saya mengimpikan pemerintahan pascaperang adalah pemerintahan militer."[164] Beberapa bulan kemudian, Thomas Friedman dari *New York Times*

menyarikan alasan resmi atas kejadian tersebut dalam tulisannya yang khas dan tajam: Washington, dia menuturkan, menginginkan "yang terbaik dari keseluruhan dunia: pemerintahan junta Irak yang kejam tanpa Saddam Hussein."[165] Pemerintahan yang dikepalai Saddam Hussein, walaupun tidak sebaik pemerintahan militer pro-Amerika tanpa Saddam Hussein, adalah jauh lebih baik daripada pemerintahan yang terbentuk dari pemberontakan rakyat, yang punya kemungkinan besar akan berupaya melindungi hak-hak rakyatnya.

Rekaman sejarah ini memperpanjang lagi daftar permusuhan demi demokrasi yang terdokumentasi dengan baiknya yang mengisahkan banyak kejadian serupa di belahan bumi lainnya—sebagaimana dilambangkan oleh, *inter alia*, banyak peristiwa kudeta yang didukung AS: di Guatemala pada tahun 1954, di Laos pada tahun 1960, di Brazil pada tahun 1964, di Cili pada tahun 1973. Sudah barang tentu, seseorang mungkin sekali akan sampai pada satu keyakinan bahwa, meski pemerintahan sebelumnya hanya punya sedikit kepedulian atas demokrasi, pemerintahan yang baru akan berbeda—dan memang benar para neokonservatif punya sikap serupa yang sama-sama membenci kestabilan rezim Saddam Hussein sebelumnya. Jadi, sangatlah penting untuk melihat catatan sejarah semenjak tragedi 11 September, dan, terutama, untuk mengerti betul apa arti sesungguhnya "penggantian rezim."

Kita harus mulai dengan mengenal bahwa Amerika Serikat tidak memiliki ideologi yang menentang demokrasi. Secara umum, Amerika Serikat cuma membuat pemerintahan negara lain agar memberi keuntungan yang paling besar buat kepentingan Amerika Serikat

sendiri—yang menghasilkan pengaruh politis paling kuat bagi Amerika Serikat serta yang paling mendatangkan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Hal ini sering kali jadi keprihatinan karena berurusan dengan kestabilan rezim, kalau-kalau rezim itu terlalu menindas. Inilah pertimbangan yang mengarahkan Amerika Serikat untuk mendirikan rezim yang lebih demokratis di Jepang dan Jerman sebagai pengganti rezim yang berkuasa pada tahun 1945.

Akan tetapi, ideologinya tidaklah murni demokrasi, dan terutama di Jepang, rezim yang berkuasa sangat tidak responsif terhadap kehendak rakyat. Buku Chalmers Johnson yang amat bagus, *Blowback*, memberi gambaran sikap pemerintah Jepang yang mengesampingkan harapan masyarakatnya ketika Jepang bersama Amerika Serikat hendak menetapkan dan meloloskan sebuah perjanjian bilateral, *Mutual Cooperation and Security Treaty* pada tahun 1960. Isinya, secara tetap, mengukuhkan peran Jepang dalam struktur pengaruh politik dan militer Amerika Serikat di Asia Timur. Sistem politik Jepang masih membawa stigma mengenai "demokrasi" yang dibawa Amerika Serikat yang berciri pendekatan dari atas ke bawah. Hal ini terlihat ketika Perdana Menteri Jepang, Junichiro Koizumi, memperlihatkan penentangannya atas harapan lebih dari 80 persen populasi rakyatnya, dan tetap menyokong perang terhadap Irak.

Irak adalah kasus yang serupa dengan Jepang dan Jerman atas beberapa alasan, yang pertama: sistem pemerintahan yang baru didirikan bisa jadi akan kurang demokratis dibandingkan sebelumnya, dan yang kedua, sistemnya sama-sama diarahkan dari atas ke bawah. Se-

bagaimana kita bahas dalam pendahuluan, pemerintahan semacam ini akan, jika ada, lebih patuh secara langsung kepada dikte Amerika Serikat.

MEMAHAMI "PENGGANTIAN REZIM"

Bahkan di abad keduapuluh satu, metode kontrol tidak selalu harus lebih pelik daripada di masa lampau—kita telah membahas keterlibatan pemerintahan dalam upaya kudeta di Venezuela. Di Palestina, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sedang berlangsung upaya-upaya untuk menciptakan kembali pemerintahan sekutu bergaya neokolonial, dari sejak mulai berjalannya proses Oslo sampai terhentinya pada tahun 2000.

Demokrasi semu yang direkayasa di Afghanistan misalnya, dalam pembentukannya, hampir lebih kasar daripada upaya kudeta. *Loya jirga*, atau dewan agung, yang memilih pemerintahan sementara Afghanistan, sejak awal hanya terdiri dari delegasi-delegasi yang diseleksi oleh Amerika Serikat, yang kebanyakan darinya adalah perwakilan suku-suku atau panglima perangnya, dengan sedikit olesan berupa keanggotaan beberapa ekspatriat Afghanistan (sebagian besar dari Amerika Serikat) dan "teknokrat" untuk mencukupkan aura agar dapat terpandang oleh masyarakatnya. Perwakilan dari Partai Watan yang kuat dan beranggotakan 1,5 juta orang—yang menggantikan Partai Rakyat Demokratik Afghanistan (sebuah Partai Komunis yang memerintah Afghanistan sampai tahun 1992), tidak diperkenankan menjadi delegasi.

Menurut Omar Zakhilwal dan Adeena Niazi, yang menjadi delegasi di *loya jirga*, "Kami, para delegasi,

tidak dilibatkan kecuali sekadar peran simbolis dalam proses pemilihan [pemerintah]. Sekelompok kecil dari Aliansi Utara (kelompok gabungan para panglima dan kepala-kepala suku di daerah-daerah) menetapkan semua keputusan di balik pintu tertutup." Karena mantan Raja Zahir Shah adalah kandidat presiden sementara yang paling populer, tetapi dirasa kurang sesuai bagi kepentingan Amerika Serikat, maka seluruh anggota *loya jirga* ditunda persidangannya selama hampir dua hari sementara mantan raja tersebut dijaga agar tidak mengajukan dirinya untuk mendapatkan peran yang berarti dalam pemerintahan."[166)]

Ketika utusan khusus Amerika Serikat untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad (belakangan menjadi utusan khusus Amerika Serikat untuk oposisi Irak) tiba-tiba mengumumkan ke seluruh media dunia bahwa Zahir Shah mundur—sesuatu yang tampaknya tidak mampu dikatakan sendiri oleh mantan raja berusia 80 tahun tersebut—tidak ada keraguan lagi siapa yang berada di balik layar. Hamid Karzai, kandidat yang mendapat dukungan Amerika Serikat, langsung terpilih. Dan setiap keraguan atas kemampuan Karzai untuk bertindak merdeka, dan terlepas dari tekanan Amerika, akan punah sendirinya oleh adanya berita bahwa Pasukan Elit Amerika Serikatlah yang bertindak sebagai pengawalnya. Belakangan, Pasukan Elit tersebut digantikan oleh tentara bayaran partikulir yang disewa oleh Dyncorp, sebuah perusahaan kontraktor militer Amerika.[167)]

Di masa kontrol global dominan yang terjadi saat ini, kekuasaan utamanya diperoleh dari pengaruh dan pengaturan perekonomian, yang kebanyakan datang melalui lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti

IMF, Bank Dunia, dan *World Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Dunia). Sebagai hasil dari perubahan struktural IMF/Bank Dunia pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an dan terlebih lagi karena proliferasi persetujuan "perdagangan bebas" pada dasawarsa 1990-an—proses yang biasanya dirujuk sebagai globalisasi—dunia telah sampai ke suatu titik, ketika—sebelum tragedi 11 September—Departemen Keuangan Amerika Serikat memiliki lebih banyak kontrol atas keputusan perekonomian negara-negara Dunia Ketiga daripada selayaknya pemerintahan terpilih di negara-negara tersebut. Sementara, Timur Tengah dan Asia Tengah merupakan pengecualian parsial, karena "globalisasi" tidak bergigi di sana. Dengan kebebasan bertindak mereka-mereka ini dikekang, maka tidak masalah lagi siapa pun yang terpilih untuk memerintah di sebagian besar negara-negara Dunia Ketiga; dan mereka tidak akan dapat berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan program reformasi yang kokoh yang didedikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Modus kontrol seperti ini tidaklah menarik bagi pemerintahan Bush maupun para neokonservatif karena secara berkala prosesnya akan melibatkan lembaga-lembaga multilateral yang setidaknya secara nominal bukan berada di bawah kontrol Amerika Serikat sepenuhnya (kecuali IMF) dan karena cara tersebut tidak efektif untuk menembus masyarakat di wilayah yang menyimpan cadangan terbesar minyak dunia—dan mungkin, sebagiannya lagi karena lembaga-lembaga multilateral tersebut telah menjadi sasaran kesadaran sosial para aktivis keadilan dunia. Pemerintahan Amerika

Serikat lebih memilih, sebagaimana terjadi di masa Perang Dingin di Asia Timur, pembentukan pemerintahan yang dirasanya cocok, dan pemerintah yang bisa ditekannya, dalam satu kerangka militer atas hegemoni global Amerika Serikat. Dan itulah yang terungkap di Afghanistan, Irak dan kemungkinan di Timur Tengah lainnya.

MASALAH HAK-HAK ASASI MANUSIA DAN KEMANUSIAAN

Bahkan atas pertimbangan hak-hak sipil dan politik (yang berkebalikan dengan hak-hak sosial dan perekonomian, memiliki status setara di mata hukum internasional), keprihatinan yang baru saja ditemukan oleh pemerintahan Bush bagi pembebasan Irak terlihat kurang dapat dipercayai. Begitu militannya, sesungguhnya, adalah yang menjadi perbedaannya; hingga ketika, pada bulan Oktober 2002, Saddam Hussein mengambil tindakan yang tidak terpikirkan dengan memberikan pengampunan umum bagi tahanan Irak, tidak pula ada reaksi positif dari pemerintahan Amerika Serikat. Tidak demikian dengan respons masyarakat Irak, timbul gejolak seketika mereka mendengar berita pembebasan para tahanan tersebut, sampai-sampai otoritas di penjara Abu Ghraib di luar kota Baghdad kehilangan kendali dalam proses pembebasan para tahanannya karena kerumunan massa menarik-narik terali penjara dan merusak dinding-dindingnya.[168)] Tindakan Saddam Hussein tersebut pastilah cuma coba-coba belaka; tetapi ketika Saddam Hussein tidak melihat hasil yang dia kehendaki dari

pemerintahan Amerika Serikat atas upaya pembebasan tahanan di atas, dia menghentikan proses pembebasan itu. Bahkan menurut beberapa laporan, beberapa orang yang sudah dibebaskan belakangan diciduk kembali.[169] Dalam kasus ini, beberapa patah kata sambutan yang baik dari pemerintahan Bush mungkin merupakan satu-satunya "intervensi" yang diperlukan demi melindungi hak-hak asasi manusia.

Pembenaran bagi perang yang lebih besar buat alasan kemanusiaan dapat diperhatikan lebih mendalam dengan mencermati beberapa insiden selama perang. Pengeboman Amerika Serikat-Inggris telah merusak tenaga listrik di Basra, sehingga membuat fasilitas penjernihan air dan pompanya menjadi tidak berfungsi (sebuah situasi yang berlangsung selama berminggu-minggu).[170] Karena kebutuhan yang bebankan kepada Inggris untuk memperbaiki situasi ini, komandan-wilayah pasukan Inggris di sana menyatakan Basra sebagai "sasaran militer."[171]

Andrew Natsios, kepala administratur *US Agency for International Development* (USAID), mengadakan jumpa pers dan menguraikan permasalahan di Basra, yaitu hanya 40 persen dari populasinya yang mendapat akses akan kebutuhan air minum. Awal kejadiannya menurut dia adalah "keputusan yang disengaja oleh rezim untuk mengabaikan perbaikan sistem penjernihan air ataupun menggantikan komponen yang sudah usang dengan yang baru, sehingga dalam beberapa kasus, rakyatnya benar-benar mengambil air untuk minum dari air selokan buat kebutuhan rumah tangga mereka dan situasi ini terjadi selama beberapa tahun."[172]

Hal tersebut membuat klaim akan kebiasaan berdusta rezim Irak mencapai puncaknya. Padahal, sebagaimana telah kita rinci dalam bab-bab awal, sejak sistem penjernihan air Irak hancur berantakan karena Perang Teluk I, yang dengan sengaja memang mengambil sasaran ke semua jaringan tenaga listrik sehingga mengakibatkan terhentinya pompa air dan banjirnya air selokan menggenangi kota Basra, Pemerintah Irak telah berupaya mati-matian untuk memperbaikinya, tetapi upaya tersebut secara sistematis diblokir oleh beragam cara Amerika Serikat.

Kesamaan kasusnya pada skala yang lebih besar telah memberi gambaran yang sangat-sangat jelas. Untuk bisa mengatakan bahwa kematian 500.000 kanak-kanak karena sanksi adalah merupakan harga yang sepadan bagi proses pembebasan mereka, sebagaimana dilontarkan Madeleine Albright, saat itu sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kemudian mengklaim bahwa Amerika Serikat berperang untuk membebaskan warga Irak, adalah suatu tindakan yang paling munafik lagi keji.

Sanksi yang dengan sengaja dibebankan kepada rakyat Irak sebagai alat kontrol Amerika Serikat atas wilayah tersebut dan kemudian dipelihara selama 12 tahun yang sebagian besar adalah karena kehendak politik Amerika Serikat. Padahal, konsekuensinya bukan hanya bisa dilihat malah bisa pula diprediksi. Pada setiap tahapannya, Amerika Serikat memanipulasi proses untuk membuat Irak semakin tertekan. Pertama, Amerika Serikat menolak untuk memberi izin penjualan minyak dalam jumlah yang memadai agar Program Minyak bagi Pangan menjadi lebih dapat diterima oleh Irak. Kemudian,

Amerika Serikat menggunakan kekuatan dan tekanannya untuk menjatuhkan "penahanan" agar masyarakat Irak tidak mampu membangun kembali negaranya dan bahkan berikutnya menahan masuknya obat-obatan dan vaksin—sampai akhir tahun 2002, ketika Amerika Serikat merintangi impor antibiotika dasar seperti streptomisin.

Klaim bahwa perang adalah "manusiawi" atau "berperikemanusiaan" pada dasarnya bersumber dari pelencengan sejarah—bahwa perang mesti dijauhkan dari konteks kebijakan Amerika Serikat yang mengarahkannya, dan terutama dari kejamnya sanksi yang menghancurkan ini. Doktrin "perubahan arah" ini merupakan argumen dari amnesia sejarah; hal ini memerlukan penolakan untuk menganggap bahwa bangunan masyarakat Amerika Serikat dan kepentingan elit yang mengarahkan kebijakan luar negerinya pada dasarnya tidak berubah. Dalam kasus ini, tentunya akan lebih logis untuk melihat perang tersebut sebagai titik kulminasi dari sanksi, yang menggantikan kontrol parsial Amerika Serikat menjadi kontrol Amerika Serikat yang hampir sempurna.

Memang benar pelaksanaan perang adalah tidak manusiawi. Penghancuran dan pengeboman Baghdad yang tak berkesudahan, penggunaan bom-pecah (*cluster bomb*) di daerah-daerah pemukiman,[173] dan serangan brutal terhadap kendaraan-kendaraan warga sipil setelah serangan bunuh diri yang pertama terhadap pos pemeriksaan militer Amerika Serikat, keseluruhannya jelas merupakan pelanggaran prinsip-prinsip kemanusiaan.[174] *Iraq Body Count Project* (www.irakbodycount.net), yang meneliti hanya dari laporan-laporan media saja, memperkirakan (sampai 1 Mei 2003) jumlah warga sipil

yang terbunuh dalam perang Irak mencapai antara 2.180 sampai 2.653 korban. Angka-angka ini tidak memasukkan kematian yang tidak dilaporkan, kematian tak langsung yang disebabkan ketiadaan listrik dan air, atau angka kematian pada ketentaraan Irak, yang sudah barang tentu menjadi korban sia-sia pada perang yang mubazir yang ditujukan terhadap lawan yang tidak melakukan tindakan agresif apa pun.

Akan tetapi, kematian yang disebabkan oleh perang itu sendiri, tidak dapat dibandingkan dengan kematian yang terjadi sebelum campur tangan AS di Irak. Prinsip dasar politis yang mendasari kebijakan Amerika Serikat adalah "manajemen korban"; Amerika Serikat musti berhati-hati dalam memperhitungkan korban yang akan terjadi ketika mereka merencanakan sebuah perang, karena potensi lecutan baliknya, tetapi Amerika Serikat tidak terlalu memperdulikan jumlah korban rakyat yang mati karena terbatasnya akses akan kebutuhan obat-obatan, air, atau bahan pangan. Asalkan masyarakat umum Amerika tidak melihat keseluruhan korban yang mati dan menderita sebagai hasil dari kebijakan untuk memantapkan hegemoninya, dan Amerika Serikat semakin menjadi-jadi mencoba untuk menghubungkan porsi terbesar dari kematian tersebut dengan kambing hitam yang diada-adakannya, maka intervensi kemanusiaan akan tetap langgeng sebagai satu alasan pembenaran bagi sejumlah perang yang akan dilakukannya di masa depan.

Menimbang kenyataan yang terjadi saat ini di negara-negara di seluruh dunia, kekejaman penguasa terhadap rakyatnya, maka diperlukan sebuah alternatif. Hanya sayangnya, sebagaimana saya diskusikan di *The*

New Crusade, Amerika Serikat secara sistematik mendangkalkan setiap upaya untuk menciptakan kesetaraan lebih banyak lagi di dunia internasional atas kehendak intervensi kemanusiaan yang akan dilakukannya. Cara-cara yang dipakai Amerika Serikat adalah kelancangan yang mencengangkan. Dengan lancangnya, mereka mencoba menciptakan kondisi yang menyedihkan melalui eksploitasi dan manuver yang terus-menerus untuk mendapatkan peningkatan pengaruh politisnya, dan secara simultan menyabot setiap mekanisme internasional yang efektif dan demokratis dalam menanggulangi masalah-masalah asasi manusia yang bermunculan di mana-mana, dan kemudian melaksanakan intervensi yang membawa bencana dengan alasan—dan atas dasar—"kemanusiaan". Untuk mendapatkan kembali kredibilitasnya, Amerika Serikat musti mulai memperlihatkan niatnya untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam situasi-situasi yang tidak dapat dipetik keuntungannya maupun yang tidak dicobakan untuk dikangkanginya.

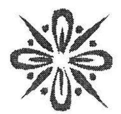
Masih ada kesempatan, paling tidak dari teorinya, bagi komunitas internasional untuk turun tangan melindungi hak-hak asasi manusia. Masih pula tersedia tempat bagi para penjaga perdamaian dan bagi intervensi kemanusiaan. Namun tidak tersedia tempat bagi dominasi Amerika Serikat atau Barat untuk campur tangan, baik dalam aspek perekonomian ataupun militer, di balik kedok melindungi hak-hak asasi manusia.

Kesalahan mendasar dalam menerima pembenaran yang beralasan kemanusiaan bagi intervensi Amerika Serikat adalah asumsi yang tidak dinyatakan yang sampai kini masih melekat, yang dipercayai oleh masyarakat

umum, bahwa pemerintahan Amerika Serikat punya maksud baik kepada dunia luar.

Bab 9

MINYAK SEBAGAI SEBUAH KOMPONEN KEKAISARAN



SETELAH MEMENTAHKAN BERAGAM pembenaran yang menjadi pertimbangan bagi perang, kita dihadapkan pada pertanyaan sebenarnya: Apa alasan sesungguhnya?

Kita sudah membahas garis-garis besar prinsip-prinsip visi imperial baru—keunggulan militer yang begitu hebat, "penggantian rezim" yang sering terjadi, perluasan cakupan basis militer, dan jelas sekali, kontrol maksimum atas produksi dan transportasi minyak dunia. Perang terhadap Irak mencakup ketiga manfaat yang terakhir.

Arus diskursus politik utama akan dengan serta merta menyatakan setiap pendekatan yang menyatakan bahwa perang tersebut selalu ada hubungannya dengan minyak sebagai "teori konspirasi". Tindakan mereka ini tak dapat kita pahami, menimbang bahwa bahkan para pembela status quo yang paling ortodoks pun mengakui bahwa kepentingan ekonomi mempengaruhi kebijakan. Bantuan asing terkadang disebut sebagai contoh kemurahan

Amerika yang tanpa pamrih (kendati Amerika Serikat menyumbang persentase yang lebih kecil dari GNP-nya daripada negara Dunia Pertama lainnya), padahal USAID sendiri secara blak-blakan menyatakan bahwa penerima manfaat dari operasinya terutama adalah perusahaan-perusahaan Amerika. Meskipun demikian, untuk beberapa alasan, pernyataan konvensional yang bijak ini dengan mudahnya dilupakan pada beragam peristiwa ketika Amerika Serikat pergi berperang.

MINYAK DAN TINJAUAN SEJARAH KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH

Sebenarnya, sudah bukan rahasia lagi bahwa kebijakan Amerika Serikat atas Timur Tengah berputar di sekitar minyak. Kepentingan Amerika Serikat akan minyak di wilayah tersebut mulai menguat semenjak berakhirnya Perang Dunia I, terutama setelah Persetujuan San Remo pada tahun 1920. Ketika itu, Inggris dan Prancis secara umum membagi dua minyak di Timur Tengah di antara mereka saja. Inggris sejak awalnya telah menerapkan cara-cara standar ala kolonial dalam menangani permasalahan minyak; menekan pemerintahan yang lemah dan korup untuk menghibahkan konsesi minyak, yang pada dasarnya menetapkan transaksi yang memberikan hak kepada beberapa perusahaan atas minyak yang terkandung di lapisan tanah di dalam area yang dicakup oleh konsesi, dan hanya membayar dengan royalti yang kecil jumlahnya bagi pemerintahan negara tersebut. Dalam 50 tahun pertama konsesi minyak Timur Tengah, perusahaan-perusahaan

Barat dan segelintir penguasa di Timur Tengah menjadi orang yang sangat kaya, tetapi rakyatnya hanya—kalau pun ada—mendapat sedikit manfaat.

Perusahaan minyak Amerika Serikat yang tidak diikutsertakan menjadi tidak puas dan mengeluhkan hal ini, karenanya melalui intervensi pemerintah Amerika Serikat (saat itu, Herbert Hoover memainkan peran yang besar), Persetujuan San Remo diganti dengan persetujuan "Garis-merah" pada tahun 1928, yang memberi mereka 23,5 persen bagian atas keseluruhan konsesi minyak di wilayah bekas kesultanan Ottoman (tidak termasuk Kuwait). Belakangan, persetujuan ini hanya dilaksanakan khusus terhadap minyak Irak saja. Pada tahun 1933, Texaco dan Chevron mendapat rejeki nomplok dengan ditetapkannya sebuah konsesi berjangka waktu selama 60 tahun atas porsi terbesar minyak Saudi, kemudian mereka membagikannya bersama Exxon dan Mobil dalam formasi Aramco.[175)] Di sekitar waktu itu, Gulf juga memperoleh 50 persen konsesi minyak Kuwait.

Perang Dunia II membawa pengaruh yang sangat strategis atas minyak sehingga menjadi unsur yang mutlak, karena ketersediaannya merupakan faktor penentu dalam berbagai tindakan militer. Meski Amerika Serikat saat itu menghasilkan hampir dua-pertiga minyak dunia, Amerika Serikat bergerak dengan mantap untuk menjaga dan memperpanjang kontrolnya atas minyak Timur Tengah, yang telah diketahui sebagai cadangan minyak terbesar di dunia. Pada tahun 1943, dalam upayanya untuk merayu Ibn Saud, Presiden Franklin Roosevelt membuat Saudi Arabia terpilih untuk ikut dalam program bantuan Peminjaman Leasing dengan menyatakan bahwa pertahanan Saudi Arabia merupakan

kepentingan vital bagi Amerika Serikat; dan pada tahun 1945, setelah usainya Konferensi Yalta, secara pribadi Roosevelt mengunjungi Ibn Saud.

Signifikansi minyak Saudi telah terungkap dengan jelas—sebuah dokumen Departemen Luar Negeri keluaran tahun 1945 menyebutnya sebagai "sumber daya yang sangat strategis, dan suatu kenikmatan material yang terbesar dalam sejarah dunia."[176)]

Pada tahun 1951, Iran menasionalisasikan minyaknya, dan menarik kembali konsesi yang tadinya dimiliki oleh British Petroleum. Perusahaan-perusahaan minyak kemudian berkolusi untuk menetapkan embargo atas minyak Iran, sehingga negara tersebut menderita tanpa pendapatan dari minyaknya selama dua tahun, sampai kudeta bersama Amerika Serikat-Inggris berhasil menumbangkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis dan mengembalikan tirani Shah Reza Pahlavi ke singgasananya. Pembagian pasca kudeta menghasilkan hak atas 40 persen minyak Iran bagi perusahaan Amerika.

Pemberontakan di Irak pada tahun 1958, sebagaimana disebut sebelumnya, secara langsung membahayakan kondominium Anglo-Amerika atas minyak di wilayah tersebut, sehingga menimbulkan reaksi keras dari Amerika Serikat. Qassem, penguasa Irak pada waktu itu, semakin menimbulkan kemarahan dari perusahaan-perusahaan minyak ketika pada tahun 1961 dia meluluskan Hukum 80, yang menetapkan program nasionalisasi atas minyak yang terpendam di bawah 99.5 persen daratan Irak, yang pada saat itu, secara umum belum dieksplorasi dan belum diolah. Dan sebagaimana telah disebutkan tadi, akhirnya dia membayar bagi kecerobohannya tersebut secara dramatis.

Selama dasawarsa 1970-an, situasi strategis dan kekuatan Amerika Serikat di Timur Tengah telah berubah drastis. Amerika Serikat kalah di Vietnam, Inggris menarik mundur pasukannya dari wilayah tersebut (kendati pada saat yang bersamaan, Israel muncul sebagai satu kekuatan militer yang baru), dan Uni Soviet mulai memainkan peranan barunya yang lebih berpengaruh. Pada tahun 1971, Libya menasionalisasikan konsesi British Petroleum; pada tahun 1972, Irak menyelesaikan nasionalisasinya; pada tahun 1975, Kuwait dan Venezuela menasionalisasikan minyak; dan demikian pula Arab Saudi pada tahun 1980. Respons yang bisa dilakukan Amerika Serikat hanyalah tindakan simbolis belaka, misalnya dengan mencantumkan Irak dalam daftar Departemen Luar Negeri sebagai salah satu negara penyokong terorisme.

Pada tahun 1980, untuk menanggapi invasi Soviet ke Afghanistan, Doktrin Carter disebarluaskan: "Suatu upaya oleh pasukan dari luar untuk memperoleh kontrol atas wilayah Teluk Persia akan dipandang sebagai satu bentuk serangan terhadap kepentingan vital Amerika Serikat." Doktrin ini dilanjutkan dengan rancangan pelaksanaan yang menciptakan *Rapid Deployment Force* (Pasukan Gerak Cepat), yang belakangan berkembang menjadi *Central Command* (Komando Pusat), badan yang berwenang melaksanakan Perang Teluk I dan II.

Perang Teluk I, kemudian, menghasilkan pangkalan darat permanen bagi kehadiran militer AS di Timur Tengah, sehingga memberi Amerika Serikat kontrol parsial atas minyak Irak (melalui sanksi-sanksi PBB) dan memperkuat pengaruh Arab Saudi, sekutu lama Amerika Serikat, dalam pasar minyak global.

BEBERAPA SALAH PENGERTIAN YANG UMUM

Kendati minyak adalah pertimbangan utama kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, tetapi tidak benar jikalau perusahaan minyak bisa menentukan arah kebijakan tersebut. Pengumuman Kissinger yang condong ke arah Israel, pada awal dasawarsa 1970-an, ditentang keras oleh perusahaan minyak yang menguatirkan dampak gelombang nasionalisasi yang sedang terjadi. Pada tahun 1996, Kongres meloloskan *Iran-Libya Sanctions Act*, yang ditandatangani oleh Bill Clinton. Isinya adalah penetapan sanksi ekonomi potensial terhadap semua perusahaan yang menanamkan modal lebih besar dari $40 juta buat pembangunan sumber-sumber minyak di negara-negara tersebut. Dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut telah membuat banyak perusahaan minyak Amerika Serikat harus keluar dari persetujuan eksplorasi di Iran, sementara perusahaan minyak Eropa masih tetap dapat mengeksploitasi minyak di wilayah ini. Perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat lainnya seperti Halliburton milik Dick Cheney langsung mengadakan lobi untuk mencoba membatalkannya selama beberapa tahun tanpa memberi hasil. Dan, tentunya, sanksi terhadap Irak telah membawa pengaruh hingga memperbesar kesempatan bermain buat perusahaan minyak Amerika Serikat yang sejak lama mengincar konsesi atas minyak Irak.

Adalah tidak benar pula anggapan bahwa Amerika Serikat selalu mengejar kebijakan "minyak murah"—faktanya, karena Amerika Serikat sejak dahulu sudah menjadi penghasil minyak yang besar, maka terjadilah konflik kepentingan. Sejak tahun 1959 sampai 1973,

Amerika Serikat melaksanakan kontrol penuh atas impor minyak, sehingga harga minyak di Amerika Serikat secara umum dua kali lebih tinggi daripada harganya di pasar dunia.[177)] Pada tahun 1986, Arab Saudi menetapkan suatu kebijakan "harga dasar," sehingga harga minyak turun drastis. Kejadian ini sangat mempengaruhi dan menghantam produsen minyak domestik Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, George Bush yang saat itu menjabat Wakil Presiden secara pribadi berkunjung ke Saudi Arabia, agaknya untuk memberi ancaman kepada pihak Arab Saudi untuk pengenaan tarif atas minyaknya jika mereka tidak melakukan upaya apa pun untuk menaikkan harga.[178)] Kebijakan Amerika Serikat sendiri dalam menetapkan harga tidak terlalu berbeda dengan kebijakan OPEC—harga minyak secara relatif harus tetap stabil dalam suatu kisaran tertentu, tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah.

Lebih jauh lagi, kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah bukan semata-mata tentang akses ke minyak. Pernah ada suatu masa dimana hampir tidak ada minggu yang terlewat di mana para kolumnis konservatif tidak menemukan sesuatu yang baru dari kenyataan bahwa minyak diperjualbelikan di pasar dunia dan karenanya sumber dari minyak tersebut berasal secara umum bukanlah merupakan faktor terpenting—kendati demikian Amerika Serikat, saat itu, sudah merupakan pembeli utama minyak Irak.

Bahkan sementara Amerika Serikat memperluas kontrolnya atas minyak Timur Tengah, Amerika Serikat dengan sengaja tetap mengikuti kebijakan untuk mengambil minyak dari sumber-sumber yang paling dekat ke Amerika Serikat. Pertama, Amerika Serikat mendukung

industri minyak domestiknya dengan mekanisme pengendalian yang disebut di atas, kemudian Amerika Serikat menetapkan Venezuela (eksportir minyak utama sebelum tahun 1970) sebagai sumber impor utamanya.

Belakangan, eksplorasi dari produsen minyak Afrika Barat (yang merupakan sumber-sumber yang sepantasnya bagi Amerika Serikat karena jaraknya dekat sehingga biaya transportasinya akan rendah) adalah bagian yang penting bagi strategi pemerintahan Bush. Pada awalnya, pemerintahan secara terbuka tidak memandang Afrika sebagai suatu kepentingan strategis bagi Amerika Serikat, tetapi ketika Colin Powell datang ke sidang Pertemuan Puncak Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan, bukan merupakan hal yang kebetulan jika kemudian dia mengadakan kunjungan ke Gabon dan Angola, yang keduanya adalah negara penghasil minyak. Amerika Serikat adalah sumber utama bagi investasi asing secara langsung bagi Angola dan merupakan pembeli utamanya. Nigeria juga merupakan sumber impor minyak utama Amerika Serikat lainnya. Bahkan setelah perang terhadap Irak dimulai, Bush bertemu dengan presiden Kamerun untuk mendiskusikan prospek jalur pipa baru yang utama yang membentang dari Chad melalui Kamerun menuju pantai Atlantik—porsi terbesarnya berupa ratusan ribu barel minyak per harinya tak pelak lagi akan dibeli oleh Amerika Serikat.[179)]

MINYAK DAN PERANG

Jadi, di manakah minyak berpijak pada kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah dan perang terhadap Irak?

Kita mulai dari prospek minyak Irak yang telah terbukti memiliki cadangan 112,5 milyar barel yang merupakan cadangan terbesar kedua di dunia. Dan menurut *US Energy Information Administration* (USEIA), cadangan tersebut "bisa saja" dan " kemungkinan" bernilai 220 milyar barel (terdapat banyak kontroversi atas angka-angka di atas karena metode penghitungan yang dipakai oleh sebagian besar negara-negara anggota OPEC bukanlah metode yang transparan). Dari riwayatnya, minyak di sana, selama ini, memang belum dieksploitasi secara besar-besaran. Pada dasawarsa 1960-an, sebagian karena Hukum 80 yang tersebut di atas, perusahaan minyak Barat menolak untuk mengembangkan pertambangan minyak Irak ataupun untuk "menggali" minyak dalam jumlah yang berarti dari negara itu. Pada dasawarsa 1980-an, selama perang brutal dengan Iran, eksplorasi minyak menjadi tidak memungkinkan, dan kapasitas minyak yang dipompanya pun menurun. Pada dasawarsa 1990-an, sanksi menjadikan eksplorasi tidak mungkin dilakukan sama sekali. Sebagai hasilnya, hanya 15 dari 73 ladang-ladang minyak yang ditemukan di Irak yang bisa dikembangkan. Secara kasar hanya terdapat 2.000 pengeboran sumur minyak di Irak, dibandingkan dengan angka 1 juta sumur di Texas.[180)]

Jadi, keseluruhan pertimbangan yang didasari oleh minyak telah semakin diperbesar karena insentif potensialnya. Paling tidak, ada empat alasan yang membuat perang menjadi relevan:

> minyak sebagai hadiah material: perang akan meningkatkan peranan perusahaan minyak Amerika Serikat dalam mengeksploitasi minyak Irak.

- minyak sebagai alat politik: pendudukan Amerika Serikat di Irak, diikuti oleh pembentukan rezim boneka, akan membawa pengaruh besar atas aliran minyak Irak. Bersama tindakan lainnya (di bawah), hal ini akan membuat Amerika Serikat mampu untuk menggeser OPEC sebagai kekuatan yang mengontrol minyak di pasar global. Dengan kata lain, perang telah menjadikan Irak sebagai bagian dari NATO (tidak masalah, benar atau tidaknya secara formal Irak akan bergabung; yang relevan adalah, telah terjadi dominasi oleh militer Amerika Serikat) dan Amerika Serikat adalah bagian dari OPEC.
- minyak dan mata uang euro: Denominasi minyak terhadap dolar membantu menyokong penguatan dolar bahkan pada saat Amerika Serikat sedang mengalami defisit neraca seperti terjadi saat ini. Peralihannya menjadi denominasi terhadap euro tidak akan dimungkinkan jika Amerika Serikat mampu memperluas kontrolnya atas minyak dunia.
- minyak dan kebutuhan dunia yang semakin meningkat: kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, ditambah lagi dengan faktor-faktor setempat, membuat kapasitas pertambangan minyak di Timur Tengah berada pada angka yang rendah, sementara, pada saat ini permintaan dunia akan minyak Timur Tengah tengah diproyeksikan untuk naik berlipat-ganda. Hal ini mudah ditanggulangi dengan investasi baru, teristimewa jika tersedia sedikit saja dana yang kini dilarikan oleh para elit negara-negara Teluk agar bisa ditanamkan kembali di tanah airnya. Akan tetapi, perang yang diikuti oleh investasi Amerika

Serikat akan memberi pengaruh yang kuat dan saham terbesar atas minyak Timur Tengah ini.

MINYAK SEBAGAI HADIAH MATERIAL

Terdapat dua komponen atas pertimbangan minyak sebagai hadiah material: pertama, laba yang diperoleh dari konsesi minyak (minyak adalah unik di antara komoditas lain, yaitu sumber laba utamanya adalah hasil produk "hilir", bukan "hulu" dalam penyulingan dan pemasaran ecerannya); dan yang kedua, investasi petrodolar. Kedua pertimbangan tersebut adalah sangat berarti bagi strategi jangka panjang Amerika Serikat untuk menyangga elit feodal yang lemah dan despotis di seluruh wilayah tersebut. Pertama, elit feodal ini, yang tidak tertarik untuk menyejahterakan rakyatnya, menandatangani dengan suka hati persetujuan dengan sejumlah perusahaan minyak Barat. Kemudian, kalangan elit tersebut pun mulai mengambil porsi keuntungan yang lebih besar buat pribadi mereka sendiri, terutama setelah program nasionalisasi pada dasawarsa 1970-an. Kini, pertimbangannya hanyalah demi menarik minat mereka agar dengan senang hati mau menanamkan uangnya dari laba minyak tersebut untuk diinvestasikan kembali di Amerika Serikat dan Eropa, daripada untuk membangun bangsanya sendiri.

Pada dasawarsa 1990-an, Arab Saudi dan negara-negara Teluk yang kecil lainnya, memutar puluhan milyar petrodolarnya di Amerika Serikat hanya dalam transaksi pengadaan persenjataan saja. Sekarang ini, diperkirakan total pelarian modal Arab adalah mencapai antara dari $1-1,2 trilyun,[181] suatu angka-angka yang

menakjubkan, dan paling tidak sama besarnya dengan dua kali nilai GDP negara-negara dunia Arab. Tidak seperti konsesi minyak, yang khususnya hanya menguntungkan perusahaan minyak, investasi petrodolar ini menguntungkan keseluruhan perusahaan-perusahaan Dunia Pertama.

Penjualan persenjataan dan investasi petrodolar membantu kita untuk memahami satu pertanyaan lazim dari mereka-mereka yang tidak percaya bahwa kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah semata-mata hanyalah untuk menikmati keuntungan dari minyak di wilayah tersebut: Jika kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah adalah tentang minyak, mengapa Amerika Serikat tidak menggunakan pengaruhnya atas Kuwait setelah invasi Irak untuk memaksa Kuwait menswastakan kembali minyaknya? Tidak saja tindakan ini—yang secara lahiriah merupakan cara-cara kolonial—akan mendapatkan banyak tantangan politis, hal ini pun tidak akan menambah keuntungan lebih besar lagi bagi perusahaan Amerika, karena Kuwait *sudah* menginvestasikan dananya di sana.

Karena banyak perusahaan minyak nasional mulai mencari persetujuan eksplorasi minyak dengan perusahaan-perusahaan asing yang besar selama dasawarsa 1990-an, maka isu mengenai laba langsung kembali menjadi penting. Karenanya, Amerika Serikat telah menempatkan dirinya di dalam satu keterikatan; di satu pihak, sanksi terhadap Irak dan Iran telah menyia-nyiakan peluang emas bagi perusahaan minyak Amerika Serikat atas adanya persetujuan eksplorasi bersama yang ditawarkan kedua negara tersebut, dan di lain pihak, pada saat itu, tampaknya tidak ada jalan keluar buat

kemelut politik yang sedang terjadi. Itulah sebanya mengapa Wakil Presiden Cheney mengeluhkan tentang penetapan sanksi, terutama sanksi sepihak, karena dia juga merupakan pimpinan Halliburton, hingga katanya, sanksi malah telah menghukum perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat.[182)]

"Penggantian rezim" di Irak bisa jadi merupakan senjata ajaib dalam kasus minyak Irak serta Iran. Awalnya, ada sedikit keraguan atas pendudukan militer Amerika Serikat yang mungkin akan berpengaruh terhadap akses perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk mendapatkan konsesi minyak. Pada bulan Oktober 2002, Irak menandatangani total $38 milyar nilai transaksi minyak pada ladang-ladang minyak baru dengan potensi kapasitas produksi mencapai 4,7 juta barel per hari (*million barrels per day* = mbd). Bandingkanlah angka tadi dengan kapasitas maksimum saat ini yang dalam teorinya cuma mampu mencapai 2,8-2,9 mbd.[183)] Padahal, transaksi di atas tidak satu pun melibatkan perusahaan minyak Amerika. Yang terbesar adalah dengan perusahaan Rusia, Lukoil, di ladang minyak Qurna Barat, yang diperkirakan berkapasitas 11-15 milyar barel (belakangan, transaksi ini dibatalkan oleh Irak, tetapi perusahaan Rusia lainnya sudah mengincarnya pula) dan TotalFinaElf, sebuah kartel minyak Prancis, yang memiliki konsesi di ladang minyak Majnoon, dengan angka perkiraan 12-30 milyar barel.

Beragam upaya dilakukan sejumlah media untuk memberi kesan bahwa satu-satunya peran dari "negosiasi" minyak Irak hanyalah keinginan Prancis dan Rusia yang kemaruk dalam menjaga konsesinya. Bahkan sebelum terjadinya perang, banyak pembicaraan telah

dilakukan untuk membahas peran dari perusahaan minyak AS[184)]—Ahmed Chalabi, yang memandang dirinya akan punya peranan sebagai pemimpin Irak di masa depan, menuturkan kepada *Washington Post*, pada bulan September 2002, "perusahaan Amerika akan punya peranan besar atas minyak Irak."[185)] Pada bulan Oktober 2002, direktur pelaksana British Petroleum, yang merasa tersinggung atas laporan tersebut, secara terbuka memperingatkan Amerika Serikat agar "hendaknya ada kesempatan yang setara di antara perusahaan-perusahaan minyak"[186)] atas konsesi minyak, di masa pasca-Perang Irak.

Karenanya, adalah bernilai untuk memandang bahwa pengaruh sanksi yang paling signifikan terhadap Irak, selain dari pertimbangan atas uang ekstra Saudi Arabia yang berlimpah yang akan dibelanjakan di Amerika Serikat, adalah menghentikan sementara kontrol Irak atas minyaknya sendiri selama dasawarsa 1990-an dan di awal abad keduapuluh satu. Meskipun minyak secara teknis masih diusahakan oleh perusahaan minyak nasionalnya sendiri, Irak memerlukan izin dari Komite Sanksi PBB agar dapat menjual minyaknya, dan hasilnya akan masuk ke dalam sebuah rekening bank yang dikuasai oleh Komite—yang berarti akan dikuasai oleh tekanan Amerika Serikat. Tidak akan ada satu keputusan tentang investasi dalam bentuk peralatan maupun eksplorasi yang bisa diwujudkan tanpa restu Amerika Serikat. Kemudian, penggantian rezim akan semakin menjauhkan dan meminimalkan kontrol Irak atas minyak mereka sendiri.

Perang Amerika Serikat terhadap Irak telah menghasilkan lingkaran militerisasi yang hampir sempurna yang mengelilingi Iran (Amerika Serikat telah menem-

patkan pasukan di Turki, Irak, Afghanistan, Pakistan, dan bahkan sebagiannya di Turkmenistan, ditambah lagi di Teluk Persia dan Selat Hormuz, yang merupakan rute yang dilalui oleh kapal-kapal tanker yang sebagian besar dimiliki Iran). Para neokonservatif telah siap untuk mencari kemungkinan untuk memanfaatkan pengaruh tersebut untuk menekan Iran lebih jauh agar masuk ke dalam lingkaran Amerika Serikat.

Bagi mereka, laba yang nantinya akan diterima oleh perusahaan minyak Amerika Serikat merupakan sebuah alasan yang cukup untuk memulai perang. Padahal, beberapa dari perusahaan tersebut akan berjalan dengan lebih baik, paling tidak dalam jangka pendek, jika biaya perang dan pendudukan tadi diberikan kepada mereka. Kadangkala, dana pemerintah memang diperlukan untuk berlaku sebagai sumber subsidi bagi perusahaan-perusahaan, meskipun secara tidak efisien dan tidak langsung. Jika subsidi tersebut diberikan secara langsung, akan timbul berbagai problem politik. Karenanya, cara di atas bisa dipandang sebagai salah-satu pertimbangan yang penting.

MINYAK SEBAGAI ALAT POLITIS

Jika kita kembali kepada pernyataan yang dilontarkan Departemen Luar Negeri, ada satu catatan bahwa fokus atas minyak merupakan "sumber daya yang sangat strategis," dengan "hadiah material" sebagai imbuhannya. Minyak bukan saja merupakan komoditi yang paling banyak diperdagangkan dalam jumlah yang berarti di dunia, lebih jauh lagi, minyak adalah komoditi strategis yang paling penting, karena setiap negara memerlukan

minyak untuk menjalankan roda pembangunannya. Pihak yang mampu mendapat kontrol atas aliran minyak, maka akan memperoleh imbalan yang jauh lebih besar lagi. Pengontrolan atas harga minyak juga akan mengarahkan kepada pengaruh politis yang kuat.

Karena negara-negara besar yang bergantung kepada minyak Timur Tengah adalah Uni Eropa, Jepang, dan belakangan ini, Cina, maka kontrol atas minyak Timur Tengah agaknya diperlukan terutamanya untuk menekan persaingan atau potensi persaingan dari mereka.

Hanya dengan kehadiran militernya di wilayah tersebut, bagi Amerika Serikat sudah merupakan satu mekanisme kontrol yang penting. Sejak Perang Teluk I, dengan keberadaan militer Amerika Serikat di sana, Saudi Arabia membuat semua keputusannya dan mampu mengatur kuota produksi minyaknya (dan sekaligus harganya, karena Saudi Arabia adalah pelaku besar dalam pasar minyak dunia) sehingga bisa disesuaikan dengan prakiraan Amerika Serikat. Pada saat itu, setiap kali Irak mengumumkan pemotongan produksi atas alasan politis, yang ujungnya akan meningkatkan harga minyak, Saudi Arabia mengimbanginya dengan meningkatkan pula produksi. Pada akhir Februari 2003, Saudi Arabia menjanjikan pejabat Amerika Serikat bahwa pada saat perang Irak berlangsung mereka akan menambah produksinya sebanyak 1,5 juta barel per hari (mbd), yang secara kasarnya bisa menutup produksi minyak Irak pada saat itu sebesar 2,2 mbd.[187)] Sebelumnya, ada masa, seperti peristiwa embargo pada tahun 1973, ketika Saudi Arabia tidak terlalu menuruti kehendak Amerika Serikat.

Penggantian rezim di Irak mungkin akan membuat Irak keluar dari OPEC dan akan meningkatkan produksi

hariannya secara drastis (para anggota OPEC dengan sukarela menentukan sendiri kuotanya masing-masing untuk menjaga harga minyak tetap dalam kisaran harga tertentu; secara umum, mereka menghasilkan persentase yang lebih kecil atas cadangan minyaknya per tahun daripada negara-negara produsen minyak non-OPEC). Irak mungkin akan beraksi sebagai pengimbang bagi OPEC, sehingga secara dramatis akan mengurangi kemampuan OPEC untuk menyetir harga. Bersama-sama dengan meningkatnya campur tangan Amerika Serikat dalam produksi minyak di Asia Tengah, Angola dan Kamerun (keduanya bukan anggota OPEC) dan mungkin mengajak pula Nigeria.[188)] untuk meninggalkan OPEC, maka perang merupakan sebuah mekanisme yang berarti untuk menggeser kekuatan dan pengaruh atas pasar minyak dunia dari OPEC ke Amerika Serikat (melalui rezim boneka dan melalui perusahaan minyak Amerika Serikat).

MINYAK DAN EURO

Keprihatinan lain yang berhubungan dengan minyak adalah sedikit musykil. Saat ini, harga minyak dunia dipatok dalam dolar. Ini berarti, Amerika Serikat memiliki hak khusus untuk secara mudah mencetak uang dan membeli minyak dengan uang tersebut. Sejak medio dasawarsa 1980-an, Amerika Serikat hingga saat ini berada dalam kondisi neraca yang defisit. Pada tahun 2002, defisit pedagangannya mencapai $435.2 milyar, angka yang paling besar sampai saat ini, sementara defisit neracanya lebih dari $500 milyar (sederhananya, neraca berjalan adalah selisih antara pendapatan bersih

dengan pembayaran netto; dan sedikit perbedaannya dari neraca perdagangan adalah karena memasukkan beberapa faktor arus keuangan).[189)]

Negara-negara normal lainnya tidak akan mampu menanggung defisit sebesar itu selama jangka waktu yang panjang tanpa mendevaluasikan mata uangnya dalam tingkat yang signifikan; kendati begitu, sepanjang dasawarsa 1990-an dolar tetap kuat. Ada beberapa alasan untuk percaya bahwa denominasi dolar atas minyak punya pengaruh terhadap hal tersebut, walaupun kekuatan dolar tak pelak lagi sebagiannya secara tidak langsung dipengaruhi pula oleh kekuatan politis dan militer Amerika Serikat yang berlimpah, sehingga membantunya untuk menghadang arus masuk investasi asing yang begitu kuat.

Dengan kebangkitan euro pada tahun 2000, besar kemungkinan hal tersebut bisa berubah. Fakta memperlihatkan, Irak segera bertindak untuk mulai mengganti denominasi penjualan minyaknya ke euro, sebagai suatu pernyataan politis terhadap Amerika Serikat. Belakangan, Iran dan Venezuela, yang prihatin atas kebijakan Amerika Serikat kepada kedua negara ini, juga mulai mempertimbangkan kemungkinan ini (anehnya, Korea Utara menetapkan denominasi nilai impornya dalam euro juga). Jikalau tiga produsen minyak yang besar sudah mulai menggunakan euro, maka dolar akan mendapat tekanan besar. Pertimbangan ini dipandang oleh beberapa pihak sebagai "satu-satunya" alasan bagi perang; sudah barang tentu, tidak demikian adanya. Sesungguhnya, dampak perang terhadap pertimbangan ini bisa jadi bisa bermata-dua; yang pertama, meningkatnya agresivitas kebijakan Amerika Serikat membuat Irak

beralih, dan Iran serta Venezuela mempertimbangkan untuk beralih, tetapi, di lain pihak, jika Irak menjadi produsen minyak besar dengan keterikatan kuat dengan Amerika Serikat, maka pengaruh Amerika Serikat untuk menentang peralihan ke euro akan lebih kokoh. Pertanyaan ini juga berhubungan erat dengan—dan menjadi alasan untuk—mendapatkan kontrol atas minyak yang lebih besar. Selanjutnya, hegemoni dolar secara umum, apakah melalui penggunaan dolar sebagai cadangan mata uang secara global, atau meningkatnya jumlah negara-negara yang mematok nilai tukar mata uangnya terhadap dolar, ataukah denominasi dolar dalam pasar minyak dunia secara mudahnya merupakan pencerminan dari hegemoni politik Amerika Serikat, selain penting juga untuk menjaga perekonomian Amerika Serikat.[190)]

MINYAK, KEBUTUHAN DUNIA YANG SEMAKIN MENINGKAT, DAN TIMUR TENGAH

Kendati perang bukanlah semata-mata tentang akses kepada minyak, alasan akhirnya tentu ada hubungannya dengan jumlah minyak di dunia pasar. Konsumsi minyak dunia meningkat dengan sangat cepat, tetapi produksi negara-negara non-OPEC telah mencapai angka puncaknya. Timur Tengah memiliki dua pertiga cadangan minyak dunia dan akan semakin penting sebagai sumber minyak di masa depan—menurut kebijakan energi pemerintahan Bush-Cheney, pada tahun 2020 minyak Teluk Persia akan menyuplai antara 54 dan 67 persen kebutuhan dunia. Menurut USEIA, konsumsi minyak dunia akan meningkat dari 75 mbd pada tahun 1999

menjadi 119 pada tahun 2020. Jadi, produksi minyak Timur Tengah harus ditingkatkan lagi secara dramatis.

Akan tetapi, atas beragam alasan, kapasitas produksi OPEC berada dalam tingkat yang lebih rendah pada tahun 2003 dibandingkan angka produksinya pada tahun 1980.[191)] Arab Saudi secara umum dipandang mampu meningkatkan kapasitasnya, tetapi dia hanya sendirian. Produksi Iran dan Irak secara dramatis telah menurun secara drastis.

Sebagian dari problem ini dapat dirunut pada kebijakan Amerika Serikat sendiri. Perang Iran-Irak, yang didukung Amerika Serikat sepenuhnya, telah mengarah pada berkurangnya kemampuan produksi kedua negara tersebut secara permanen. Sanksi yang dibebankan kepada Irak dan Iran telah menghentikan eksplorasi dan membuat Iran kesulitan untuk mengembangkan kapasitasnya, dan Irak malah mustahil untuk bisa membangun industri minyaknya. Negara-Negara Teluk yang lebih kecil, pada dasarnya, tidak punya alasan kuat untuk meningkatkan kapasitasnya, karena kecilnya angka populasi yang harus mereka santuni kesejahteraannya. Iming-iming investasi petrodolar di negara-negara asing telah membuat wilayah tersebut kekurangan modal untuk lebih jauh melakukan eksplorasi minyaknya.

Dengan kapasitas cadangan produksi hampir nihil (hanya Saudi Arabia yang mampu menambah dalam jumlah yang berarti), diperlukan peningkatan kapasitas produksi secara besar-besaran, kecuali jika terjadi pemotongan tingkat konsumsi minyak (yang diperlukan juga untuk menghentikan pemanasan global).

Kendati perang baru ini tidak berlangsung, beberapa anggota OPEC telah mengundang datangnya investasi

dari perusahaan-perusahaan asing. Venezuela, yang sama-sama kekurangan modal dalam negerinya—gejala yang terjadi pada sebagian besar negara Dunia Ketiga dalam beberapa tahun terakhir—sudah dari semenjak awal dasawarsa 1990-an membutuhkan investasi asing untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Iran dan Irak demikian pula. Bahkan Arab Saudi, yang tidak memperbolehkan konsesi minyaknya dipegang orang asing, baru-baru ini memberi konsesi eksplorasi gas alamnya kepada ExxonMobil, Shell, dan perusahaan lainnya.[192)]

Kendati perang bukan merupakan kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak Timur Tengah, atau bahkan Irak, perang dibutuhkan jikalau Amerika Serikat masih ingin memegang kendali dari proses tersebut.

Dengan menggabungkan isu investasi asing yang semakin meningkat dengan rencana untuk meningkatkan kontrol Amerika Serikat atas minyak, maka yang akan terlihat adalah kebangkitan kembali kolonialisasi atas cadangan energi Timur Tengah. Visi para neokonservatif yang memimpikan ideologi besarnya semakin bersesuaian dengan kebutuhan untuk menancapkan kekuatannya pada perekonomian global, buah kebijakan Amerika Serikat di wilayah-wilayah tersebut, dan rancangan yang didisain oleh perusahaan minyak Barat, terutama Amerika.

Minyak memang berada di balik perang ini. Terutama, minyak sebagai sebuah komponen kekaisaran dan yang kedua, minyak sebagai komponen untuk mengenyangkan Dick Cheney, Halliburton, dan jawara-jawara minyak Amerika Serikat lainnya.

KESIMPULAN
Imperialisme Baru



SUDAH KADALUARSA UNTUK mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Pemerintahan Bush adalah imperialisme baru. Politikus aliran utama, seperti ketua Partai Demokrat Liberal di Inggris, telah memakai istilah tersebut. Jurnalis seperti Jay Bookman, yang menjadi wakil editor *Atlanta Journal-Constitution*, juga menggunakannya.[193)] Bahkan para pembela kebijakan ini pun memakai istilah tersebut—seperti Michael Ignatieff, yang menulis di majalah edisi Ahad *New York Times* tentang "kasus imperialisme liberal."

Inilah faham imperialisme baru yang menghantam kolonialisme dalam berbagai cara. Faham ini juga memasukkan sejumlah retorika kecongkakan yang mencerminkan sifat para unilateralis yang ekstrim.

Akan tetapi, bisnis tetap berjalan seperti biasa—penggambaran ulang peta wilayah Timur Tengah hampir tidak mungkin terjadi, dan keutuhan teritorial Irak tetap

terjaga. Dominasi perekonomian Amerika Serikat di dunia berlangsung seperti biasa. Dan, sesungguhnya, elemen utama imperialisme militer yang baru sudah dibayangkan sejak masa kabinet Clinton yang kedua. Peningkatan anggaran belanja militer dimulai pada saat itu, sebagaimana juga "perluasan NATO," yang diungkap dengan jelas oleh mesin-mesin politis atas "*coalition of the willing* (persekutuan mereka-mereka yang sudi)" sebagai instrumen—bersama perluasan Uni Eropa—untuk menancapkan pengaruh politis Amerika Serikat atas Uni Eropa. Kasus serupa terjadi juga dengan hukum internasional—faktanya, meski sang "multilateralis" Bill Clinton secara blak-blakan mencemooh Dewan Keamanan sewaktu dia akan memulai kampanye Rubah Gurun pada tahun 1998 dan mengabaikannya ketika perang terhadap Yugoslavia pada tahun 1999, "unilateralis" George W. Bush datang ke Dewan Keamanan untuk mendapatkan resolusi atas Irak.

Lebih jauh lagi, kebijakan Amerika Serikat sejak Perang Dunia II selalu imperialistik, walaupun kadangkala lebih banyak tersamar dibandingkan pada saat ini.[194] Dalam sebuah dokumen perencanaan kebijakan tahun 1948, George Kennan membeberkan alasan tersebut secara cukup terbuka (dalam konteks "Timur Jauh," tetapi bisa dengan mudah kita perluas):

Kita memiliki sekitar 50 persen kemakmuran dunia tetapi hanya 6.3 persen populasinya.... Pada situasi ini kita tidak boleh lalai sehingga menjadi objek kecemburuan dan kebencian. Tugas sejati kita ke depan adalah untuk mendapatkan pola hubungan yang akan membuat kita tetap berada dalam posisi yang senjang ini tanpa mendatangkan ancaman berarti bagi keamanan nasional

kita. Untuk itu, kita harus membuang seluruh sentimen dan impian, serta segenap perhatian harus kita konsentrasikan ke semua arah yang menjadi tujuan nasional kita. Kita tidak perlu menipu diri kita sendiri bahwa kita mampu menikmati kemewahan dengan berempati dan memikirkan kemaslahatan dunia.

Dia melanjutkan dengan, "Kita harus berhenti membicarakan hal-hal yang samar-samar tersebut dan—untuk Timur Jauh—tujuan yang tidak realistik seperti hak-hak asasi manusia, meningkatkan harkat hidup dan demokratisasi. Masanya semakin mendekat ketika kita akan berurusan dengan konsep kekuasaan yang sepenuhnya. Semakin sedikit kita terhalang oleh slogan ideologis semacam itu, semakin baik bagi kita."[195)] Sejarah mencatat, terutama oleh Noam Chomsky, "pola hubungan" yang disebut Kennan menjadi kenyataan dalam bentuk campur-tangan atas perekonomian negara-negara lain untuk melayani kebutuhan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, dan penetapan pola ini telah menggunakan semua cara dari subversi dan manipulasi sampai pengerahan pasukan secara ekstrim.

Jadi, apa yang spesial dari imperialisme yang paling mutakhir ini?

Unipolaritas: Ini adalah karakteristik yang menjadi dasar dan faktor yang menentukan, yang memberi kemampuan bagi faktor-faktor lainnya. Ketika Uni Soviet berkuasa, terdapat dua perbedaan. Perbedaan yang kecil adalah bahwa Uni Soviet memiliki—setidaknya potensi—militer yang bisa mengimbangi Amerika Serikat. Ini jarang sekali mewujud, karena Uni Soviet biasanya memandang dirinya sebagai kekuatan regional, bukan adidaya dunia. Uni Soviet bahkan tidak menghalangi

ketika Amerika Serikat secara dramatis meningkatkan pengaruhnya dengan kudeta yang dilakukannya tahun 1953 di Iran. Pada peristiwa Perang Vietnam, Uni Soviet cuma bertindak minimal. Akan tetapi selalu ada potensi, malah kadangkala diwujudkan—ketika menghentikan Perang Yom Kippur tahun 1973 sebelum Mesir hancur dikalahkan. Eksistensinya adalah selalu sebagai alat pencegahan parsial bagi penggunaan pasukan militer Amerika Serikat.

Dan yang terlebih penting, Uni Soviet berlaku sebagai ideologis tandingan. Sehingga warganegara Amerika harus hidup lebih baik daripada warganegara Soviet; bahkan lebih penting lagi, sekutu-sekutu Amerika Serikat harus berada dalam kondisi yang lebih baik, paling tidak dalam beberapa kasus seperti Korea Selatan dan Taiwan, daripada sekutu-sekutu Soviet. Kini, dengan hilangnya tantangan kekuatan, tidak ada satu pun penghalang bagi imperialisme Amerika Serikat. Eropa telah dibangun kembali dan secara simultan diajak ke dalam lingkaran Amerika setelah Perang Dunia II dengan biaya yang mahal, tetapi Afghanistan tidak akan dibangun kembali kendati dengan biaya cuma beberapa milyar dolar, sungguhpun telah nyata signifikansinya sebagai lahan pembibitan bagi gerakan Islam radikal. Di Irak, industri perminyakan akan dibangun kembali dan, karena tekanan publik, segelintir upaya rehabilitasi umum akan dilakukan, tetapi negara ini akan tetap dibiarkan terpecah-belah, dengan strata masyarakat bawahnya semakin tidak mampu untuk menghidupi diri mereka sendiri. Amerika Serikat tidak perlu melaksanakan beragam upaya menuju kemakmuran negara itu sebagaimana diperlukan dalam dunia yang bipolar.

Dan, tentunya, Amerika Serikat tidak terhalang lagi pada semua perang yang direncanakannya di masa depan, karena memang tidak ada lagi ancaman perlawanan dari kekuatan yang setara. Sehingga serangkaian kecil perang terhadap sasaran yang tak berdaya atau hampir tak berdaya adalah kemungkinan yang riil—Iran, Suriah, Libya, Korea Utara. Tekanan politis yang normal secara umum akan diabaikan, walaupun, tentunya, kenyataan adanya kekuatan militer seperti yang dimiliki Korea Utara yang punya kemampuan untuk mempertahankan diri harus tetap diperhatikan.

Komitmen untuk memelihara unipolaritas ini adalah suatu unsur imperialisme yang baru. Terdapat dua potensi ancaman—Uni Eropa dan Cina (dan yang ketiga, Jepang, jauh di belakangnya). Sejauh ini, Uni Eropa adalah ancaman perekonomian yang utama, yang akan kita bahas nanti. Sasaran utama berikutnya yang dituju oleh arsitek kebijakan luar negeri, para neokonservatif, adalah Cina, satu-satunya negara besar yang dengan sengaja menolak untuk bergantung kepada dominasi Amerika Serikat. Jika Cina bisa "ditahan," maka, demikian fantasi para neokonservatif, perlawanannya mustahil bisa terlaksana.

Tindakan pencegahan dan deklarasi imperial lainnya: Tidak ada lagi dalih bahwa Amerika Serikat beraksi sebagai reaksi terhadap ancaman dari negara lain: "Pada era pasca-Perang Dingin, Amerika dan sekutunya...telah memiliki persenjataan nuklir utama." Karenanya, kini agresi dilakukan semata-mata atas kehendak Amerika Serikat sendiri, bahkan bukan subjek yang harus dikonsultasikannya dengan Eropa, sekutu lamanya. Kebijakan baru berbentuk "penggantian rezim" adalah serupa—

secara blak-blakan Amerika Serikat menyatakannya sebagai "hak"—meski saat ini masih dalam bentuk implisit—bagi Amerika Serikat untuk mendikte kehendaknya. Yang diinginkannya, bukan hanya perubahan atas kebijakan tertentu dari negara-negara tersebut tetapi keseluruhan bangunan pemerintahan dan kalangan pemerintahnya.

Merkantilisme militer: Secara garis besar, istilah ini merujuk pada kebijakan yang dirancang untuk mencukupkan neraca pembayaran ataupun neraca berjalan agar menunjukkan angka yang positif, semakin besar semakin baik. Cara ini telah telah dipakai oleh kekaisaran Inggris, yang sampai Perang Dunia I neracanya selalu berada dalam keadaan surplus. Amerika Serikat punya defisit neraca yang meraksasa. Sebagaimana dibahas sebelumnya, secara normalnya situasi ini akan semakin melemahkan mata uangnya, dan akan mengarah kepada hilangnya keunggulan perekonomian.

Pada beberapa isu, Amerika Serikat menggunakan beragam upaya *mercantilisme* untuk menutup kemungkinan ini. Pemerintah Amerika Serikat mengenakan tarif baja dan anggaran subsidi pertanian yang membengkak merupakan sebagian upaya untuk mendapatkan dukungan publik domestiknya, tetapi hal ini pun merupakan pernyataan yang jelas bahwa Amerika Serikat tidak menghendaki jika kecaman dari *World Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Dunia) akan menghalanginya bertindak keras dalam membela kepentingan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dengan mengorbankan pihak lain (walaupun Amerika Serikat akan tetap, tentunya, menyetir WTO untuk menyetop negara-negara lainnya yang ingin menggunakan cara yang sama).

Akan tetapi, cara utama untuk menyangga dominasi perekonomian Amerika Serikat adalah pemanfaatan militernya, baik secara langsung maupun tidak, untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, berlawanan dengan "globalisasi" ala Clinton, kita pahami bahwa perang khususnya—bukan kebijakan—akan menguntungkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di atas pengorbanan sekutu Eropanya, seperti pendirian WTO, yang kasarnya ditujukan untuk membawa keuntungan sebesar-besarnya kepada perusahaan-perusahaan Dunia Pertama. Eropa punya perekonomian yang kurang lebih setara dengan Amerika Serikat, tetapi secara politis Eropa bukan bandingannya. Kini, agenda dunia diarahkan oleh Amerika Serikat—kita punya Konsensus Washington, bukan Konsensus Brussels. Ini adalah suatu kebenaran kendati terjadi passiva perekonomian karena tingkat konsumsi besar-besaran Amerika Serikat. Perbedaan yang membolehkan Amerika Serikat untuk tetap memelihara hak istimewanya ini pastilah kekuatan politis yang datang dari supremasi militer dan kehendak untuk menggunakannya jika perlu. Kecenderungan yang tampak yang menuju ke arah aliran pemikiran ini di tahun-tahun akhir masa Clinton, sejak tragedi 11 September telah mencapai puncaknya.

Hal yang berkaitan dengan ini adalah pengabaian peran lembaga-lembaga keuangan multilateral. Mantan Menteri Keuangan, Paul O'Neill, melakukan upaya terbaiknya untuk mendangkalkan upaya lembaga-lembaga perekonomian multilateral seperti Bank Dunia dan IMF. Upayanya yang paling terkenal adalah sindiran bahwa Brazil tidak boleh diberi bantuan keuangan karena uangnya akan berujung di "rekening bank Swiss,"

komentar yang membuat nilai tukar riil Brazil menjadi turun secara drastis, dan juga menimbulkan kemarahan para bankir di dunia.[196)] Kondisi ini diikuti dengan tindakan Amerika Serikat untuk menyediakan bantuan keuangan bilateral, dengan proposal meningkat jumlahnya dua kali lipat pada tahun 2006.[197)] Sebagai alat untuk mendapat pengaruh perekonomian dan politis, bantuan bilateral dapat dilakukan langsung oleh Amerika Serikat tanpa perlu memperdulikan Jerman, Prancis, dan Jepang. Jumlah uangnya mungkin relatif kecil, tetapi retorika penentangan terhadap IMF dan Bank Dunia sangat besar.

Penyatuan "kepentingan strategis" Israel dan Amerika di Timur Tengah: Satu pertanyaan yang bergantung di bibir semua orang adalah peran para pendukung Israel dalam kebijakan luar negeri yang baru ini. Tak pelak lagi, mereka berada dalam pengawasan semua orang; tak ayal lagi, mereka juga punya kekuasaan yang berarti di Capitol Hill dan pada sebagian besar masyarakat Amerika Serikat, terutama jika digabungkan dengan *Christian Right*. Mereka punya kesesuaian yang kuat atas kesamaan budaya—Israel selalu dipandang sejak zaman berdirinya gerakan Zionis sebagai pos terdepan Eropa di Timur Tengah.

Akan tetapi, meskipun banyak kesamaan, masyarakat sama-sama meyakini bahwa para pendukung Israel tidak mengatur semua hal di Washington. Amerika Serikatlah adidayanya dan kalangan elit Amerikalah yang dilayani oleh pemerintah. Apa yang terjadi adalah, dengan runtuhnya Uni Soviet, semakin dekat dan semakin besar pula unsur pemersatu atas "kepentingan strategis" di antara Amerika Serikat dan Israel. Buat kelompok pro-

Sharon di Israel, dan para neokonservatif di Amerika Serikat, penyatuannya hampir sempurna.

Alasannya sederhana—dalam perhitungan para pembuat kebijakan, negara-negara Arab tidak punya pilihan lain. Mereka tidak bisa masuk ke dalam lingkaran Soviet; mereka, sudah barang tentu, tidak akan mampu membuat kebijakan perekonomian yang independen sebagaimana terjadi di setiap negara Dunia Ketiga. Ketika Israel menduduki bagian selatan Lebanon pada tahun 1982, beberapa pembuat kebijakan Amerika Serikat sangat prihatin tentang kemungkinan ketidakpuasan negara-negara Arab sehingga mereka akan memalingkan muka ke Uni Soviet. Sekarang ini, Amerika Serikat dapat dengan mudah menyatakan sokongan dengan lebih banyak dan lebih terbuka atas kebijakan "Israel yang Agung"—dan itulah yang sedang terjadi, kendati dalam retorikanya, Amerika Serikat menyokong pendirian "negara Palestina."

Perkawinan real politik dan visi ideologi: Richard Perle dan Paul Wolfowitz adalah keturunan ideologis (dan mantan ajudan) senator Washington, Henry "Scoop" Jackson, liberalis utama semasa Perang Dingin; dia membuat gelombang pada dekade 1970-an dengan mengorbankan kepentingan perusahaan minyak karena kerakusan mereka mengejar laba yang mereka impikan hingga menyebabkan tindakan "menelantarkan" Israel. Perle dan Wolfowitz adalah kekuatan di balik kebijakan saat ini, yang dieksekusi oleh George W. Bush dan Dick Cheney, orang-orang minyak yang memang mewakili kepentingan industri minyak domestik. Colin Powell "sang negarawan" menekan melalui "diplomasi" internasional untuk memajukan rancangan otokrasi,

kaisar Donald Rumsfeld, dengan seenaknya menolak setidaknya dua dari sejumlah sekutu paling setia Amerika Serikat sebagai "Eropa kuno." Perkawinan ini dimungkinkan karena unipolaritas; karenanya, perkawinan ini akan membuat pihak ideolog fanatik menjadi lebih berbahaya dibanding sebelumnya.

RUNTUHNYA LEGITIMASI KEKAISARAN

Ada hal lain yang baru dari imperialisme baru ini. Yaitu, visi yang sangat gelap, bahkan lebih gelap, jika itu mungkin, daripada kelompok Clinton yang telah membawa dunia ke arah ketidaksetaraan, dengan benua Afrika, sebagian besar Asia Selatan, dan pedesaan di Cina sepenuhnya dilenyapkan. Visi yang lebih gelap ini pun telah kehilangan seluruh legitimasinya, bukan hanya terhadap masyarakat dunia tetapi terhadap beberapa elitnya pula.

Demonstrasi pada tanggal 15 Februari 2003, merupakan sesuatu yang baru dalam sejarah dunia. Di setiap negara, ada segelintir yang mengikuti kebijakan Amerika Serikat, mengerti isinya, dan mengambil sikap menentang. Tetapi, sebelas juta orang yang berbaris dalam protes atas perang terhadap Irak hanya merupakan sebagian dari fenomena yang lebih besar. Di Davos, dalam Forum Perekonomian Dunia, menurut sepucuk e-mail dari penulis *Newsday,* Laurie Garrett,[198)] yang tercecer dan terungkap isinya: suasana pesertanya lebih banyak anti-Amerika daripada sebelumnya. Pada tanggal 1 Maret 2003, Parlemen Turki sesungguhnya telah

menolak resolusi yang menyatakan izin dari Turki untuk digunakan sebagai area landas bagi perang—sungguhpun insentifnya adalah $15 milyar dalam bentuk bantuan dan hibah ditambah lagi ancaman nyata akan hukuman yang keras dari IMF. Prancis bukan hanya secara blak-blakan menentang nafsu berperang Amerika Serikat, Prancis bahkan melakukan "diplomasi"-balasannya dengan mengajak 52 bangsa-bangsa Afrika agar setuju untuk memberi pernyataan penangguhan waktu lebih banyak bagi Irak.[199)]

Pada konferensi AIDS global di Barcelona, ketika Menteri Kesehatan Amerika Serikat, Tommy Thompson, diejek oleh para demonstran, para hadirin di sidang itu malah memberi tepuk tangan bagi sang pengejek. Dan mereka yang hadir bukan datang dari bagian kumuh kota Manila atau Calcutta—mereka adalah pejabat pemerintahan dan perwakilan "penting" dari NGO. Pada Pertemuan Puncak Dunia tentang Pembangunan yang Berkesinambungan di Johannesburg, Colin Powell disoraki.

Pers melaporkan bahwa di seluruh dunia George W. Bush telah dipandang sebagai ancaman yang lebih besar bagi perdamaian dunia daripada Saddam Hussein atau Kim Jong Il atau siapa pun yang akan jadi sasaran Amerika Serikat mendatang.

Kekaisaran Amerika tidak pernah sebesar ini dalam artian kekuasaan mutlaknya, tetapi basis yang menyokong dan menyepakatinya semakin hari semakin melemah. Visi gelap ini bisa ditentang, dan mungkin malah bisa dihentikan.

RAYUAN DARI "KAUM BIJAK YANG TERSISA"

Pada masa puncaknya, baik di dalam maupun di luar negeri, gerakan antiperang di Amerika Serikat dinodai oleh beragam manusia yang menunjuk diri sendiri sebagai juru bicara yang dengan terencana mencekoki kita atas apa yang benar dan apa yang keliru dalam menentang perang. Bagi Todd Gitlin, Marc Cooper, Michael Walzer, Michael Berube, dan yang lain, adalah hak bagi kita untuk menentang perang terhadap Irak karena konsekuensinya tidak dipikirkan masak-masak, karena perang tersebut adalah "pelencengan" dari 'perang terhadap terorisme,' dan alasan-alasan serupa lainnya. Akan tetapi, bagi mereka—tidak dahulu dan tidak pula sekarang—kita tidak boleh mempertanyakan niat baik yang mendasari peran Amerika di dunia, tidak pula benar untuk menentang perang terhadap Afghanistan, dan tidak pula benar untuk menentang sanksi terhadap Irak ataupun untuk mendebat bahwa Irak tidak bersikap mengancam di luar perbatasannya.

Sebagaimana tulisan Walzer di *New York Review of Books*, "Pembelaan bagi embargo, penerbangan Amerika di atas wilayah negara lain, dan pemeriksaan persenjataan PBB: Ini adalah cara yang betul untuk menentang, dan mencegah perang."[200)] Embargo itulah yang telah menghancurkan tata masyarakat Irak, penerbangan Amerika di atas wilayah negara lain ditambah lagi dengan pengeboman itulah yang menjadi langkah awal sebelum perang diumumkan, dan pemeriksaan PBB itulah yang menyiapkan jalan buat Amerika untuk maju perang dengan cara melucuti persenjataan musuh yang menjadi sasaran Amerika Serikat.

Tanpa mempelajari lebih mendalam alasan mereka yang tendensius, atau tindakan yang telah mereka perbuat di dalam gerakan antiperang, peran yang terus-menerus mereka lakukan kini adalah sangat jelas. Mereka telah dan sedang mencoba untuk menjaga agar gerakan antiperang tidak berkembang menjadi gerakan yang lebih meluas massanya dan tidak berkembang menjadi gerakan antiimperialis, dua pertimbangan yang sangat berkaitan.

Bahaya dari pendekatan ini, kini, segera akan terbukti. Gerakan anti-Perang Vietnam yang diikuti oleh masyarakat umum selalu dijalankan lebih dikarenakan keprihatinan yang langsung ditunjukkan publik atas jatuhnya banyak korban prajurit Amerika yang terbunuh daripada masalah-masalah penting lainnya, dan banyak yang tetap memandang Perang Vietnam sebagai ketidaklaziman belaka, bukan buah dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu sendiri. Alhasil, pada saat Amerika Serikat menarik pasukannya pada tahun 1973, gerakan tersebut umumnya menghilang, kendati belakangan Amerika Serikat melanggar Kesepakatan Damai Paris dan tetap mempersenjatai Vietnam Selatan. Sejak tahun 1975 sampai tahun 1994, pada saat Vietnam menjadi subjek dari berbagai sanksi yang sangat melumpuhkannya, yang pernah diterapkan oleh Amerika Serikat (Irak adalah Nomor Satu), dan pada saat Vietnam kehilangan "perdamaian" dan lambat laun dipersiapkan bagi rekolonisasi, merupakan isu-isu yang tidak dipandang sebelah mata oleh gerakan antiperang.

Gerakan anti-Perang Teluk, yang semakin berfokus lebih kepada potensi jumlah warga Amerika yang bakal jadi korban dan semakin kurang siap untuk berhadapan dengan kenyataan hasil dari kebijakan luar negeri AS,

segera saja bubar. Hasilnya, ketika kelompok advokasi antisanksi Irak, *Voices in Wilderness*, terbentuk pada tahun 1996, mereka benar-benar menyuarakan hati nuraninya jauh dari dalam rimba belantara. Hanya sedikit yang memberi perhatian selama lima tahun kampanye berjalan, sementara, pada saat yang sama, rakyat Irak semakin menderita.

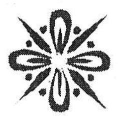
Perang terhadap Irak ditentang secara aktif di seluruh dunia, bukan hanya karena rasa simpati dan solidaritas yang dirasakan masyarakat terhadap rakyat Irak, tetapi karena publik tahu benar bahwa perang tersebut adalah lebih daripada sekadar masalah Irak belaka. Perang adalah sebuah langkah besar ke arah penghantaran visi gelap yang telah kita bahas di atas. Di dalam visi itu, tidak ada hukum di antara bangsa-bangsa, yang ada hanyalah hukum rimba; tidak pula tersedia lembaga yang berwenang kecuali militer Amerika dan perusahaan Amerika; gelombang pasang ketidaksetaraan perekonomian akan mencapai proporsi yang membahayakan; despotisme merebak di seantero planet yang semakin dipercepat untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek yang tidak halal dalam jumlah yang sebesar-besarnya; demokrasi hanya permainan yang dirancang untuk membodohi massa; benua Afrika, kecuali wilayah penghasil minyaknya, akan diasingkan sebagai Luar Kegelapan; dan keseluruhan gerakan demi keadilan dunia ditindas dengan segera hingga hancur tak bersisa.

Kegagalan gerakan anti-Perang Vietnam untuk menentang jerat yang perlahan-lahan mencekik Vietnam selama masa "perdamaian" adalah benar-benar sebuah tragedi. Kegagalan ini bisa dihindari jika kita punya pemahaman yang lebih baik akan situasi sebenarnya –

sebetulnya banyak pula yang memang menentang Perang Vietnam benar-benar karena kesadaran moral dan mereka ini langsung dipukul mundur oleh visi negara mereka sendiri, yang merupakan, sebagaimana penuturan Dr. Martin Luther King, Jr., "penyalur kekerasan terbesar di dunia saat ini." Jika saja penolakan moral tersebut bisa tumbuh di lahan yang subur, dan berkembang lestari sejalan dengan isu politik massanya, Amerika Serikat mungkin sekali akan menyumbangkan sesuatu yang unik bagi sejarah dunia: kekaisaran yang digantikan dan ditransformasikan oleh kekuatan visi moral warga-negaranya.

Amerika Serikat masih bisa melakukan itu.

CATATAN AKHIR:



1 "Russia Lawmakers Nix Erasing Iraq's Debt," Associated Press, 11 April 2003, www.guardian.co.uk/worldlatest/story/0,1280,2552984,00.html.

2 "Pentagon Expects Long-Term Access to Four Key Bases in Iraq," Thom Shanker, Eric Schmitt, *New York Times*, 20 April 2003.

3 "Contracts to Rebuild Iraq Go to Chosen Few," Jackie Spinner, *Washington Post,* 27 Maret 2003; "Bechtel Wins Iraq Reconstruction Contract," Larry Margasak, Associated Press, 17 April 2003.

4 "Iraq 'Mei Have to Quit Opec'," Oliver Morgan, *The Observer,* 27 April 2003, www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,944126,00.html.

5 "National Energy Policy," Report of the National Energy Policy Development Group, Mei 2001, Bab 8, h. 6, www.energy.gov/HQPress/releases01/Meipr/national_energy_policy.pdf.

6 "The Man Who Would Be King of Iraq," Ian Williams, AlterNet, 30 Maret 2003, www.alternet.org/story.html?StoryID=15512.

7 "Iraqi Leaders Gather Under U.S. Tent: Government Planning Meeting Is Denounced as Unrepresentative by Uninvited," Keith B. Richburg, *Washington Post,* 16 April 2002.

8 "Iraqi Exile Criticizes Contract Awards," Reuters, 19 April 2003.

9 "More Die as Troops Open Fire on Mosul Crowd," Michael Howard, Rory McCarthy, *The Guardian,* 17 April 2003; "US Troops 'Kill 13 Iraqi Protesters'," Sarah Left, *The Guardian,* 29 April 2003; "U.S. Force Said to Kill 15 Iraqis During an AntiAmerican Rally," Ian Fisher, *New York Times,* 30 April 2003.

10 "U.S. Cuts Syria's Oil Lifeline," Paul Koring, *Toronto Globe and Mail,* 16 April 2003.

11 "Israeli Ambassador to US Calls for 'Regime Change' in Iran, Syria," Jonathan Wright, Reuters, 28 April 2003.

12 "U.S. Lawmakers Target Syria," Agence France Presse, 10 April 2003.

13 Proses ini dianalisis dengan rinci di "The Fateful Triangle," ed. ke-2, Noam Chomsky, 1999.

14 "UNRWA Launches $94 Million Appeal for West Bank and Gaza," UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, 10 Desember 2002, at www.reliefweb.int.

15 Sumber yang paling jelas adalah *Israel/Palestine: How to End the War of 1948,* Tanya Reinhart (New York: Seven Stories Press, 2002).

16 "Arafat Rejects Plan by Abu Mazen to Disarm Fatah Militia," Arnon Regular, *Ha'aretz,* 23 April 2003.

17 "PM: 'Iraq War Created an Opportunity with the Palestinians We Can't Miss'," Ari Shavit, *Ha'aretz,* 21 April 2003.

18 "U.S. to Press a Four-Step Plan for Transforming the Mideast," Robin Wright, *Los Angeles Times,* 20 April 2003.

19 "Thank God for the death of the UN: Its abject failure gave us only anarchy. The world needs order," Richard Perle, *The Guardian,* 21 Maret 2003, www.guardian.co.uk/comment/story/0,3604,918764,00.html.

20 "Bush Sees Aid Role of U.N. as Limited in Rebuilding Iraq," Richard W. Stevenson," *New York Times,* 9 April 2003.

21 "Annan Talks Up Postwar U.N. Role," John J. Goldman, Edwin Chen, *Los Angeles Times,* 8 April 2003.

22 "Germany Mei Help Iraq Reconstruction Even Without UN," Agence France Presse, 7 April 2003.

23 "France Urging U.N. to Suspend Iraq Penalties," Felicity Barringer, Elisabeth Bumiller, *New York Times,* 23 April 2003.

24 "U.S. Plans to Add to Teams to Hunt for Iraqi Weapons," Steven R. Weisman, *New York Times*, 26 April 2003.

25 *St. Petersburg Times*, 1 November 2001.

26 "Pakistan Halts Secret Plan for bin Laden Trial," Patrick Bishop. *Daily Telegraph*, 4 Oktober 2001.

27 "U.S. Fumbles Chance to Nab Embassy Bombers: FBI Was Stopped From Pursuing East African Leads," by Michael Moran, disiarkan 30 Juli 1999 di msnbc.com, bisa diakses di http://ellen-bomer.com/Osama/Fumbles.html.

28 Op. cit.

29 "Qaeda's New Links Increase Threats From Far-Flung Sites," David Johnston, Don Van Natta Jr., dan Judith Miller, *New York Times*, 16 Juni 2002.

30 "Combating Terrorism: Presidential Decision Directive 62," 22 Mei 1998, bisa diakses di www.nbcindustrygroup.com/0522pres3.htm.

31 "Suspect Tells Police that Target of Bali Bombing was Americans, not Australians," Jane Perlez, *New York Times*, 9 November 2002, www.nytimes.com/2002/11/09/international/asia/09INDO.html.

32 "Bali Bomb Plotters Said to Plan to Hit Foreign Schools in Jakarta," Raymond Bonner dan Jane Perlez, *New York Times*, 18 November 2002.

33 "CIA Told to Do 'Whatever Necessary' to Kill Bin Laden; Agency and Military Collaborating at 'Unprecedented' Level; Cheney Says War Against Terror 'Mei Never End'," Bob Woodward, *Washington Post*, 21 Oktober 2001.

34 Dari pidato dalam sebuah sidang bersama Kongres, 20 September 2001, www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html.

35 Tanggal siar 17 September 2002. Di internet pada www.whitehouse.gov/nsc/nss.html.

36 Di internet pada www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf.

37 "Bush Planned Iraq 'Regime Change' Before Becoming President," Neil Mackay, *Scotland Sunday Herald*, 18 September 2002, www.sundayherald.com/print27735.

38 NSS, Introduction.

39 Ibid., h. 29.

40 RAD, Introduction, h. i.
41 Ibid., h. 51.
42 Ibid., h. 18.
43 Ibid., h. 10
44 Lihat, misalnya, "The Rigged Missile Defense Test," Joe Conason, salon.com, 31 Juli 2001, http://archive.salon.com/news/col/cona/2001/07/31/test/.
45 RAD, h. 54.
46 Ibid., h. 53.
47 Ibid., h. 51.
48 Ibid., h. 4.
49 NSS, h. 15
50 Ibid., h. 31.
51 Lihat, misalnya, "Bush Administration Demands Immunity Agreement" oleh Washington Working Group on the International Criminal Court, www.wfa.org/issues/wice/article98/article98home.html dan "India-U.S. Deal to Boycott Court," 26 Desember 2002, http://news.bbc.co.uk/hi/south asia/2606609.stm.
52 "On World Court, U.S. Focus Shifts to Shielding Officials,' Elizabeth Becker, *New York Times*, 7 September 2002.
53 "Highlights of the FY04 Budget Request," Center for Defense Information, 3 Februari 2003, www.cdi.org/budget/2004. Angkanya termasuk $379.9 milyar bagi Departemen Pertahanan dan $19.3 milyar bagi fungsi persenjataan nuklir milik Departemen Energi.
54 "Nukes You Can Use," Stephen I. Schwartz, *Bulletin of the Atomic Scientists*, Mei/Juni 2002, Volume 58, No.3, hal.18-19, 69, www.thebulletin.org/issues/2002/mj02/mj02schwartz.html
55 "The Homegrown Nuclear Threat," Carrie Benzschawel Common Dreams, 26 Februari 2002, www.commondreams.org/views02/0226-07.htm.
56 "U.S. Air Bases Forge Double-Edged Sword," William M. Arkin, *Los Angeles Times*, 6 Januari 2002.
57 Op. cit.
58 "Operation Endless Deployment," William D. Hartung, Frida Berrigan, Michelle Ciarrocca, *The Nation*, 21 Oktober 2002, www.commondreams.org/views02/1004-05.htm.

59 "Wider Military Tics With India Offer U.S. Diplomatic Leverage," Celia W. Dugger, *New York Times*, 10 Juni 2002.

60 "Philippine False Start For US Combatants," Mark Baker, *Sydney Morning Herald*, 3 Maret 2003; "U.S. Troops Arrive in Philippines for War Game," Reuters, 17 April 2003.

61 "Camp Bondsteel and America's Plans to Control Caspian oil," Paul Stuart, World Socialist Web Site, 29 April 2002, www.wsws.org/articles/2002/apr2002/oil-a29.shtml.

62 Lihat, misalnya, the Sunshine Project, www.sunshine-project.org

63 "New Role for U.S. in Colombia: Protecting a Vital Oil Pipeline," Juan Forero, *New York Times*, 4 Oktober 2002.

64 "Bush Officials Met With Venezuelans Who Ousted Leader," Christopher Marquis, *New York Times*, 16 April 2002.

65 "U.S. Bankrolling is Under Scrutiny for Ties to Chavez Ouster," Christopher Marquis, *New York Times*, 25 April 2002.

66 "Milosevic, Trailing in Polls, Rails Against NATO," Steven Erlanger, *New York Times*, 20 September 2000.

67 "Anatomy of a Coup," Conn Hallinan, *San Francisco Examiner*, 3 Mei 2002, tersedia di internet pada www.globalresearch.ca/articles/HAL205A.html.

68 Untuk penjelasan istilah, lihat buku saya *The New Crusade: America's War on Terrorism*, Bagian 2.

69 "Report on Humanitarian Needs in Iraq in the Immediate Post-Crisis Environment by a Mission to the Area Led by the Under-Secretary-General for Administration and Management," S/22366, 20 Maret 1991, di internet pada www.casi.org.uk/info/undocs/s22366.html.

70 *The Scourging of Iraq: Sanctions, Law and Natural Justice*, Geoff Simons (ed. ke-2, New York: St. Martin's Press, 1998), h. 115.

71 "The Maret to War: From Day One to War's End and Beyond," James Ridgeway, ed. (New York: Four Walls, Eight Windows, 1991), h. 135.

72 Operasi pengeboman Rubah Gurun, yang dilakukan pasukan A.S. dan Inggris, melibatkan lebih dari 400 peluru kendali dan sejumlah bom konvensional. Hal ini diperjelas lagi dalam bagian berikut buku ini.

73 S/1999/356, Celso Amorim, 30 Maret 1999, di internet pada www.un.org/Depts/unmovic/documents/AMORIM. PDF

74 *War on Iraq: What Team Bush Doesn't Want you to Know*, William Rivers Pitt dengan Scott Ritter (New York: Context Books, 2002), h. 29.

75 "The Case for Iraq's Qualitative Disarmament," Scott Ritter, Arms Control Today, Juni 2000, www.armscontrol.org/act/2000_06/iraqjun.asp.

76 Institute for Public Accuracy memiliki himpunan kutipan yang sangat bermanfaat di www.accuracy.org/iraq.

77 Warren Christopher, *New York Times*, 29 April 1994, disebut di "Neighbors, Not Friends: Iraq and Iran After the Gulf Wars," Dilip Hiro (New York: Rutledge, 2001), h. 76.

78 *The Greatest Threat*, Richard Butler (New York: Public Affairs, 2000), h. 176.

79 Ibid., h. 185. Cerita ini dibahas lebih mendalam di dalam buku *War Plan Iraq: Ten Reasons Against War on Iraq*, Milan Rai (London: Verso, 2002), h. 47-54.

80 *Financial Times*, 2 November 1998, disebut di Rai, h. 48.

81 Dibicarakan lebih detil di Rai, h. 49-52.

82 Hiro, op. cit., h. 161.

83 "U.S. Says It Collected Iraq Intelligence Via UNSCOM," Thomas W. Lippman, Barton Gellman, *Washington Post*, 8 Januari 1999.

84 *The Threatening Storm: the Case for Invading Iraq*, Kenneth M. Pollack (New York: Random House, 2002), h. 93.

85 "Weapons Inspections Were 'Manipulated'," Carola Hoyos, Nick George, Roula Khalaf, *Financial Times*, 29 Juli 2002.

86 "A Smart Peace Movement Is MIA," Marc Cooper, *Los Angeles Times*, 29 September 2002.

87 Untuk diskusi lebih mendalam perihal masalah analogi Afrika Selatan dan paradigma sanksi ini, lihat tulisan saya "Movement for Global Justice? The Fight over PNTR with China," www.zmag.org/globalchina.htm.

88 "Report on Humanitarian Needs in Iraq in the Immediate Post-Crisis Environment by a Mission to the Area Led by the Under-Secretary-General for Administration and Management, 10-17 March 1991," S/22366, 20 Maret 1991, www.un.org/Depts/oip/background/reports/s22366.pdf.

89 "Child Malnutrition Prevalent in Central/South Iraq," UNICEF, www.unicef.org/newsline/prgva11.htm.

90 Rai, op. cit., h. 178.

91 Tersedia di internet pada www.unicef.org/reseval/iraqr.htm.

92 "Results of the 1999 Iraq Child and Maternal Mortality Surveys," www.unicef.org/reseval/iraqr.html Sebagian besar riset lapangnya dilakukan oleh orang-orang Irak, tetapi staf UNICEF melakukan pengecekan-silang statistika yang terperinci untuk memastikan agar datanya tidak ternoda.

93 "Sanctioning Saddam: The Politics of Intervention in Iraq," Sarah Graham-Brown (New York: I. B. Tauris, 1999), h. 72-73.

94 Ibid., h. 75.

95 Laporan khusus FAO/WFP Food Supply and Nutrition Assessment Mission to Iraq, 3 Oktober 1997, www.fao.org/WAICENT/faoinfo/economic/giews/english/alertes/srirq997.htm.

96 Graham-Brown, op. cit., h. 31.

97 Ibid., h. 72.

98 "Economic Sanctions as a Weapon of Mass Destruction," Joy Gordon, majalah *Harper's*, November 2002.

99 Ibid.

100 Ibid.

101 Ibid.

102 Untuk penggambaran yang lebih sempurna, lihat "The Secret Behind the Sanctions: How the US Intentionally Destroyed Iraq's Water Supply," Thomas Nagy, *The Progressive*, 10 Agustus 2001.

103 Gordon, op. cit.

104 "In Search of an Iraqi Policy," Editorial, *The Economist*, 24 Februari 2001.

105 Laporan Sekretaris Jendral PBB, S/2001/186, 5 Maret 2001.

106 Human Rights Watch, Agustus 2000, www.hrw.org/press/2000/08/iraq0804.htm.

107 Laporan Sekretaris Jendral PBB, S/2001/505, 14 Mei 2001, paragraf 29.

108 "Plans for Iraq Attack Began on 9/11," *CBS News*, 4 September 2002, www.cbsnews.com/stories/2002/09/04/september11/main520830.shtml.

109 Lihat, misalnya, "U.S. Inquiry Tried, but Failed, to Link Iraq to Anthrax Attack," William J. Broad and David Johnston, *New York Times*, 22 Desember 2001, www.commondreams.org/ headlines0l/1222-02.htm.

"Anthrax Matches Army Spores-Bioterror: Organisms made at a military laboratory in Utah are genetically identical to those mailed to members of Congress," Scott Shane, *Baltimore Sun*, 12 Desember 2001, www.commondreams. org/headlines0l/1212-01.htm.

110 "Bolton Says Iraq, North Korea Violate Biological Weapons Pact," U.S. State Department, pada daftar US-IRAQPOLICY, 19 November 2001.

111 Dalam acara MSNBC, *Hardball with Chris Matthews*, 1 Mei 2002.

112 "Preemptive Strike on Iraq to Improve Peace Prospects," Henry Kissinger, *Manila Times*, 11 Agustus 2002, www. manilatimes.net/national/2002/aug/11/top_stories/ 20020811top6.html. Sebuah versi dari penggalan ini dipublikasikan meluas, dari *Houston Chronicle* sampai *Washington Post.*

113 "Go Slow on Iraq," Mark Dayton, *Washington Post*, 29 September 2002, www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/ A13224-2002Sep27.html.

114 Lihat, misalnya, Quadrennial Defense Review Report, 30 September 2001.

115 "U.N. Official: Fake Iraq Nuke Papers Were Crude," Reuters, 25 Maret 2003.

116 "Blix Attacks 'Shaky' Intelligence on Weapons," Gary Younge, Richard Norton-Taylor, Patrick Wintour, *The Guardian*, 23 April 2003, www.guardian.co.uk/Iraq/Story/ 0,2763,941533,00.html.

117 "Exclusive: The Defector's Secrets," John Barry, *Newsweek*, 3 Maret 2003, www.msnbc.com/news/876128.asp?cp1=1. Transkrip wawancara ini dapat diperoleh di http:// middleeastreference.org.uk/kamel.html.

118 "Inspectors Call U.S. Tips 'Garbage'," *CBS News*, 20 Februari 2003, www.cbsnews.com/stories/2003/01/18/iraq/ main537096.shtml.

119 "U.S. Says Hussein Must Cede Power to Head Off War," Felicity Barringer dengan David E. Sanger, *New York Times*, 1 Maret 2003.

120 "Patterns of Global Terrorism 2000," U. S. State Department, dalam bagian yang berjudul "Overview of State-sponsored Terrorism," www.state.gov/s/ct/rls/pgtrpt/2000/.

121 "A Case Not Closed," Seymour M. Hersh, *The New Yorker*, 1 November 1993, www.newyorker.com/archive/content/?020930fr_archive02.

122 "Calls for New Push Into Iraq Gain Power in Washington," Elaine Sciolino, Alison Mitchell, *New York Times*, 3 Desember 2001.

123 "Saad al-Bazzaz: An Insider's View of Iraq," *Middle East Quarterly*, Desember 1995, h. 69, disebutkan di dalam Pollack, h. 154.

124 Dilaporkan beragam, termasuk pada "CIA Says Iraq Stopping Short of Terrorism vs U.S.," Tabassum Zakaria, Reuters, 8 Oktober 2002, di internet pada www.philly.com/mld/philly/news/nation/4238650.htm.

125 "White House 'Exaggerating Iraqi threat' Bush's televised address attacked by US intelligence," Julian Borger, *The Guardian, 9 Oktober 2002,* www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,807194,00.html.

126 *Spider's Web: The Secret History of How the White House Illegally Armed Iraq, Alan Friedman (New York: Bantam Books, 1993),* h. 104.

127 Lihat, misalnya, *The Longest War: The Iran-Iraq Military Conflict*, Dilip Hiro (New York: Routledge, 1991), dan *The Culture of Terrorism*, Noam Chomsky (Boston: South End Press, 1988).

128 Lihat, misalnya, *Saddam Hussein: The Politics of Revenge*, Said K. Aburish (New York: Bloomsbury Publishing, 2000), h. 249-250.

129 "America Didn't Seem to Mind Poison Gas," Joost R. Hilterman, *International Herald Tribune*, 17 Januari 2003, www.commondreams.org/views03/0117-01.htm.

130 Lihat *The March to War*, James Ridgway, ed. (New York: Four Walls, Eight Windows, 1991), h. 30; *Desert Shield to Desert Storm: The Second Gulf War*, Dilip Hiro (New York:

Routledge, 1992), h. 94; *Iraq: From Sumer to Saddam*, Geoff Simons (New York: St. Martin's Press, 1994), h. 351.

131 *RN: The Memoirs of Richard Nixon*, Richard Nixon (New York: Warner Books, 1978), h. 490, disebut di dalam Rai, h. 194.

132 Lihat, misalnya, "Poll: No Rush To War," pengumpulan pendapat *CBS News*, 24 September 2002, http://cbsnews.cbs.com/stories/2002/09/24/opinion,/polls/ main523130.shtml.

133 "Apparatus of Lies: Saddam's Disinformation and Propaganda 1990-2003," dokumen Gedung Putih, www.whitehouse.gov/ogc/apparatus.

134 "Purported bin Laden Message on War Against Infidels," CNN, 11 Februari 2003, www.cnn.com/2003/WORLD/meast/02/11/ binladen.excerpts/index.html. Sejumlah transkrip tersedia dan terdapat sedikit perbedaan dalam penerjemahannya.

135 "Prague Discounts an Iraqi Meeting," James Risen, *New York Times*, 21 Oktober 2002.

136 "Bin Laden-Iraq Link Suddenly Emerges," Mark Mackinnon, Alan Freeman, *Toronto Globe and Mail*, 6 Februari 2003.

137 "Exiled Mullah Denies Claims of Terror Ties Made by U.S.," Don Van Natta Jr., *New York Times*, 6 Februari 2003.

138 "Terrorism Experts Doubt bin Laden, Baghdad Link," Timothy Appleby dengan berkas-berkas dari Alan Freeman, *Toronto Globe and Mail*, 6 Februari 2003.

139 "Dubious Iraqi Link," David Ignatius, *Washington Post*, 14 Maret 2002.

140 "Allies Find No Links Between Iraq, A1 Qaeda," Sebastian Rotella, *Los Angeles Times*, 4 November 2002.

141 Senate Foreign Relations Committee Testimony, 31 Juli 2002.

142 "Beyond Bali: ASPI's Strategic Assessment 2002," Australia Strategic Policy Institute, www.aspi.org.au/beyondbali/.

143 "IAEA Update Report to the Security Council Pursuant to Resolution 1441," Mohammed el-Baradei, 27 Januari 2003, www.iaea.org/worldatom/Press/Focus/IaeaIraq/unscreport_290103.html.

144 "Chemical Coup d'Etat," George Monbiot, *The Guardian*, 16 April 2002; "Diplomacy US-Style," George Monbiot, *The Guardian*, 23 April 2002.

145 "U.S. Tells Iran, Syria, North Korea: Learn from Iraq," Philip Pullella, Reuters, 9 April 2003.

146 "North Korea Says Its Arms Will Deter U.S. Attack," Howard W. French, *New York Times*, 7 April 2003.

147 "Korean Diplomacy Enters a New Era," Howard W. French, *New York Times*, 20 April 2003.

148 "United Nations Security Council Resolutions Currently Being Violated by Countries Other than Iraq," Stephen Zones, Foreign Policy in Focus Commentary, 28 Februari 2003, www.fpif.org/commentary/2002/0210unres.html.

149 "Rumsfeld Adds Targets in 'No Fly' Enforcement," Robert Schlesinger, *Boston Globe*, 17 September 2002.

150 "Britain and US Step up Bombing in Iraq: Ministry of Defence reveals 300 percent rise in ordnance dropped over southern no-fly zone," Richard Norton-Taylor, *The Guardian*, 4 Desember 2002, www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,853260,00.html.

151 The Colorado Campaign for Middle East Peace memiliki kumpulan telegram yang mencatat semua pengeboman, tersedia pada www.ccmep.org/usbombingwacth/2003. htm.

152 Dibahas panjang-lebar dalam buku saya *The New Crusade: America's War on Terrorism*, h. 112-113.

153 Op. cit., h. 28-29.

154 "Pentagon Planning, Not Diplomacy, Sets U.S. Agenda on Iraq," Michael T. Klare, *Foreign Policy in Focus*, 17 Februari 2003, www.presentdanger.org/commentary/2003/U302milplan.html.

155 Lihat, misalnya, "U.S. Plan for Iraq is Said to Include Attack on 3 Sides," Eric Schmitt, *New York Times*, 5 Juli 2002; "How to Paint a Bullseye on Iraq," Ron Brackett, *St. Petersburg Times*, 18 Agustus 2002.

156 Klare, op. cit.

157 "U.S. Plan for Saddam: Shock and Awe William Bunch, *Philadelphia Daily News*, 26 Februari 2003. "Analysis: Strategic bombing in Iraq war," Thomas Houlahan, United Press International, 23 April 2002, www.upi.com/ view. cfm? StoryID=20030423-040349-4735r.

158 Lihat, misalnya, "Bechtel Strikes Back at Bolivia," Jim Shultz, Pacific News Service, Alternet, 11 November 2002, www.alternet.org/story.html? StoryID=14525.

159 "US Holds Out at WTO Talks on Medicines, Access," Agence France-Presse, 16 Desember 2002, www.aegis.com/news/afp/2002/AF0212C l.html.

160 Bagian 2, "The New White Man's Burden," dalam *The New Crusade*, h. 99-123.

161 *Out of the Ashes: the Resurrection of Saddam Hussein*, Andrew dan Patrick Cockburn, New York: HarperCollins 1999, h. 74.

162 *Saddam Hussein: The Politics of Revenge*, Said K. Aburish, London: Bloomsbury 2000, h. 308.

163 Op. cit. 310. Penindasan pemberontakan ini dibahas panjang-lebar di dalam *War Plan Iraq: Ten Reasons Against War on Iraq*, Milan Rai (London: Verso, 2002), h. 75-83.

164 Hiro, h. 36-37.

165 "A Rising Sense That Iraq's Hussein Must Go," Thomas L. Friedman, *New York Times*, 7 Juli 1991.

166 "The Warlords Win in Kabul," Omar Zakhilwal, Adeena Niazi, *New York Times*, 21 Juni 2002.

167 "US pulls out Karzai's military bodyguards," Peter Beaumont, *The Observer*, Minggu, 24 November 2002, www.observer.co.uk/afghanistan/story/0,1501,846595,00.html.

168 "Abrupt Amnesty At Iraqi Prisons: A Joy for Many, Grief for Some," John F. Burns, *New York Times*, 22 Oktober 2002.

169 "Political Detainees Still Held; Prison Papers Forged," Pers Irak, Arbil (Irak Utara), 18 Desember 2002, www.iraqpress.org/english.asp?fname=ipenglish\00olde\9999ehum72.htm.

170 "Brits Fighting Fierce Battles With 1000 Militia Near Basra," D. Melgren, C. Hanley, Associated Press, 26 Maret 2003.

171 "Basra Now Military Target, Says UK," CNN, 25 Maret 2003, www.cnn.com/2003/WORLD/europe/03/25/sprj.irq.basra/index.html.

172 "Food For Southern Iraq Pre-positioned in the Region, Says Natsios," jumpa pers USAID, 25 Maret 2003.

173 "Grisly Results of U.S. Cluster Bombs," Thomas Frank, *Newsday*, 15 April 2003, www.newsday.com/news/nationworld/iraq/ny-woclus0415.story.

174 "Good Kills," Peter Maass, *The New York Times Magazine*, 20 April 2003.

175 Lihat *The Prize: the Epic Quest for Oil, Money, and Power, Daniel Yergin (New York: Touchstone, 1992)*, untuk memperoleh referensi mendalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan minyak.

176 Official US State Department history 1945, Volume 8, h. 45.

177 Op. cit., h. 535-7.

178 Op. cit., h. 757.

179 "With War, Africa Oil Beckons," Ken Silverstein, *Los Angeles Times*, 21 Maret 2003.

180 "Iraq Country Analysis Brief," U.S. Energy Information Administration, Februari 2003, www.eia.doe.gov/emeu/cabs/iraq.html.

181 "Repatriating Migrant Arab Capital? Say 'Inshallah,"' *Lebanon Daily Star*, 30 Desember 2002.

182 "Firm's Iraq Deals Greater Than Cheney Has Said," Colum Lynch, *Washington Post*, 21 Juni 2001.

183 "Iraq Country Analysis Brief," U.S. Energy Information Administration, Februari 2003, www.eia.doe.gov/emeu/cabs/iraq.html.

184 "Oil Firms Wait as Iraq Crisis Unfolds," Robert Collier, *San Francisco Chronicle*, 29 September 2002.

185 "In Iraqi War Scenario, Oil Is Key Issue: U.S. Drillers Eye Huge Petroleum Pool," Dan Morgan, David B. Ottaway, *Washington Post*, 15 September 2002, www. washingtonpost.com/ac2/wpdyn/A18841-2002Sep14.

186 "BP Chief Fears US Will Carve up Iraqi Oil Riches," Terry MacAlister, *The Guardian*, 30 Oktober 2002, www.guardian.co.uk/oil/story/0,11319,82222S,00.html.

187 "Saudis to Boost Oil Output in Case of Iraq War-US," Reuters, 26 Februari 2002.

188 "In Quietly Courting Africa, U.S. Likes the Dowry: Oil," James Dao, *New York Times*, 19 September 2002.

189 "Slump Aside, Trade Deficit Hits a Record," David Lconhardt, *New York Times*, 21 Februari 2003.

190 Lihat "Behind the Invasion of Iraq," Research Unit for Political Economy, Desember 2002, www.rupe-india.org/34/behind.html, untuk diskusi lebih lanjut.

191 "The Battle for Energy Dominance," Edward Morse, James Richard, *Foreign Affairs*, Maret/April 2002, h. 23.

192 "Saudi Arabia Withdraws Natural Gas Deal," 9 September 2002, Rigzone.com, www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=4257.

193 "The President's Real Goal in Iraq," Jay Bookman, *Atlanta Journal-Constitution*, 29 September 2002, www.accessatlanta.com/ajc/opinion/0902/29bookman.html.

194 Untuk diskusi, lihat buku saya *The New Crusade*, Bagian 2, "The New White Man's Burden."

195 "Review of Current Trends: U.S. Foreign Policy," PPS 23, George Kennan, 24 Februari 1948. Kutipan pada *Containment: Documents on American Policy and Strategy, 1945-1950*, Thomas H. Etzold, John Lewis Gadds, eds. (New York: Columbia University Press, 1978).

196 "Bush's Lost Continent: The President Promised South America Close Friendship, No Bailouts. Why He Switched on Both," CNN, 12 Agustus 2002, www.cnn.com/2002/ALLPOLITICS/O8/12/time.bush.

197 "After Bush Push on Foreign Aid: Getting Results," David R. Francis, *Christian Science Monitor*, 1 April 2002, www.csmonitor.com/2002/0401 /p21s01-wmgn.html.

198 Email ini meluas peredarannya di internet. Ms. Garrett mengakuinya sebagai tulisannya. Tersedia di www.topica.com/lists/psychohistory/read/message.html?sort=d&mid=1711891071&start=4389.

199 "52 African Countries Endorse French Opposition to War on Iraq," Glenn Frankel, *Washington Post*, 22 Februari 2003.

200 "The Right Way," Michael Walzer, *The New York Review of Books*, 13 Maret 2003, www.nybooks.com/articles/16110.

INDEKS



B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

pemeriksaan persenjataan, viii, xxix, xxx, 58, 60, 65, 68, 72, 74, 75, 78, 109, 110, 131, 139, 140, 142, 143, 197

Q

R

S

T

U

V

W

Z

TENTANG PENULIS



RAHUL MAHAJAN (Doktor dari *University Texas at Austin*) adalah seorang aktivis antiperang baik pada tingkat lokal maupun nasional. Dia adalah salah seorang pendiri *Nowar Collective* (www.nowarcollective.com) dan anggota di *National Board of Peace Action*, sebuah organisasi perdamaian yang paling besar dan paling mengakar di Amerika Serikat. Buku pertamanya, *The New Crusade: America's War on Terrorism*, dipandang sebagai "sebuah bacaan wajib bagi mereka yang ingin memahami perang terhadap terorisme." Dia menulis secara berkala di media-media cetak baik yang *mainstream* maupun yang beraliran alternatif dan di situs-situs seperti Common Dreams, Zmag.org, Alternet, dan Counterpunch. Tulisannya dapat dibaca di www.rahulmahajan.com. Dia bisa dihubungi melalui alamat emailnya di rahul@tao.ca.

MELAWAN NEGARA TERORIS

Amerika Serikat telah mencapai puncak baru dominasi politiknya. Ia mampu mencampakkan keinginan yang disuarakan oleh perikemanusiaan dari seluruh masyarakat di dunia dan mayoritas bangsa-bangsa. Bahkan mampu memaksakan kehendaknya agar negara-negara lain mau menerima kontrol yang dilakukannya atas wilayah yang semakin lama semakin meluas. Tidak perlu lagi dalih yang menyatakan bahwa AS bukanlah sebuah imperium, bahkan kalaupun ia enggan.

Rahul Mahajan, penulis buku ini, memaparkan penilaian brilian dan gambaran utuh tentang perang melawan terorisme: Agresinya terhadap Irak dan apa artinya demi memahami dominasi AS di dunia pada awal abad ke-21. Buku yang berisi pemikiran jernih, argumentasi rasional, bahasa tanpa pretensi, dan bukti-bukti kuat.

"Informatif dan tegas, mengkonfrontasi realitas-realitas penting dari dominasi global AS saat ini. Alat analisis yang tajam untuk memahami secara komprehensif yang dimaksud dengan perang melawan terorisme dan kebijakan luar negeri AS."
—Norman Solomon, *Direktur Eksekutif Institute for Public Accuracy*

"Karya yang wajib dibaca oleh mereka yang konsen dengan masalah-masalah perang dan implikasinya—dan kitalah yang mesti melakukannya."
—Robert W. McChesney, *Penulis Our Media, Not Theirs*

"Analisis yang tajam dan aktual mengenai implikasi perang AS melawan Irak. Menyajikan kita dominasi AS saat ini dan kehendaknya memperluas penguasaan atas dunia."
—Bill Fletcher, Jr., *Presiden Trans-Africa Forum*



Rahul Mahajan, doktor dari University of Texas, adalah seorang aktivis antiperang baik pada tingkat lokal maupun nasional. Pendiri no war collective (www.nowarcollective.com) dan anggota di National Board of Peace Action, sebuah organisasi perdamaian yang paling besar dan paling mengakar di Amerika Serikat. Buku pertamanya, *The New Crusade: America's War on Terrorism*, dipandang sebagai "bacaan wajib bagi mereka yang ingin memahami perang terhadap terorisme."

Profetik
Kompleks Plaza Golden Blok E 47
Jln. R.S. Fatmawati No.16
Jakarta Selatan 12410

ISBN: 979-3573-09-0
9 789793 573090